MENCARI 'GOLPISTA' ENAM LIMA

SINTESA

INDIKATOR SIKAP INTELEKTUAL MAHASISWA

INDONESIA (C)EMAS

kamu

Antun Joko Opposui

dulu diwaktu dahulu
aku yang membesarkan kamu
semakin asing kamu
semakin jauh
lupakan aku

dulu di waktu dahulu
aku yang membesarkan kamu
kupersenjatai dan kubuatkan rumah - rumah
untukmu
semakin asing kamu
semakin jauh - semakin jauh
semakin lupakan aku

wajahmu telah berubah
selalu kamu curiga padaku
kamu arahkan senjata bayonetmu ke mataku
rumah - rumah yang kubuat untukmu
kamu jadikan penjara - penjara untukku
supaya aku tak lagi berteriak :
kamu, alat bajingan - bajingan penipu
penumpuk modal, perampas harta rakyat

wajahmu telah berubah
setiap waktu siap kamu tembak dadaku
setiap waktu siap kamu buka pintu - pintu penjara
untukku
ketika aku bertanya
mengapa kamu begitu?
kamu sebut aku : P E M B E R O N T A K !

Yogyakarta 17 Juni 1995

DARI REDAKSI

SINTESA
INDIKATOR SIKAP INTELEKTUAL MAHASISWA
No. 10 / VIII / 1995
ISSN : 0854-5359

Pelindung :
DekanFisipolUGM
Dr. Yahya A.Muhaimin

Pemimpin Umum / Penanggung Jawab:
Andi Arief

Sekretaris Umum :
Niddah N.A

Bendahara :
Lobrin Agung

Pemimpin Redaksi :
Sopril A. Hamzah

Dewan Redaksi:
Andi Arief
Sopril A. Hamzah
Yussac F.Ananda
Amalinda

Sidang Redaksi:
Agung Yudhawiranata
Amalinda
Amin Sayogo
Amril Buamona
Dhyta Caturani
Djudjur T. Susilo
Dodiek Seto H.
Evi Mariani
Faisal Muslim
Iwan Pribadi
Mira Dania
Nuraini Juliastuti
Poppy SW
Yooke

Fotografer :
Fauzan

Layout & Artistik:
Dewa 'Oecih' Widyakumara
Evi
Muhammad Fajar

Pemimpin Perusahaan :
Victor Yasadhana

Staff Perusahaan :
Adyawarman
Stanley YR Mandagi
Titok Hariyanto

Sirkulasi & Promosi :
Asnuddin Bugi
Susilo
Dodik Ariyanto

Litbang :
Arie Sudjito
Velix Wanggai
Archam Effendi
Matheus D. Hartanto

Alamat Redaksi: Kampus Fisipol UGM Jl. Socio Yustisia, Bulaksumur YK 55281, Telp 88688(631)
SINTESA adalah majalah berkala yang diterbitkan Lembaga Pers Mahasiswa Fisipol UGM
Misi: Mengembangkan Tradisi intelektual dan membangun kultur oposisi.
Redaksi menerima kontribusi tulisan, karikatur, foto dan dana sesuai dengan misi yang diemban

SINTESA kapan terbit? Pertanyaan itu seringkali dilontarkan, dan membuat kami *'kesentil'*. SINTESA memang sudah terlalu lama tidak terbit, dengan menggunakan ukuran pers mahasiswa sekalipun. Kekosongan ini diisi dengan kerja-kerja Litbang saja.

Namun tahun 1995 ini, dengan beberapa awak barunya, kru SINTESA mulai turun lapangan. Dan seperti biasa, bukan tanpa rintangan. Mulai dari kru yang punya banyak kesibukan, dana, sampai tema laput yang sempat beberapa kali berubah. Dan jadilah "INDONESIA (c)EMAS" --yang telanjur tersosialisasi duluan daripada majalahnya, menjadi tema laput kami.

Ini memang tak terhindarkan. Namun, kerahasiaan redaksional yang semestinya dijaga sejak awal ternyata tidak terwujud. Lantaran, hubungan kami dengan sesama pers mahasiswa lain lebih berupa hubungan perkawanan daripada hubungan profesional.

Alhasil, kami cuma bisa tertegun ketika tema Mimbar Utama yang sedang kami garap *nongol* di halaman terakhir majalah BALAIRUNG, sebagai karikatur berukuran kurang lebih seperempat halaman. Rupanya kami mesti tertegun untuk yang kedua kalinya ketika mereka cuma bilang bahwa slogan itu bukan milik SINTESA, sudah banyak orang yang menggunakan kata-kata 'INDONESIA (c)EMAS". Aduh....

Ya memang, 'INDONESIA (c)EMAS' mungkin bukan milik SINTESA. Ia dimiliki banyak orang. Bahkan mungkin seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan rendah hati, sekaligus bangga, kami persembahkan SINTESA, "50 TAHUN INDONESIA (c)EMAS" pada seluruh mahasiswa FISIPOL UGM, dan juga seluruh rakyat Indonesia.

Redaksi

DAFTAR ISI

Mimbar Utama :

Mimbar Khusus :

Mimbar Bebas :

POKOKNYA PERPUSTAKAAN! KALAU BISA PAKAI MICROFILM

Saya masih yakin *par exellence* UGM itu karena visi kerakyatannya. Tetapi situasi akhir-akhir ini membuat saya masygul. Mengapa pihak rektorat cenderung menggenjot pembangunan fisik? Dari gedung auditorium, stadion sampai program pemagaran kampus.

Sementara roh 'kerakyatan' menguap entah kemana. Mengapa bukan perpustakaan misalnya ? Melihat khazanah pustaka yang mengharukan itu, mampukah menelurkan gagasan *genial* lagi berpihak pada rakyat ? Dan inilah yang penting, pemihakan yang tegas. Dengan perpustakaan yang memadai dengan buku-buku yang tanggap menangkap gelegak zaman. Bukan tidak mungkin akan mematangkan intelejensia mumpuni yang sehati dengan *spirit of the people*.

Pembangunan kualitas manusia bertumpu pada pengembangan karakter, bukan pada fasilitas. Bukan berarti fasilitas tidak penting. Seperti perpustakaan misalnya. Ini saja sudah cukup untuk menegakkan kembali visi kerakyatan yang-- setidaknya menurut beberapa kalangan -- semakin sayup saja. Apakah kita akan berkilah dengan minimnya dana? Lalu, auditorium yang supermegah itu? Jadi, masihkah visi itu ada pada kita? Kalau tidak, ya... sudah.

Cholis
Koordinator ISC Yogyakarta
(Ini Study Club)

SINTESA JANGAN JADI MADING

Sejak Sintesa ketularan wabah breidel yang melanda dunia pers Indonesia, saat itu saya merasa (maaf) bahwa Sintesa tidak tertolong lagi. Kalaupun tetap hidup, ia akan jadi media yang "biasa" saja dan tidak ada lagi "berita". tapi ternyata saya salah sangka. Sintesa tetap menunjukkan eksistensinya. baik lewat diskusi-diskusimaupun terbitan-terbitannya.Kalau boleh ikut usul, saya berharap agar Sintesa janganlah menjadi majalah "ding-ding". Ding-ding identik dengan tidak sadar atau bisa dikatakan mabuk, dimana ketidaksadaran adalah hilangnya obyektivitas dan kesadaran serta kepekaan terhadap lingkungan. Sintesa harus menghindari ini.

Selamat berjuang, dan satu lagi jangan biarkan rasionalitas berjalan sendirian, ini yang terpenting.

Yan Parhas
Mantan Ketua KPALH Setrajana
Fisipol UGM

BANGUN DONG! BANGUN!

Salam demokrasi!

Pertama aku menginjakkan kaki di kampus biru, terbitan mahasiswa pertama yang aku baca adalah SINTESA. Kalau nggak salah isinya 'SuksesiIstana'. Isinya bolehlah dipuji: kritis dan memihak! Terus yang terakhir kali SINTESA terbit tahun 1993. Kali ini lebih oke. SINTESA berani membongkar hal yang selama ini dianggap keramat oleh Orde Baru: menggugat eksistensi UUD'45. Banyak kalangan tercengang dengan keberanian awak SINTESA menggulirkan isu ini.

Setelah edisi 'kontroversial' sampai sekarang aku belum liat lagi SINTESA. Kemana Bung ? Apa udah lelah berkarya lewat pena ? Mungkin seperti umumnya problem penerbitan kampus, krisis dana & SDM juga menghantui SINTESA. Tapi itu bukan alasan untuk tidak berkarya. Dan aku yakin SINTESA pasti bisa. Jangan sampai FISIPOL yang dijuluki motor demokrasi di UGM cuma bisa 'teriak' di jalan, diskusi, tapi nggak bisa bikin terbitan yang obyektif, krisis dan ilmiah. Salah satu media alternatif harus tampil dengan memberi informasi yang benar. Rakyat butuh bacaan yang obyektif dan alternatif juga kritis, bukan slogan-slogan kosong pejabat. Ayo Bung ! Jangan terlalu lama tidur atau mengagumi diri sendiri !

Sandy Octavian
Ketua SM FH UGM

KRU SINTESA MENGUCAPKAN "SELAMAT" ATAS DIWISUDANYA:

ERWAN WIDIARTO
(MANTAN PU SINTESA)
ALVEN STONY
(MANTAN PU SINTESA)
ERIC HIAREJ
(MANTAN PU SINTESA)
ANA
(MANTAN REDAKTUR SINTESA)
YUSRA ABDI
(MANTAN REDAKTUR SINTESA)
OETAMI DEWI
(MANTAN SEKR. SINTESA)
JAROT SUKRISNA
(MANTAN STAF REDAKSI)

SEGENAP ANGGOTA SETRAJANA MENGUCAPKAN "SELAMAT ATAS DIWISUDANYA:

- Y. INDRAWAN (IP)
- BAMBANG WAHYU (STR)
- DENDY (KOM)
- GALUH ADITYA DARMO (HI)
- EKO ENDARYANTO (IP)
- PUTHUT YULIANTO (IP)

KRU SINTESA MENGUCAPKAN TERIMAKASIH PADA:

- NOOR CHOLIS
- HENDRA CIPTA
- BIMO

ATAS BANTUANNYA

EDITORIAL

Mengukir Emas Dengan Sejarah

Henry Ford pernah berkata, "Sejarah adalah omong Kosong". Tapi Soekarno membantahnya. Soekarno bertutur bahwa sejarah memberi banyak bahan, perspektif dan pelajaran penting. Soekarno, yang gandrung sejarah, dengan retorika yang romantik, mitis dan revolusioner berulang- ulang mengutip sejarah. Si Bung yang Flamboyan dalam *style* kekuasaan nya itu, bersikukuh sejarah akan menuntun Rakyat Indonesia menuju kejayaannya.

Tapi Henry Ford, Si Raja Mobil yang konon mulai bangkrut itu, juga tidak salah. Soekarno ,lengkap dengan Sejarah, Nasakom dan Pidato Jas Merah (*Jang- an sekali-kali Melupakan sejarah)*-nya jatuh dan kekuasaan berganti. Lembaran sejarah baru dimulai. Bantuan luar negeri, minyak melimpah dan Kekuasaan monolitik menjadi atribut penting Orde Baru.

Jika Orde Baru dewasa ini mengalami ketergantungan, kemandekan dan keterbelakangan, --akibat bantuan yang berubah menjadi "hutang' dan salah urus manajemen minyak -- dan karenanya membenarkan Soekarno dengan Politik "Revolusi Belum selesainya". Persoalannya adalah Sejarah menurut "Siapa"(aktor) dan "Bagaimana" (Konteks). Dua komponen pembentuk Rezim Signifikansi.

"Uncommon History"

Sejarah dapat dipilah menjadi tiga jenis. Sejarah Kekuasaan, Sejarah Akademik dan Sejarah "Apa-adanya" (Common Sense). Sejarah kekuasaan adalah cerita tentang masa silam, yang sudah diberi "makna", untuk kepentingan mendukung dan membenarkan sebuah kekuasaan. Berbeda dengan itu, Sejarah Akademik merupakan konstruksi sejarah yang disusun para sejarawan profesional, yakni sejarah dengan potret yang diberi makna melalui teori dan metodologi . Adapun sejarah "apa-adanya" adalah sejarah yang pilar- pilar bangunan kisahnya, diserap dari tradisi dan diwariskan secara "apa-adanya" (*given*).

Sejarah warisan kerap disebut Sejarah *Common-sense*. Sejarah Kekuasaan dan Sejarah Akademik , karena hasil rekonstruksi, merupakan Sejarah "*Uncommon Sense*". "*Uncommon History*". Tetapi , apabila konstruksi Sejarah berat pada kepentingan kekuasaan, maka sejarah tersebut lebih layak disebut "Mitologi" ketimbang "Histori". Peradaban sebuah Bangsa dapat diukur dari kebudayaan masyarakat yang bergerak dari mitologi ke sejarah.

Persoalannya kemudian adalah,sering- kali terutama dikalangan masyarakat yang belum terdidik (ini bukan pernyataan arogan kaum terpelajar)--mitos berfungsi sangat positif. Tidak ada yang menyangkal, ketika Soekarno berbicara tentang Indonesia , simbolisasi dari negara- republik atas dasar Nasionalisme Eropa-- ia menggambarkannya dalam mitos-mitos superioritas Sriwijaya dan Majapahit. Kenyataannya rakyat mengerti, dan bergerak mengikuti naluri-naluri sejarah kemerdekaan.

Akan tetapi, mengutip pendapat seorang sejarawan, apabila untuk tempo yang terlalu lama kita mengeksplotasi Mitos, maka Kearifan sebagai suatu Bangsa menjadi pertanyaan. Situasi memang dapat terus dikendalikan, tetapi sejarah tidak bergerak secara kualitatif. Menjelang 50 tahun republik, dengan agenda besar "Indonesia Emas" sebaiknya kita ukir dengan "Sejarah", bukan "Mitos".

(Yussac F. Ananda)
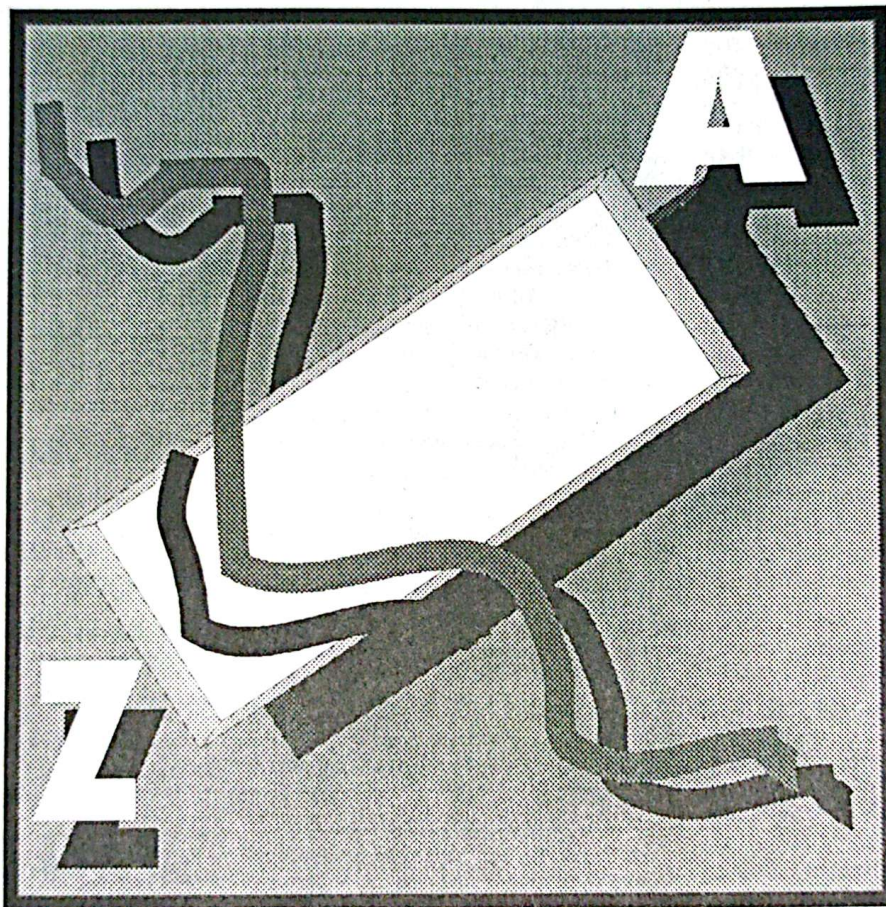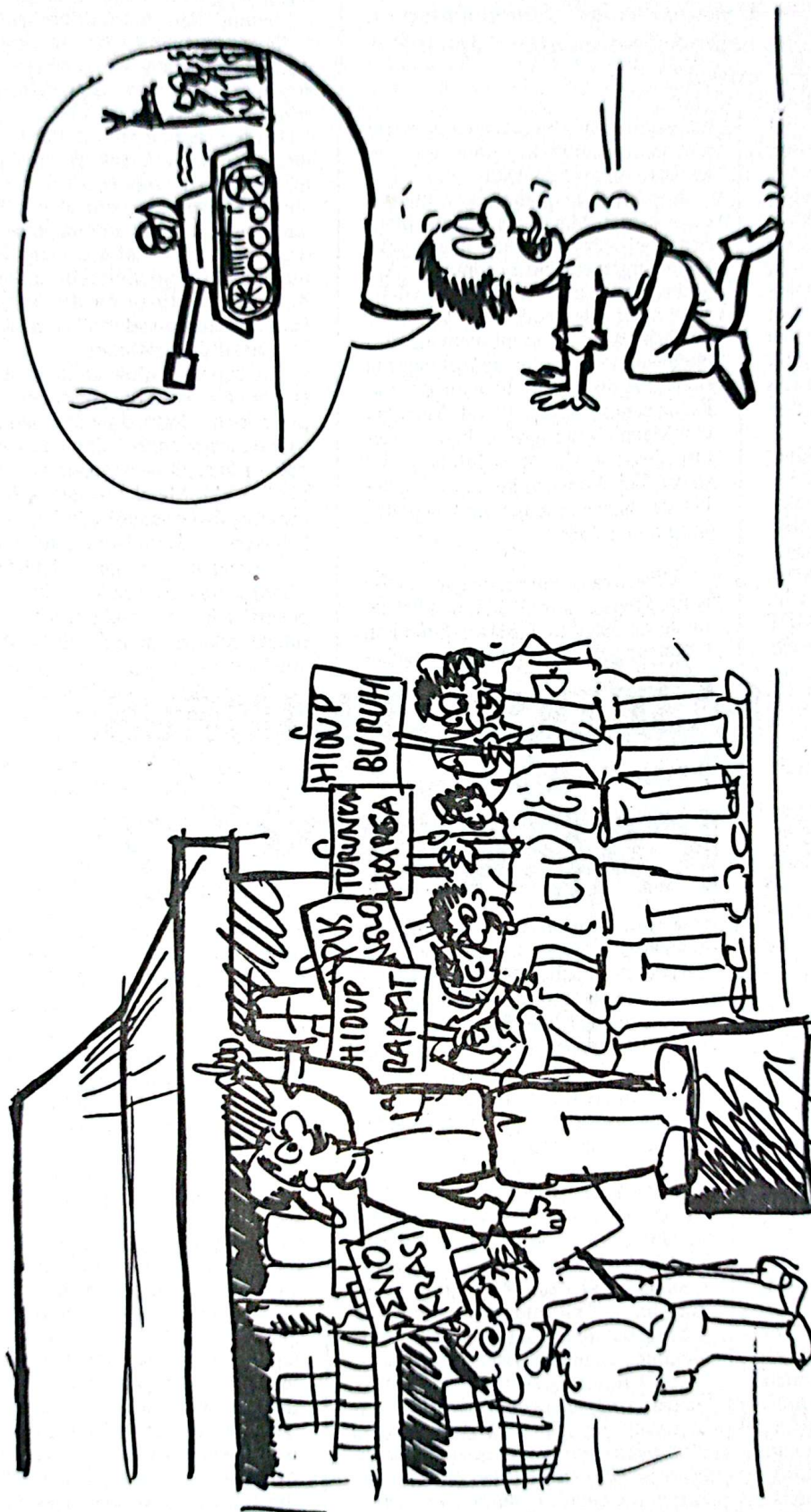
HIDUP BURUH
TURUNKAN HARGA
HIDUP RAKYAT
DEMOKRASI
50 TAHUN (LAGI) INDONESIA MERDEKA
Fajar '95

Tidak optimalnya fungsi yang dijalankan oleh organisasi intra membuat gejala pragmatisme semakin menjadi. Mampukah organisasi ekstra menjadi alternatif penyaluran aspirasi politis mahasiswa?

ORGANISASI EKSTRA KAMPUS:

APA KABARNYA?

Suara mahasiswa boleh dikata bisu sejak lahir kebijakan Pangkopkamtib. Melalui SK 02 Kopkam/1978 yang membekukan Dewan Mahasiswa, yang disusul Keputusan Mendikbud No. 0156/U/1978 mengenai NKK, memperjelas represi organisasi mahasiswa dari kampus. Mahasiswa yang kehilangan organisasinya, kemudian memilih mundur. Ada yang sibuk kuliah, cepat lulus,dan segera bekerja atau menjadi hedonis. Kampus pun senyap kini.

Tahun 1990 lahir SK Mendikbud No. 0457/1990 , yang menandai kemunculan kembali mahasiswa tingkat universitas, yang kini dikenal SMPT. Awalnya, SK ini seperti angin segar baru bagi aktivitas mahasiswa di kampus. Tapi ternyata tidak berbeda. Karena secara struktural, SMPT berada dalam posisi sub-ordinat. Sebergantung pada birokrasi kampus. Ini mempunyai implikasi serius terhadap kegiatan organisasi ekstra.

Keadaaan kemudian berwujud *vicious-circle*. Mana yang duluan, pragmatisme mahasiswa atau merosotnya kiprah organisasi ekstra kampus? Antonius Budi Cahyono, Sekjen PMKRI Yogyakarta, berpendapat " Saya pikir mahasiswa sekarang ini memang dikondisikan sedemikian rupa sehingga ia tidak begitu peduli dengan politik. Kalau sampai begitu, berarti Menpora dan Mendikbud sukses dalam mengebiri Visi dan Orientasi politis mahasiswa. Tepuk tangan buat mereka, akhirnya mahasiswa memilih kegiatan yang non-politik."

Di sisi yang berseberangan , Melki Kura, fungsionaris GMKI, melihat selama ini aksi mahasiswa dijadikan barometer kiprah organisasi kemahasiswaan tanpa memperhatikan kegiatan lainnya. Kalau tidak aksi mahasiswa terdepolitisasi. Hendi Aldriyanto, Ketua Umum HMI cabang Karangkajen, berpendapat "Kita memang tidak bisa mengelak dari pandangan orang bahwa orientasi kita tidak jelas. Tapi itu kan karena mereka tidak terlibat langsung dalam proses dinamika kemahasiswaan secara intens."

Bisa dikatakan bahwa misi NKK/BKK sukses melahirkan mahasiswa yang tekun dalam kuliah. Padahal belum tentu menjadi profesional. Profesional dalam arti tenaga yang siap pakai dengan latar kemampuan maksimum. Mahasiswa menjadi apolitis sekaligus tiak profesional.

Ujungnya mahasiswa yang ingin mengasah wawasan politik terpaksa ke luar kampus. Di organisasi ekstra misalnya. Padahal itu merupakan pilihan yang sama sulitnya karena kalau ada organisasi semodel itu yang ingin melakukan kegiatan politis, selalu dipersulit oleh birokrasi kampus. Padahal birokrasi telah jelas wataknya. Ia represif dan intoleran.

Tidak puas melihat ironi ini, mahasiswa-mahasiswa yang masih mau berpikir kritis serta dinamis lalu bergabung membentuk kelompok-kelompok diskusi atau melebur ke dalam LSM- LSM. Mereka menganggap bahwa visi dan orientasi dari kelompok-kelompok kecil itu lebih terfokus.

Kecenderungan meleburkan diri ke dalam kelompok kecil ini ditanggapi positif oleh Revrisond Baswir. Menurutnya selama ini mahasiswa masih bagai komponen Birokrasi Kampus.

Terusirnya organisasi-organisasi ekstra dari kampus berdampak cukup serius. Mahasiswa jadi asing terhadap organisasi ekstra. Buktinya banyak mahasiswa yang tidak bisa membedakan organisasi ekstra dengan Unit Kegiatan Mahasiswa atau BSO di kampus. Bahkan kepanjangan GMNI, HMI, IMM, PMKRI, PMII atau GMKI,mereka tidak tahu.

Di lain pihak, organisasi-organisasi tersebut yang kini eksis sebagai ekstra, orientasi dan visi politiknya tidak jelas. NKK/BKK dianggap biang keladi semua ini. Yoshua Garibaldi, staf Litbang DPC GMNI Yogyakarta, menyatakan bahwa setelah adanya NKK/BKK, organisasi ekstra tidak lagi bisa melakukan rekrutmen terbuka di kampus, akibatnya mereka kekurangan sumber daya manusia. Revrisond Baswir, pengajar FE-UGM, senada pendapatnya, "Dengan adanya NKK/BKK organisasi intra berubah strukturnya, dari independen menjadi terjebak pada kesan bahwa sumbangan sosial mahasiswa hanya bisa disalurkan pada pola keorganisasian konvensional saja, padahal kalau sesuatu disalurkan secara spesifik, akan lebih efektif dan cukup tinggi implikasi politisnya. Revrisond mengambil contoh organisasi *Green Peace*, yang aksi-aksi lingkungan hidupnya dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam konteks internasional. Sementara untuk persoalan pragmatisme Ari menyarankan untuk memberi semacam *muatan* kepada organisasi kemahasiswaan. Saran ini guna menjawab kebutuhan mahasiswa dengan tetap menjaga idealisme dan kekritisan berpikir. "Selama organisasi mahasiswa hanya bicara masalah politik saja, maka mereka yang kritis terhadap masalah lain di luar politik jadi merasa tidak diperhatikan. Akhirnya mereka mencari kompensasi lain." Hal ini sebenarnya tidak terlalu membuat masalah jika kompensasi mereka masih berhubungan dengan kehidupan

PRAGMATISME MAHASISWA DAN TUNTUTAN PASAR

Dari perdebatan diatas,tak terlepas di dalamnya fenomena bernama pembangunan. Seperti yang diungkapkan Lambang Triyono, staf pengajar Fisipol UGM. "Ada semacam pembatasan sehingga visi politik mahasiswa berkurang, oleh arus besar bernama pembangunan baik dalam arti denotatif, maupun Jargon. Mahasiswa terbawa arus jargon-jargon pembangunan itu. Bayangkan, begitu besarnya arus itu sampai-sampai kesadaran orang bisa hilang."

ORGANISASI EKSTRA KAMPUS: APA KABARNYA?

Tidak optimalnya fungsi yang dijalankan oleh organisasi intra membuat gejala pragmatisme semakin menjadi. Mampukah organisasi ekstra menjadi alternatif penyaluran aspirasi politis mahasiswa?

Suara mahasiswa boleh dikata bisu sejak lahir kebijakan Pangkopkamtib. Melalui SK 02 Kopkam/1978 yang membekukan Dewan Mahasiswa, yang disusul Keputusan Mendikbud No. 0156/U/1978 mengenai NKK, memperjelas represi organisasi mahasiswa dari kampus. Mahasiswa yang kehilangan organisasinya, kemudian memilih mundur. Ada yang sibuk kuliah, cepat lulus,dan segera bekerja atau menjadi hedonis. Kampus pun senyap kini.

Tahun 1990 lahir SK Mendikbud No. 0457/1990 , yang menandai kemunculan kembali mahasiswa tingkat universitas, yang kini dikenal SMPT. Awalnya, SK ini seperti angin segar baru bagi aktivitas mahasiswa di kampus. Tapi ternyata tidak berbeda. Karena secara struktural, SMPT berada dalam posisi sub-ordinat. Sebergantung pada birokrasi kampus. Ini mempunyai implikasi serius terhadap kegiatan organisasi ekstra.

Keadaaan kemudian berwujud *vicious-circle*. Mana yang duluan, pragmatisme mahasiswa atau merosotnya kiprah organisasi ekstra kampus ? Antonius Budi Cahyono, Sekjen PMKRI Yogyakarta, berpendapat " Saya pikir mahasiswa sekarang ini memang dikondisikan sedemikian rupa sehingga ia tidak begitu peduli dengan politik. Kalau sampai begitu, berarti Menpora dan Mendikbud sukses dalam mengebiri Visi dan Orientasi politis mahasiswa. Tepuk tangan buat mereka, akhirnya mahasiswa memilih kegiatan yang non-politik."

Di sisi yang berseberangan , Melki Kura, fungsionaris GMKI, melihat selama ini aksi mahasiswa dijadikan barometer kiprah organisasi kemahasiswaan tanpa memperhatikan kegiatan lainnya. Kalau tidak aksi mahasiswa terdepolitisasi. Hendi Aldriyanto, Ketua Umum HMI cabang Karangkajen, berpendapat "Kita memang tidak bisa mengelak dari pandangan orang bahwa orientasi kita tidak jelas. Tapi itu kan karena mereka tidak terlibat langsung dalam proses dinamika kemahasiswaan secara intens."

Bisa dikatakan bahwa misi NKK/BKK sukses melahirkan mahasiswa yang tekun dalam kuliah. Padahal belum tentu menjadi profesional. Profesional dalam arti tenaga yang siap pakai dengan latar kemampuan maksimum. Mahasiswa menjadi apolitis sekaligus tiak profesional.

Ujungnya mahasiswa yang ingin mengasah wawasan politik terpaksa ke luar kampus. Di organisasi ekstra misalnya. Padahal itu merupakan pilihan yang sama sulitnya karena kalau ada organisasi semodel itu yang ingin melakukan kegiatan politis, selalu dipersulit oleh birokrasi kampus. Padahal birokrasi telah jelas wataknya. Ia represif dan intoleran.

Tidak puas melihat ironi ini, mahasiswa-mahasiswa yang masih mau berpikir kritis serta dinamis lalu bergabung membentuk kelompok-kelompok diskusi atau melebur ke dalam LSM- LSM. Mereka menganggap bahwa visi dan orientasi dari kelompok-kelompok kecil itu lebih terfokus.

Kecenderungan meleburkan diri ke dalam kelompok kecil ini ditanggapi positif oleh Revrisond Baswir. Menurutnya selama ini mahasiswa masih terjebak pada kesan bahwa sumbangan sosial mahasiswa hanya bisa disalurkan pada pola keorganisasian konvensional saja, padahal kalau sesuatu disalurkan secara spesifik, akan lebih efektif dan cukup tinggi implikasi politisnya. Revrisond mengambil contoh organisasi *Green Peace*, yang aksi-aksi lingkungan hidupnya dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam konteks internasional. Sementara untuk persoalan pragmatisme Ari menyarankan untuk memberi semacam *muatan* kepada organisasi kemahasiswaan. Saran ini guna menjawab kebutuhan mahasiswa dengan tetap menjaga idealisme dan kekritisan berpikir. "Selama organisasi mahasiswa hanya bicara masalah politik saja, maka mereka yang kritis terhadap masalah lain di luar politik jadi merasa tidak diperhatikan. Akhirnya mereka mencari kompensasi lain." Hal ini sebenarnya tidak terlalu membuat masalah jika kompensasi mereka masih berhubungan dengan kehidupan

bagai komponen Birokrasi Kampus.

Terusirnya organisasi-organisasi ekstra dari kampus berdampak cukup serius. Mahasiswa jadi asing terhadap organisasi ekstra. Buktinya banyak mahasiswa yang tidak bisa membedakan organisasi ekstra dengan Unit Kegiatan Mahasiswa atau BSO di kampus. Bahkan kepanjangan GMNI, HMI, IMM, PMKRI, PMII atau GMKI,mereka tidak tahu.

Di lain pihak, organisasi-organisasi tersebut yang kini eksis sebagai ekstra, orientasi dan visi politiknya tidak jelas. NKK/BKK dianggap biang keladi semua ini. Yoshua Garibaldi, staf Litbang DPC GMNI Yogyakarta, menyatakan bahwa setelah adanya NKK/BKK, organisasi ekstra tidak lagi bisa melakukan rekrutmen terbuka di kampus, akibatnya mereka kekurangan sumber daya manusia. Revrisond Baswir, pengajar FE-UGM, senada pendapatnya, "Dengan adanya NKK/BKK organisasi intra berubah strukturnya, dari independen menjadi

PRAGMATISME MAHASISWA DAN TUNTUTAN PASAR

Dari perdebatan diatas,tak terlepas di dalamnya fenomena bernama pembangunan. Seperti yang diungkapkan Lambang Triyono, staf pengajar Fisipol UGM. "Ada semacam pembatasan sehingga visi politik mahasiswa berkurang, oleh arus besar bernama pembangunan baik dalam arti denotatif, maupun Jargon. Mahasiswa terbawa arus jargon-jargon pembangunan itu. Bayangkan, begitu besarnya arus itu sampai-sampai kesadaran orang bisa hilang."

kemahasiswaan, tapi jika bergabung dalam suatu kelompok yang tidak jelas maka perlu diberi perhatian lebih dan dicarikan solusinya.

Pendapat yang agak berbeda dikemukakan Riswandha Imawan, pengamat politik sekaligus staf pengajar Fisipol UGM , "Benar bahwa spesialisasi pada satu bidang akan membuat fokus lebih tajam dan lebih terarah, hanya masalahnya organisasi profesional yang bekerja spesifik tidak mampu bekerja sama dengan organisasi ekstra lainnya. Dengan organisasi profesi ini justru bisa semakin menjauhkan interaksinya dengan masyarakat kecuali ada komitmen yang jelas sebelumnya. Apalagi sekarang ini kan orientasi orang macam-macam." Ungkapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut sejauh mana komparasi tingkat diferensiasi orientasi masyarakat dulu dan sekarang.

AROGANSI PRIMORDIALISTIK

Bukan suatu insiden belaka, jika ada semacam dikotomi antara organisasi intra dengan ekstra. Masih adanya kesan *mendua* dalam berorganisasi, di satu pihak ingin memulai pola keorganisasian baru tapi di lain pihak mereka masih belum bisa melepaskan diri dari romantisme keberhasilan pola klasik (sebelum NKK/BKK). Sementara itu penyebab utama melemahnya peranan organisasi ekstra di dalam kampus adalah karena mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru, ditambah lagi keinginan untuk menolak struktur organisasi intra (*baca: SMPT, red.*) di kampus masih tetap kuat sampai sekarang. "Kesan dikotomis itu tidak perlu ada, jika tiap kelompok punya kesempatan yang sama, tapi itu perlu lingkungan yang mendukung," kata Hendi. Yang diperlukan adalah mengembalikan kehidupan intra kampus yang demokratis seperti dulu yang bisa mewadahi seluruh aspirasi mahasiswa. Ari mengaffirmasi pendapat ini, "Dari dulu yang namanya organisasi intra itu hidup karena adanya organisasi ekstra. Menurut saya pribadi, memang idealnya mereka yang akan duduk di intra digodok dulu di ekstra."

Seperti organisasi otonom lainnya, hambatan utama yang dihadapi organisasi ekstra kampus adalah permasalahan dana dan birokrasi pemerintah. Tapi ada satu hambatan lain yang tidak kalah penting, yaitu masalah ideologi. Bukanlah suatu hal yang asing jika hampir semua organisasi ekstra kampus mengandalkan ideologi untuk mencari basis massa, dan mereka masih tetap mengibarkan bendera-bendera primordial dengan tegaknya meskipun dalam konteks sekarang dianggap tidak relevan lagi. Seperti yang dikatakan oleh Revrisond, "Dari namanya saja sudah kelihatan mereka itu primordial semua. Apa masih relevan disaat pemerintah sendiri mengundang liberalisasi seratus persen? Jadi situasi nasional tidak bisa menolong. Kalau seperti ini dipertahankan terus bisa- bisa organisasi ekstra yang berorientasi ideologi keagamaan nantinya jadi yayasan. " Tapi pernyataan Revrisond ini disangkal oleh Marwan Ja'far, mahasiswa Hukum UII yang ketua PMII cabang Yogyakarta "Tidak apa-apa, selama kita tidak terjebak pada fanatisme yang berlebihan. Persoalannya bagaimana kita memberikan wawasan agar menghargai sesama. Jangan sampai karena adanya fanatisme bendera akhirnya secara internal bentrok. Ini harus kita hilangkan." Ucapan Marwan ini didukung oleh Hendi yang beranggapan bahwa ideologi masih diperlukan sebagai sebuah bentuk keberpihakan selama tidak terlalu fanatik dan memperhatikan nilai-nilai universal dalam proses pembinaan kader. Lambang Triyono melontarkan pendapatnya dari sudut pandang yang berbeda. "Ideologi agama itu penting sekali. Kekuatan yang paling besar untuk meng-*counter* dan menyaring modernisasi adalah agama." Padahal kegiatan yang mengatasnamakan agama sebagai landasan hampir selalu mendapatkan tentangan dari pemerintah dengan alasan tidak etis dan bisa memancing isu SARA. Meskipun pemerintah sendiri tidak konsisten karena sering menggunakan agama untuk *mengadu domba* kelompok-kelompok primordial yang ada.

KALAU SAMPAI BEGITU, BERARTI MENPORA DAN MENDIKBUD SUKSES DALAM MENGEBIRI VISI DAN ORIENTASI POLITIS MAHASISWA. TEPUK TANGAN BUAT MEREKA

Konsep kelembagaan yang belum mapan dan format yang tidak jelas menyulitkan pencairan separatisme tersebut. Seandainya saja ada dialog antar kelompok yang berbeda persepsi, itu akan memudahkan penyatuan pandangan dan tercipta lembaga yang representatif bagi seluruh kalangan. Seperti yang dipaparkan Ari, "Yang namanya dialog antar organisasi ekstra sekarang ini jarang dilakukan. Hanya sebatas jika muncul isu-isu tertentu. Sementara dalam beberapa hal mereka terpisah meskipun tidak terlalu tampak. Karena itu persoalan yang timbul lebih karena kurangnya komunikasi antarorganisasi." Sayang sekali ego dari organisasi ekstra yang primordialis masih terlalu besar sehingga cenderung ke arah arogansi yang malah menimbulkan keengganan untuk membuka dialog dengan kelompok lainnya.

Apapun alasannya, yang jelas sampai saat ini organisasi ekstra masih dalam posisi mencari format yang terbaik. Dan jika mereka mau bertahan mereka harus menyelesaikan pekerjaan rumah: mempertajam orientasi. Sebab jika tidak, maka akan terhadang banyak masalah. Apalagi dengan adanya kecenderungan pluralisme yang melanda masyarakat kita.

"Perlu atau tidaknya kegiatan atau organisasi ekstra tergantung pada mereka sendiri. Maunya apa. Kalau mereka punya visi yang jelas, saya kira tetap relevan. Mereka akan tetap punya pengikut meskipun tidak massal lagi seperti dulu." ucap Revrisond. Yoshua juga memberikan alternatif solusi permasalahan organisasi ekstra. "Saya kira kalau ada itikad baik dan kesadaran bahwa organisasi ekstra adalah sel-sel yang produktif, lalu diberi atmosfir untuk hidup, maka yang dibilang *mati* itu akan hidup lagi. Jadi jangan yang sudah *sekarat* malah *dibunuh* sekalian."

Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana menciptakan kondisi dan lingkungan yang mendukung. Sehingga organisasi ekstra kampus kembali ke fungsinya semula, sebagai organisasi penghasil kader-kader aktivis yang berkualitas, skill teknis operasional maupun konseptual. Dan bukan menjadikannya hanya sekedar sebagai badan koordinasi yang gampang diperalat.

Agung Yudhawiranata
Laporan : Evi, Linda, Iwan

PSEUDO-DEMOKRASI di PEMILU FISIPOL

Pemilu Mahasiswa Fisipol agak ricuh, mulai dari "gerakan pintu belakang" Panlaklihtas, sampai panitia pemilu versi HMJ yang dituding patrimonis. Namun perdebatan yang ramai ini tetap gagal mendongkrak suara yang masuk. Lembaga mahasiswa kian tak laku, perlu alternatif?

Pemilihan Umum atau *general election* adalah salah satu parameter demokrasi terpenting. Dalam Pemilu setiap individu punya hak dan kesempatan sama, tanpa kecuali, untuk menentukan pilihannya sendiri. Pilihan ini meski berbeda akan tetap dihargai Itu sebabnya Pemilu kerap pula disebut "pesta demokrasi".

Tapi ada satu pertanyaan, dengan tanda tanya besar, yang muncul ketika Pemilu di Fisipol 1 Mei 1995 lalu berakhir. "Apakah ketika satu sistem kekuasaan --dalam skala kecil maupun besar, mengadakan Pemilu, lantas sistem itu jadi demokratis?" Nanti dulu. Karena sebetulnya masih banyak hal-hal substansial yang harus dipenuhi untuk menjadikan pemilu benar-benar mengindikasikan suatu sistem yang demokratis. Pemilu yang hanya direspon oleh sedikit warganya --apalagi kalau warganya tersebut kesadaran politiknya masih rendah, sulit untuk dikatakan demokratis. Lalu, bagaimana pemilu di Fisipol?

KERICUHAN DI BALIK PEMILU FISIPOL 1995

Sekitar satu bulan sebelum pemilu dilaksanakan, Panlaklihtas UGM sudah gencar memasang spanduk-spanduk yang 'menggelitik'. Tapi di Fisipol keadaannya terbalik. Pemicunya adalah SM dan BEM Fisipol tidak mau 'manut' dengan ketentuan pusat, berhubung beberapa fungsionaris SM dan BEM Fisipol menganggap SMPT pusat inkonstitusional. Maka ketika spanduk-spanduk mulai bertebaran di seantero kampus UGM, Fisipol masih tenang-tenang saja, tidak ada secuil pun pengumuman tentang pemilu.

Melihat kenyataan ini, beberapa HMJ 'berinisiatif' membuat panitia pemilu, yang diketuai oleh Dendi Susianto, Komunikasi'92. Dendi, ketika dikonfirmasi oleh SINTESA, membenarkan adanya panitia ini, "Dulu memang ada semacam panitia tandingan, jadi teman-teman HMJ berkumpul karena menerima stimulus politik, semacam isu-lah bahwa SM-BEM Fisipol tidak akan mengadakan Pemilu. Akhirnya kami memutuskan untuk membentuk panitia, semacam membantu BEM".

Dan pada tanggal 15 April 1995, HMJ dan BSO (Badan Semi Otonom) di Fisipol diundang oleh PD III untuk membicarakan masalah panitia Pemilu. BEM yang kebetulan tahu masalah undangan ini merasa dilangkahi, dan pihak BEM segera menyerahkan proposal serta meminta kejelasan dari PD III dan panitia 'tandingan' --yang rupanya sudah mempersiapkan stempel dan poster-poster Pemilu.

"Jika memang mau bantu, seharusnya bilang dulu pada BEM, tapi ini malah inisiatif jalan sendiri", David Yudhasaputra (ketua BEM periode 1994-1995) menanggapi. Senada dengan David, Archam Effendi (Sekum BEM 94/95) menambahkan, "Panitia tersebut tidak resmi, karena bukan dari BEM seperti tercantum di SK Rektor, meskipun didukung PD III".

Akhirnya setelah melalui perdebatan-perdebatan sengit, tercapai kompromi maksimal antara BEM dengan PD III, Pemilu diadakan tanggal 1 Mei --serentak dengan pusat, sedangkan panitia yang resmi segera dibentuk, dengan Bowo sebagai ketua dan Dendi wakilnya. Namun kemudian, Dendi mengundurkan diri dari jabatan

Titok Hariyanto:
"MUNGKIN SAYA TERKESAN DEMOKRAT.."

Independensi organisasi adalah mutlak. Selama mahasiswa berada dalam cengkeraman birokrasi, baik itu birokrasi kampus maupun birokrasi kenegaraan, sikap kritis yang disampaikan mahasiswa tidak akan pernah didengar. Mahasiswa tidak memiliki *bargaining position* yang kuat terhadap birokrat kampus. Akibatnya, produk dari mahasiswa tidak sesuai dengan yang diharapkan rakyat. Alhasil, mahasiswa kebanyakan pragmatis, tidak peduli pada kondisi di sekelilingnya. Organisasi independen adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan mahasiswa dari posisinya sekarang, karena sudah sewajarnya mahasiswa --sebagai bagian dari *civitas akademika*, dilibatkan sebagai subyek dalam setiap pengambilan keputusan.

Senat Mahasiswa UGM, meskipun mempunyai aturan main yang berbeda dengan SM universitas lain, namun tetap saja SM UGM tidak mengakar ke bawah tapi cenderung menggantung ke atas. Sedangkan DEMA sebagai alternatif organisasi telah dibuktikan --oleh sejarah gerakan mahasiswa, dapat mewadahi aspirasi mahasiswa. Logikanya, struktur organisasi DEMA yang sejajar dengan birokrat kampus membuat mahasiswa memiliki *bargaining position* yang lebih kuat daripada SMPT sekarang ini.

Tapi kondisi riil yang ada saat ini adalah pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana mencapai independensi tersebut. Dan perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. "... *and God loves diversity*". Mungkin dalam poster saya ketika kampanye kemarin, saya terkesan bersikap demokrat. Tapi, sekali lagi, itu berdasar pada kondisi riil yang ada. Tapi untuk bekerja dalam satu organisasi, saya kira perlu ada persamaan visi antara anggota senat. Langkah yang harus diambil, untuk mencegah semakin menajamnya perbedaan tersebut adalah dengan mengadakan forum dialog yang rutin antara mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Karena saya yakin, tujuan yang akan dicapai pun sama. Hanya saja cara yang digunakan berbeda, bahkan ada yang cenderung irrasional. Itu yang harus dikikis.

Maka, mengingat kebutuhan yang mendesak akan suatu organisasi yang independen, independensi organisasi menjadi salah satu program Senat periode ini, meneruskan perjuangan Senat periode-periode yang lalu. Selain masalah independensi organisasi, masalah lain seperti minimnya minat mahasiswa pada bidang penelitian juga kami masukkan sebagai program Senat kali ini. Semua itu akan kami godok dalam pleno Senat Fakultas.

wakil ketua, karena sebagai kandidat senat ia tidak berhak menjadi panitia pemilu.

Terlepas dari perdebatan tersebut, toh suasana Pemilu mulai terasa lewat poster-poster serta biodata para kandidat. Lalu, pada tanggal 27-29 April diadakan kampanye dan debat program para kandidat SM-BEM, yang dihadiri sedikit mahasiswa. Pada hari H, tanggal 1 Mei, suasana kampus lebih semarak, digemuruhi lagu-lagu yang bersumber dari *tape* panitia pemilu. Beberapa mahasiswa tampak berkerumun di sekitar arena Pemilu, sementara beberapa yang lain adem ayem di sekitar kantin, tangga, atau ruang kuliah.

Sore hari, ketika matahari mulai sedikit ramah, perolehan suara mulai dihitung. Beberapa kandidat tampak berwajah tegang, tapi ada juga kandidat yang malah tidak menyaksikan penghitungan suara ini. Dengan dihadiri oleh beberapa mahasiswa, hasil penghitungan disahkan. Hasannudin,mahasiswa IP'92 resmi menjadi Ketua Senat Fisipol periode 1995-1996, sementara dari 4 kandidat BEM tiga diantaranya resmi menjadi dewan formatur, yaitu Edward Nico (Str'92), Dwi Pratomo (IP'92) dan Adyawarman (HI'93).

CATATAN ATAU CACATAN PEMILU FISIPOL

Banyak cacat yang perlu dicatat pada Pemilu'95 ini. Diantaranya penurunan jumlah pemilih, dari 28,9% tahun lalu, menjadi 16,6 % tahun ini (Sumber: Balding, edisi II, th 1995). Ironisnya, tahun ajaran ini jumlah mahasiswa Fisipol ditambah pasukan D3 Komunikasi, yang jumlahnya lebih dari 300 orang. Lebih jauh adalah soal intervensi PD III terhadap Pemilu yang notabene adalah kepentingan mahasiswa, maka seharusnya menjadi urusan mahasiswa.

Menurut Ari Dwipayana --staff pengajar di jurusan IP, Fisipol UGM, penurunan jumlah pemilih yang drastis, menunjukkan kebanyakkan mahasiswa tidak menganggap Senat sebagai organisasi milik mereka. Sedang masalah intervensi PD III dipandang sebagai kemunduran nilai politis mahasiswa, "Jadi itu sebenarnya kemunduran meski tetap harus dipahami, secara struktural ini keharusan bagi PD III sebagai penerus perintah PR III agar Pemilu dilaksanakan dengan sukses".

PATRIMONIALISME PANTAS DIKECAM, APALAGI KAMPUS KITA SERING MENDENGUNGKAN DEMOKRASI DAN INDEPENDENSI

Menyoroti masalah patrimonialisme --dalam konteks hubungan PD III dengan panitia tandingan, ia sangat mengecam hal tersebut. Apalagi kampus kita sering mendengung-dengungkan demokrasi dan independensi. "Salah satu indikasi kedewasaan mahasiswa kan kemampuan dia untuk mengurusi apa yang jadi haknya, dan Pemilu kan kepentingan mahasiswa. Jadi kalau ada patrimonialisme sangat tidak bagus"

Solusi yang ia tawarkan untuk mengatrol jumlah pemilih adalah membuka dialog antara pihak rektorat dengan mahasiswa, terutama disini ditekankan soal DEMA yang oleh rektorat seolah-olah dianggap selesai dengan melantik kepengurusan SMPT yang baru. Dengan harapan setelah terjadi dialog, bentuk organisasi dirubah menjadi lebih demokratis dan bebas intervensi serta menyalurkan aspirasi, dengan asumsi bahwa selama ini tiga hal tersebut tidak dirasakan mahasiswa. Kalau ini sudah terwujud, otomatis mahasiswa akan merasa memiliki organisasi tersebut, apapun istilahnya, DEMA atau apapun.

Hal lain yang cukup menarik adalah, kalau kita cermati, para kandidat yang mendapat suara banyak, adalah para kandidat yang menyatakan dirinya --implisit maupun eksplisit, setuju patrimonialisme. Padahal sikap itu tertuang dalam daftar pertanyaan untuk para kandidat yang diajukan panitia, dan jelas-jelas tertempel untuk dibaca publik, dalam jangka waktu yang cukup lama pula. Maka rasanya tidak berlebihan jika muncul rasa prihatin. Apa iya mahasiswa-mahasiswi Fisipol setuju patrimonialisme? Dan kalau menunjuk pada pendapat Ari Dwipayana, maka mahasiswa-mahasiswi Fisipol tidak dewasa dalam berpolitik, terus-terusan minta digendong. Lantas, kapan kita bisa dewasa?

Evi dan Linda
Reportase: Agung, Iwan

Laila Damayanti:
"SAYA TAWARKAN SM ALTERNATIF"

Sebenarnya apa sih independensi itu? Manusia sebagai homo socius, tidak ada satu pun yang memiliki independensi mutlak, begitu juga dengan organisasi. Semua organisasi, baik yang independen maupun *onderbouw* selalu mendapat intervensi dari luar. Hanya saja sejauh mana tingkat intervensi tersebut masih dapat ditoleransi.

Dalam konteks lembaga mahasiswa, semestinya keterlibatan birokrat kampus cukup pada tingkat konsultatif saja.

SMPT, ketika muncul adalah sebuah harapan, harapan untuk mengembalikan sebuah wadah organisasi yang independen. Tetapi kalau kita lihat struktur lembaga yang sekarang --sebagai struktur yang mati itu, intervensi harus diminimalisir. Dalam hal ini, peranan aktor-aktor senat --yang cukup fleksibel posisinya, sangat diharapkan.

Sedangkan DEMA, kalau dilihat secara global mungkin bisa saya kategorikan sebagai sebuah 'kegenitan intelektual' kaum muda untuk menembus kejenuhan. Tapi yang saya sesalkan, kenapa DEMA muncul dengan cacat sejarah, mengingat DEMA keluar dari kongres IV lanjutan. Akibatnya, ada kesan bahwa DEMA adalah kelompok frustasi yang gagal bermain dalam sistem politik yang ada.

Untuk menjembatani perbedaan antara DEMA dan SMPT, maka saya menawarkan konsep SM Alternatif, dengan penekanan pada 3 konsep. Pertama, tentang kontekstualisasi lembaga kemahasiswaan. Maksudnya adalah bagaimana agar lembaga kemahasiswaan semakin tepat dan sinkron dengan kondisi dan kebutuhan mahasiswa. Kita tentu tidak bisa memboyong konsep DEMA tahun 70-an untuk SMPT tahun 90-an.

Kedua, internalisasi lembaga kemahasiswaan. Saya pikir mahasiswa perlu disadarkan tentang pentingnya lembaga kemahasiswaan. Karena tanpa kesadaran mahasiswa, lembaga yang sudah independen sekalipun, tetap tidak diminati mahasiswa.

Konsep yang terakhir adalah independensi. Disini SM Alternatif menggabungkan bentuk SMPT dengan ruh DEMA yang independen, yang mana tingkat intervensi terhadap pola pikir dan *decision making* ditekan seminimal mungkin. Memang, ketika kita bicara soal lembaga kemahasiswaan, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Dan ini menjadi tugas kita!

SEBUAH ALASAN, untuk GERAKAN

Presidium DEMA ,Arie Sujito

Jika kita catat beban penderitaan mahasiswa, diawali dengan Pembekuan dan pemberangusan Organisasi Dewan Mahasiswa oleh KOPKAMTIB sejak 1978. Praktis kepahitan ini dialami sebagai potret awal kesuraman gerakan mahasiswa. Kemudian, sejak saat itu regulasi demi regulasi terus meluncur yang kesemuanya dalam substansi yang sama, yakni strategi negara untuk serta-merta mengendalikan gerakan politik mahasiswa. Lahirnya Konsepsi NKK/BKK dengan induk *Man of analysis* dari Daoed Yoesoef lahir yang, dalam prakteknya menimbulkan **distorsi politis**, memformat kampus menjadi ajang sirkus. Regulasi ini dijadikan paket politik landasan awal embrio kebijakan depolitisasi kampus. Strategi negara ini ternyata dimaksudkan melakukan efektifitas hierarkis kekuasaan dengan mengendalikan aktifitas mahasiswa. Orga-nisasi mahasiswa infra fakultas dibawah kendali, pe- ngarahan dan pembiayaan universitas. Terlebih, kebijakan ini melarang mahasiswa untuk terlibat dalam proses politik.

Keseluruhannya secara langsung dan tidak membatasi gerak organisasi mahasiswa keideologian di kampus. Menggeser orientasi kampus, dari mencetak generasi cerdas ber-komitmen kepentingan masyarakat menjadi kampus sebagai pabrik robot, dan memproduksi mahasiswa sebagai melulu sebagai pengisi birokrasi dan teknostruktur. Disadari, organisasi formal sebagai instrumen efektif dalam menggugah kesadaran mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat praktis kehilangan roh, dan hanyalah menjadi penjara aktivis karena kedaulatannya telah direbut negara.

Belakangan, diawal 90-an, negara menghadiahkan regulasi baru dalam substansi depolitisasi dengan wajah sistematis adalah lembaga SMPT. Kelahiran lembaga boneka negara via SK Mendikbud No. 0457/U/1990, dikenal dengan SK banci regulasi yang sempat membius masyarakat mahasiswa ini, adalah elemen grand strategi kekuasaan yang diciptakan negara dengan menjinakkan mahasiswa seraya mencerabut mahasiswa dari akar sosialnya.

Jika ditelusuri secara cermat, SMPT adalah NKK/BKK yang berubah muka, yang secara substansi mengunci daya kritis dan kebebasan mahasiswa secara sistematis dalam proses dan pembelajaran politik. Manifestasi kontrol yang ketat dengan budaya petunjuk lewat birokrasi kampus pada tingkat administratif-politis menempatkan SMPT sebagai lembaga *akar jenggot*, akarnya tergantung keatas dan tidak tertanam di benak mahasiswa. Adalah praktek penyemaian feodalisme politik. Lebih jauh, SK banci inipun sesungguhnya formulasi konstruk *fragmentasi*: memberikan sekat antara Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), menyembul dalam polarisasi ideologis dan pilihan afiliasi, serta visi yang berbeda, yang kadangkala memproduksi sikap- sikap dan pilihan politik yang cenderung bertentangan. Barangkali politik (*devide et impera*?) via lembaga kemahasiswaan ini adalah salah satu keberhasilan Orde Baru dalam menjerat mahasiswa untuk tidak bergelut dengan dunia sosialnya. Fakta struktural inilah penyebab tuduhan bertubi- tubi banyak kalangan akan hilangnya peran mahasiswa dalam percaturan politik dipertengahan era Orde Baru.

Namun satu hal yang perlu dicatat, ditengah kondisi penjajahan struktural yang dialami mahasiswa pada dekade 90- an sesungguhnya telah terjadi perlawanan-perlawanan mahasiswa. Negara tidak bisa menutup mata atas kenyataan obyektif tuntutan banyak mahasiswa. Gagasan membentuk *student go-vernment*, memposisikan organisasi sebagai alat perjuangan kepentingan mahasiswa adalah tuntutan yang mendesak saat ini bagi mahasiswa. Dewan Mahasiswa (DEMA-UGM) organisasi mahasiswa independen yang berbasis massa mahasiswa (*students grassroot*) yang dideklarasikan sebagai paket akhir tahun 1994 yang baru lalu tentunya memberi wacana baru ditengah *discourse* format lembaga kemahasiswaan sebagai kata kunci perdebatan gerakan mahasiswa. Adalah ujian konsistensi pemerintah ditengah hembusan keterbukaan dan demokratisasi, untuk menatap arif tuntutan hak politik mahasiswa. Mengingat perjuangan senantiasa dihadang bongkahan-bongkahan kekuasaan, bergerak menyatukan persepsi, merajut gerakan menghadapi tantangan adalah agenda krusial dalam memperjuangkan demokrasi.**

MENDULANG EMAS BERBUAH CEMAS

Perayaan kemerdekaan tahun ini, dinisbatkan sebagai tahun emas. Maksud hati setelah 50 tahun cuma tinta emaslah yang tertoreh dalam sejarah. Apakah demikian dalam kenyataan ? Ternyata tidak! Kenyataan tidak selalu tampil seindah yang dikesankan.

Demikianlah, mencermati bagaimana prilaku sebuah bangsa merayakan kemerdekaannya di tengah banyak "PR" fundamental yang belum rampung. Untuk itu SINTESA edisi kali ini sengaja menyisir kontradiksi-kontradiksi makna kemerdekaan pada ranah konsep maupun realitas. Dengan kesadaran ganda, ada dialektika antara apa yang seadanya dengan apa yang seharusnya. Sebuah dialektika yang mesti dipecahkan.

Sebagai bahan refleksi, Romo Mangunwijaya, Ariel Heryanto, Arbi Sanit dan Sritua Arief, memberi catatan-catatan kaki yang cukup kritis bagi republik setengah abad. Ditambah hasil diskusi dengan Revrisond Baswir, Faruk HT, Djudjur dan Mulyadi J.Amalik. Di penghujung, Mimbar Utama Budi Irawanto menulis kolom untuk semakin melengkapi kecemasan dalam merdeka.

Meretakkan apa yang sudah telanjur diimani menjadi konsekuensi sebuah refleksi. Kritik menjadi diperlukan biar realitas tampil lebih utuh. Agar, -- maksud hati mendulang emas, apa daya berbuah cemas-- bisa berlalu. Dan, kita bukan lagi bangsa yang sedang menunggu.

MENY

KE(C)E

Setelah L

50 **INDONESIA ULANG TAHUN.** Akhirnya sampai jugalah kemerdekaan kita ke usia setengah abad. Dibanding dengan usia negara-negara industri maju, mungkin kita masih belum apa-apa, tapi bagaimana pun 50 tahun itu istimewa. Angka 50 ini sendiri diperoleh dari tanggal proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Bagi Belanda sendiri, sebagai mantan penjajah, kemerdekaan *de jure* Indonesia baru sah lewat Konferensi Meja Bundar 29 Desember 1949. Baru awal Juli lalu PM Belanda, Wim Kok menyatakan bahwa *de facto* Indonesia sudah merdeka sejak 1945. Tapi apa peduli kita dengan pengakuan Belanda? Dan itulah yang dilakukan oleh Soeharto, maka dengan penuh semangat, tanggal 5 Juli 1995 pesta perayaan ulang tahun kemerdekaan kali ini dilabeli gagah: Indonesia Emas.

Peringatan kemerdekaan ke 50 ini dipestakan khusus dan dinamai Indonesia Emas. Kian dekat dengan liberalisme tapi tak menjanjikan perubahan politik. Tapi dibalik kemilau pesta, telah mengintai beberapa perangkap ekonomi.

REPRO TEMPO

"Kita bayar hutang dengan menjual asset BUMN."

Lewat nama yang bombastis ini hendak diiklankan ke segenap penjuru bahwa bangsa kita sedang berbahagia luar biasa karena pembangunan berhasil dan lancar, sehingga masyarakat adil dan makmur kini semakin dekat. Ingat bahwa Pelita VI ini merupakan *entry point* bagi tahap tinggal landas (*take off*) bagi Pembangunan Jangka Panjang II. Tampaknya pesta pengiklanan ini digarap serius, sampai perlu membentuk panitia nasional untuk mengkoordinirnya. Doktor Emil Salim yang ditunjuk sebagai ketua mengatakan, pesta ini adalah wujud syukur kita dan jika mungkin kemeriahan pesta ini bisa menyamai lebaran.

Bersyukur memalui pesta lebaran siapa tak suka? Maka dengan segala senang hati, semua fihak seolah berlomba menyambut dan memanfaatkan momentum ini, dengan cara dan tujuan masing-masing. Mulai mulai dari acara tujuhbelasan tingkat RT/RW sampai pameran Internasional Hannover dan PPI, dari yang serius seperti konferensi internasional sampai lawak di TV, dari acara yang romantis-tradisional seperti Arung Samudera, Pentas Dalang 50 hari non-stop sampai pentas "Merah-Putih" di RCTI, semua mengaku diilhami oleh semangat 50 Tahun Indonesia Merdeka sambil memasang logo Indonesia Emasnya. Lepas dari relevan tidaknya, yang jelas hampir tak ada acara yang lolos dari sergapan iklan (ingat iklan Indomie!). Tampaknya pesta nasional ini memang akan meriah sekali, cukup meriah untuk meninabobokan dari dasarnya: sebenarnya seberapa jauh keberhasilan pembangunan kita?

"KELUARGA" INDONESIA

Slogan Indonesia Emas sendiri, sangat mungkin diilhami oleh istilah pesta emas, yaitu sebutan untuk pesta ulang tahun perkawinan yang ke 50. Keluarga? Ya memang analogi kalau bangsa ini mirip satu keluarga, dimana para pemimpin adalah orang tua, dan rakyat adalah anak-anaknya yang harus dibimbing oleh orang tua.

Simbolisasi negara sebagai keluarga mungkin mengiringi mencuatnya figur Soekarno. Semula tak banyak dipermasalahkan, sebagai negara muda yang masih gamang, Indonesia memang membutuhkan figur pemersatu, apa pun harganya. Di tangan Soekarno yang flamboyan, Indonesia segera merebut perhatian dunia karena tampil ofensif. Bayangkan saja di saat kebanyakan dunia ketiga berlomba merayu Amerika agar dikucuri hutang, Soekarno dengan garang menasionalisir perusahaan asing sambil berteriak: *Go to hell with your aid!* Bahkan Soekarno kemudian menggalang negara-negara berkembang membentuk NEFO (*New emerging forces*) yang dilawankan dengan negara-negara mapan yang dijulukinya OLDEFO.

Sayangnya keterkenalan Indonesia ini tidak diimbangi dengan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam negeri. Wajar bila kemudian Soekarno mulai dihujani kritik, gaya kharismatis "Bapak Bangsa"nya memang menawan tapi sekaligus menyembunyikan *maldevelopment*, korupsi yang sangat parah, dan telah mengurbankan rakyat menjadi melulu sebagai pelengkap penderita. Tapi hujan kritik itu belum cukup untuk menumbangkan Soekarno karena seperti kata almarhum Soe Hok Gie, meski membawa kebangkrutan tapi Soekarno telah memberi sesuatu yang sangat kita butuhkan ketika itu: **harga diri!**

NGSONG MASAN

puluh Tahun

Dilevel atas sendiri Soekarno terus bertahan berkat akrobat politik: "TNI dan PKI"nya. Baru setelah ekonomi betul-betul bangkrut, 1965-66 inflasi saja mencapai *triple digit*, sekitar 600%, ditambah pecahnya tragedi G 30 S 1965 (*Baca lapsus edisi ini*) dukungan rakyat merosot drastis. Dengan dukungan militer, rakyat yang frustrasi berdemonstrasi besar-besaran. Setelah sekian lama ditekan demonstrasi, akhirnya sang Pemimpin Besar Revolusi bersedia juga menandatangani dokumen penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. Dengan dokumen yang terkenal dengan nama supersemar ini Soekarno, Bapak bangsa turun panggung, dan dimulailah era baru: Orde Baru.

ORDE BARU: MENUKAR BAPAK

Segera setelah naik panggung, orde baru (orba) memenuhi janjinya: pembangunan ekonomi. Terlebih dahulu Orba mendekati Bank Dunia agar mau menjadwal kembali pembayaran utang lama dan bisa memperoleh hutang baru. Sebagai imbalannya Indonesia bersedia membuka kembali pintu ekonominya terhadap penetrasi modal asing. Dengan *iming-iming* kekayaan alam, Indonesia juga bisa membujuk beberapa negara kaya untuk membentuk konsorsium negara kreditor bagi pembangunan Indonesia (IGGI). Prestasi Orde Baru ini "bertambah" ketika ditahun 1974 harga minyak dunia naik, sebagai eksportir minyak, Indonesia bak mendapat durian runtuh.

Sambil terus berupaya merengkuh kembali kepercayaan dunia internasional dan rakyat, Orba juga terus memperkuat diri. ABRI misalnya dengan segera memperkenalkan doktrin dwi-fungsinya. Lewat doktrin ini, militer jadi institusi "super", karena selain bergerak dibidang keamanan, yang memang kompetensinya, kini juga bisa keluar barak menjarah kehidupan sosial politik, wilayah sosial yang sebelumnya eksklusif dihuni sipil. Birokrasi yang harusnya apolitis kini dibebani keharusan memenangkan parpol flat merah, Golongan Karya dalam Pemilu. Untuk tujuan itu setelah memangkas partai politik dari sepuluh jadi tiga, interaksi dengan massa pendukungnya pun dibabat habis lewat pemberlakuan asas massa apung (*floating mass*). Di fihak lain Golkar, dengan meminjam tangan-tangan birokrasi dan kawalan militer, bisa dengan enaknya mencaplok suara rakyat sampai jauh ke pelosok desa. Belum cukup dengan itu, parpol yang berhasil mencuri perhatian massa harus rela jadi bulan-bulanan birokrasi, misalnya kemelut PDI Jawa Timur tak berkesudahan.

> **"..kombinasi hutang dan efisiensi inilah yang mendongkrak indikator ekonomi lainnya.."**

Kemalangan parpol ternyata juga melanda organisasi kemasyarakatan (ormas). Secara ideologis mereka dipaksa untuk menerima Pancasila dan secara struktural negara hanya sudi melihat mereka dalam wadah-wadah tunggal: SPSI ya dan bukan SBSI, hanya MUI, HKTI, KNPI, PWI, SMPT dan OSIS, tidak lainnya. Yang mencoba membandel, lihat dulu nasib mahasiswa yang harus kehilangan Dewan Mahasiswa dan beberapa media massa yang terbreidel. Mulai dari yang besar seperti *Mahasiswa Indonesia, Indonesia Raya, Pedoman, Sinar Harapan, Prioritas, Monitor*, trio *TEMPO, Editor* dan *Detik* sampai yang terbatas seperti pers mahasiswa semua berkalang tanah jadi tumbal Orde Baru. Sementara Untuk yang masih hidup dipagari ketat dengan lembaga SIUPP. Akibatnya tiada lain: semua tiarap.

Sesungguhnya perlawanan belumlah mati, stagnasi dibidang organisasi, malah menstimulir *feedback* yang sangat keras. Beberapa pergolakan fisik, seperti peristiwa 15 Januari 1974, Demonstrasi Mahasiswa 1978, atau peristiwa Tandjung Priok sampai kasus Santa Cruz, Dilli 12 November 1991, atau kian gencarnya pemogokan buruh. Namun dengan pengorganisasian yang lemah, gerakan-gerakan tersebut gagal mengembang jadi gugatan berskala nasional.

Kecuali soal pertumbuhan, substansi politis Orde Baru sebenarnya tidak banyak berbeda dengan Orde Lama. Menurut Soerjadi, ketua F-PDI, Orde Baru tinggal membangun karena banyak hal yang berkaitan dengan integrasi politik telah diselesaikan oleh Bung Karno, mulai dari Proklamasi, Pancasila dan UUD sampai memadamkan separatisme. Secara implisit Soerjadi tampak tidak mempermasalahkan otoriterisme yang diwariskan oleh Orde Lama, satu hal yang sangat disayangkan. Menyoroti otoriterisme Arbi Sanit, dosen Fisip UI berkomentar, selama ini para petinggi kita terlalu condong pada kedaulatan negara dan kurang peduli pada otonomi individu dan kelompok, jadinya otoriter. Sebagai jalan keluarnya Arbi Sanit menawarkan untuk kembali ke konsep murni pemisahan kekuasaan a la trias politika. Soal hambatan konstitusional, dia bilang "bisa di siasati lewat amandemen atau kalau perlu ganti saja konstitusinya."

PRESTASI DAN FRUSTRASI ORDE BARU

Setelah 25 tahun lebih berdiri, Orba memang berhasil menjaga pertumbuhan di kisaran angka 5-7% per tahun. Jumlah orang miskin absolut juga berhasil ditekan jadi sekitar 15%

(26 juta) pada tahun 1993 dari 40% (54 juta) tahun 1976. Tahun ini juga BPS mengumumkan bahwa menurut PDB mutakhir --indikator yang banyak dikritik karena sangat menyederhanakan pemerataan, kini ekonomi Indonesia naik kelas dengan pendapatan perkapita menengah US$ 884.

Dimata internasional, sebagai lahan bisnis Indonesia masih menjanjikan. Misalnya dalam daftar "*country risk*" (kawasan bisnis berisiko) Indonesia menempati nomor tiga di Asia alias cukup aman. Bagi Bank Dunia Indonesia tetap *good borrower*, alias belum pernah *ngemplang* hutang. Bahkan ada ramalan optimis bila mampu menjaga tingkat pertumbuhannya, tidak lama lagi Indonesia bisa menjajari prestasi empat negara Asia memasuki barisan NIC (*Newly Indutrialized Countries*). Dengan setumpuk bintang jasa inilah, negara kita berani sesumbar bahwa Pelita VI merupakan titik tolak era tinggal landas (*take off*) dan 1995 adalah tahun Indonesia Emas.

Sekarang bagaimana kalau indikator-indikator berikut juga dipaparkan. Misalnya soal hutang, menurut Rostow, yang teori *five stages of growth*-nya jadi referensi utama dalam *blue print* pembangunan negeri ini, untuk *take off*, satu negara tidak boleh punya hutang luar negeri. Padahal hutang luar negeri kita luar biasa bengkaknya, dengan *Yendaka* (apresiasi Yen terhadap Dollar Amerika) dibulan Maret-April 1995 saja, hutang kita segera membumbung melampaui batas angka psikologis, US$ 100 milyard (Rp 220 trilyun). Yang mengherankan dengan beban begini besar kita masih bisa tenang. Dengan apa membayarnya? Baru pada tanggal 14 Juni 1995 lalu, Presiden Soeharto bersedia membocorkan rahasia: cara baru untuk membayar hutang adalah dengan menjual asset BUMN. Jadi tenang saja.

"..dengan enaknya golkar mencaplok suara rakyat jauh dipelosok desa."

Kenapa hutang terus membumbung, padahal kita pernah punya duit minyak? Birokrasi kita *over loaded* dan industrialisasi yang digelar ternyata tak efisien. Seperti dipaparkan di atas, birokrasi kita tidak apolitis tapi berfungsi sebagai pendongkrak suara Golkar. Untuk itu birokrasi perlu *diblow up*. Ini terus terang boros, tapi dengan adanya *oil boom*, bukan masalah. Baru setelah *oil boom* berakhir, mulailah kegemukan birokrasi ini dipersoalkan. Solusinya: mencari pengganti duit minyak, rasionalisasi birokrasi dan mengajak swasta untuk lebih berperan.

Sebagai pengganti devisa minyak, yang kemudian digebuk adalah ekspor produk-produk primer seperti kayu gelondongan, barang tambang non-migas, tekstil dan pakaian jadi. Sampai tahun 1993/1994 lalu kontribusi sektor non- migas terhadap pendapat nasional telah mencapai 75,9%, sementara dari migas tinggal 24,1%. Sayang sekali pengganti minyak ini *value added*nya rendah, karena masih bertumpukan pada buruh murah (*la-*

EKO :

PENYUMBATAN KOMUNIKASI, PENGUBURAN *bagi* PEMERINTAH

DI TAHUN emas ini, komunikasi politik kita masih *macet*. Contohnya satu lagi saluran rakyat untuk berbicara terhempas. Kakanwil Deppen DIY, Hutoyo Hurip, melalui SK bernomor 300/10/K/111/1995 tertanggal 20 Maret 1995, telah melarang radio swasta menyiarkan berita politik. Alasannya, masyarakat masih bodoh, maka jangan diberi berita politik karena bisa memancing keresahan dan mengganggu stabilitas nasional (**Bernas**). Pelarangan yang akhirnya dikenakan pula pada seluruh radio swasta se Jawa tengah ini, merupakan buntut ramalan Permadi SH tentang suksesi tahun 1998 mendatang, yang dilontarkan sewaktu wawancara dengan radio Unisi FM. Meski telah diralat lewat koran, SK pelarangan tersebut secara resmi belum dicabut.

Ada beberapa catatan menarik yang perlu dikedepankan berkaitan dengan kebijakan pelarangan ini. *Pertama*, pemerintah mencoba menciptakan --meminjam istilah Eros Jarot- takhayul politik baru untuk meredam kekuatan rakyat, yakni melalui wacana bahwa rakyat masih bodoh. *Dus* rakyat belum siap berdemokrasi dan tidak perlu ada suksesi. Di satu sisi wacana ini terang-terangan menghina rakyat, sekaligus mempermalukan pemerintah Indonesia sendiri di mata dunia internasional. Apa gunanya kemerdekaan yang telah berusia 50 tahun kalau hasilnya hanya rakyat yang bodoh. Sementara di sisi, lain wacana tersebut ujung-ujungnya adalah *status quo* kekuasaan. *Kedua*, dengan memakai istilah berita politik -bukan berita yang memuat kritik- sebenarnya pemerintah tengah merentangkan kembali strategi gelang karetnya untuk membendung gejolak di masyarakat. Istilah ini jelas sangat kabur dan potensial sekali untuk dimaknai secara sepihak, terutama untuk membungkam sikap-sikap kritis rakyat. Tak ada satu pun definisi yang memberi batasan tegas kata politik. Batasan yang populer hanyalah soal bagaimana bertarung menggapai kekuasaan dan mempertahankannya. Berita politik, sama kabumya dengan slogan masyarakat adil makmur, atau Pancasila yang bukanlah sosialisme atau kapitalisme. *Ketiga*, pemerintah tidak konsisten dengan pelarangan ini. Sebab hampir semua siaran berita RRI adalah politik, bahkan

bour intensive) dan teknologi usang. Namun pilihan ini terpaksa diambil karena untuk merampingkan birokrasi da menekan konglomerat dalam waktu cepat, negara tidak berani.

Swasta yang terlanjur besar lewat proyek Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) --strategi peninggalan *oil boom*, ternyata sangat manja. Mereka, yang bercokol dikomoditi-komoditi strategis, malah terus merengek minta subsidi dan proteksi. Negara terpaksa mengabulkannya, terbaca dalam kasus krisis semen, Chandra Asri, tepung terigu, kertas, minyak goreng dan lain-lain. Bila permintaan para konglomerat tidak dipenuhi, negara takut mereka akan melarikan modalnya keluar negeri (*capital flight*). Selain itu anak emas negara ini ternyata cukup hobby *nunggak*. Sampai Desember 1994 total kredit macet, meragukan dan kurang lancar diperkirakan berjumlah 26 trilyun rupiah. Tapi sebenarnya kenakalan pengusaha ini disebabkan negara juga. Mereka *nunggak* karena harus berbagi keuntungan dengan birokrasi yang belum berhasil dirasionalisir.

Untuk menyumpal mulut konglomerat-konglomerat manja inilah pemerintah terpaksa masih berharap pada hutang dan investasi asing. Hutang kita berharap pada IGGI, tapi untuk investasi agak repot, karena ada Cina, India serta Vietnam yang lebih atraktif. Untuk menghadapi pesaing itu pemerintah sampai mengeluarkan PP no. 20/1994 yang kontroversial itu. Tapi karena belum cukup puas, jurus pamungkasnya juga dikeluarkan: **menandatangani APEC dan meratifikasi GATT**.

Kombinasi akumulasi hutang dan inefisiensi inilah yang mendongkrak indikator ekonomi yang lain. Misalnya DSR (*Debt Service Ratio*) terakhir membumbung ke angka 33%. ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) atau rasio antara penambahan investasi dengan angka pertumbuhan kita juga masih bertahan diangka 5%, sementara di Malaysia atau Thailand cukup 2-3% saja.

Tingginya angka DSR dan ICOR ini telah membuka mata banyak kalangan bahwa prestasi-prestasi yang dibanggakan oleh Orde Baru ternyata rapuh. Belum lagi kalau kita saksikan kejar-kejaran antara angka pertumbuhan dan inflasi, membuat mesin ekonomi kita gampang panas (*over heated*). Berkali-kali pemerintah harus mengeluarkan kebi-

WAJAH (c)EMAS INDONESIA

INDIKATOR	1993	1994	1995
Pertumbuhan GDP Riil (%)	6,50	7,34	6,80
Penduduk (juta jiwa)	189,13	193,01	196,34
Inflasi (%)	9,77	9,24	9,00
Ekspor (milyar US$)	36,82	39,50	45,00
Impor (milyar US$)	28,09	33,00	37,70
Cadangan Devisa (milyar US$)	12,40	12,05	13,50
Utang Luar Negeri (milyar US$)	78,00	87,60	100,00
Kurs Mata Uang (Rp)	2.110,00	2.201,00	2.300,00
Cicilan Bunga & Utang (trilyun Rp)	15.627	16.812	17.652
% Cicilan & Bunga Utang terhadap pengeluaran rutin	45.92	45.05	41.68
Surplus / Defisit	-6.528	-7.586	-7.640

Data Sintesa dari berbagai sumber.

siaran olahraga Golf pun muatan politisnya sangat tinggi. Lapangannya saja harus menggusur tanah rakyat, dan lobi-lobi tingkat tinggi saat para pejabat dan konglomerat beramah-tamah dengan main Golf bersama. *Keempat*, pelarangan berita politik di radio menandaskan adanya rekayasa pemerintah untuk menghilangkan realitas sejarah kemunculan radio di tanah air.

RRI lahir menjadi media terdepan dan strategis untuk mengobarkan semangat rakyat melawan penjajah. Bukankah proklamasi diketahui dunia internasional dengan peran radio ? Dan ini sangat politis. Demikianlah, sejarah memperlihatkan bahwa keberadaan radio terkait erat dengan perjuangan politik.

Poin terpenting yang mesti dicermati terhadap munculnya pelarangan ini, adalah bahwa secara pelan dan sistematis rejim orde baru mencoba membungkam seluruh saluran komunikasi politik yang mencerdaskan rakyat. Lihat saja kasus pembreidelan TEMPO, Editor dan Detik, diadilinya George J. Aditjondro dan Sri Bintang, serta di*recall*nya vokalis-vokalis DPR. Harta rakyat paling esensial yakni kebebasan mengeluarkan pendapat sedikit demi sedikit dirampok. Maka menangislah perintis kemerdekaan yang telah berjerih payah mencatumkan pasal 28 UUD 45.

SANGAT KELIRU KALAU RADIO DILARANG MENYIARKAN BERITA POLITIK

Saluran komunikasi politik seperti radio, merupakan media tempat rakyat dan pemerintah bisa berdiskusi tentang berbagai kebijakan. Debat-debat publik lewat media ini, pada akhirnya akan mencerdaskan rakyat. Rakyat akan tahu hak dan kewajibannya, sementara pemerintah bisa memotret apa kehendak rakyat tanpa menunggu adanya demonstrasi. Maka sangatlah keliru kalau radio justru dilarang menyiarkan berita politik. Sebab dikawasan itulah sebenarnya peran positif radio akan tampak. Yakni mensosialisasikan kebijakan, sekaligus mengartikulasikan aspirasi rakyat. Sirkulasi informasi antara rakyat dan pemerintah yang lancar, sangat menyehatkan kehidupan bernegara. Di sinilah pentingnya diperbanyak media media masa, dan bukan malah membungkamnya . Ketika saluran-saluran komunikasi politik dihancurkan, sebenarnya pemerintah tengah menyiapkan liang kuburnya sendiri.

Mahasiswa Komunikasi Fisipol UGM, reporter radio UNISI

jakan uang ketat (*tight money policy*) untuk menurunkan suhu ekonomi agar tidak *collaps*.

ISLAM DAN FAJAR LIBERALISME

Setelah *tour of horizon* ekonomi politik Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I, kini kita telah memasuki PJP II. Gejala yang mencolok dalam era ini adalah kian mesranya Islam dan pemerintah, mulai dari diratifikasikannya UU Peradilan Agama, pendirian Bank Muamalat, tegaknya ICMI sampai "penghijauan" Kabinet. Reaksi yang muncul bermacam-macam. Ada yang menuduh bahwa Islam telah terkooptasi, namun lebih banyak lagi yang membela dengan argumen bahwa ini semata memenuhi keharusan sejarah, karena umat Islam mayoritas dan sekian lama terpinggirkan.

Terlepas dari ini, apa implikasi ekonomi pergeseran pendulum politik ini? Habibie, sebagai tokoh utama fenomena ini, menawarkan perbaikan strategi pembangunan dari bertumpu pada keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif. Implikasi perubahan ini cukup serius. Kalau sebelumnya Indonesia cukup puas dengan ekspor produk primer dan teknologi lapuk, kini akan melakukan *leap-frogging*, langsung meloncat menuju lini persaingan terdepan, dengan mengekspor produk *hi-tech*. Alasannya kenaikan nilai tambah satu produk berkorelasi positif dengan kecanggihan teknologi pengolahannya. Gampangnya begini mengekspor satu pesawat profitnya bisa lebih besar daripada mengekspor 1.000 ton kopi. Teladannya Jepang dan Jerman, negara tempat Habibie sekolah.

Persebaran Buruh (dalam juta)

PULAU	1988	1993	%
Sumatera	14,41	17,82	4,34
Jawa	45,60	50,90	2,23
Kalimantan	3,80	4,70	4,60
Sulawesi	4,60	5,60	4,00
Bali / Nusa Tenggara	4,50	5,30	3,40
Maluku / Irian / Timtim	1,60	2,00	4,60

Data Sintesa dari berbagai sumber.

Gugatan untuk proyek Habibie ini bukan tidak ada, misalnya Sritua Arief, dulunya kolega Adi Sasono di LSP. Membangun industri teknologi tinggi (tek-ti) itu bagus, tapi *sosial cost*nya tinggi. Dengan infrastruktur pendidikan yang compang-camping dan hutang menumpuk seperti sekarang ini, itu adalah proyek *nekad*.

Tapi Habibie *ngotot* kalau rencananya tersebut mungkin. Soal dana, bermodalkan *resources* politiknya, dia dengan leluasa meminjam dana reboasasi. Sementara menteri P dan K Wardiman berjanji akan menanggulangi masalah kelangkaan dana pendidikan. Caranya? Bisniskan sekolah. Maka menjamurlah sekolah-sekolah "unggulan", yang memang unggul dalam mahalnya biaya.

Apakah pendidikan mahal model begini bisa menjamin terwujudnya bangsa cerdas seperti harapan se-

INDONESIANIAN

SETIAP kali orang bicara birokrasi, pasti akan teringat birokrasi Weberian. Birokrasi yang merujuk pada konseptualisasi konvensional Max Weber puluhan tahun yang lalu, tipikalnya benar-benar ideal, efisien dan demokratis. Namun, birokrasi Weberian lebih sering hanya menjadi pusat rujukan dalam kajian ilmiah belaka, bukan realitas empiris tetesan makrokosmos. Dunia nyata sangat berbeda, setiap birokrasi ternyata selalu punya penyakit (patologi) yang --celakanya, sulit disembuhkan. Di Amerika sekalipun, birokrasinya terkena penyakit nepotisme yang dilembagakan oleh Presiden Andrew Jackson. Mulai saat itulah dipopulerkan konsep birokrasi Jacksonian untuk menyebut gejala nepotisme tersebut.

Masih ada atribut lainnya untuk menandai penyakit birokrasi. Birokrasi Orwellian, misalnya, yang dirujuk dari George Orwell adalah sebuah kosmetik verbal bagi birokrasi yang cenderung jadi instrumen perpanjangan tangan negara, untuk mendisiplinkan dan mengontrol rakyat. Ini termasuk penyakit, karena birokrasi bukan untuk pelayanan dan bukan untuk efisiensi administrasi. Parkinsonian adalah kosmetik verbal bagi birokrasi yang terkena patologi proliferasi organisasi atau pembesaran kuantitas aparat birokrasi. Tujuan normatifnya memang ideal, yaitu untuk menjawab tantangan modernisasi atau sebagai alat pembangunan. Tetapi toh birokrasi yang terlalu besar jumlah maupun unit- unitnya justru membuat tidak efisien.

Lalu, bagaimana birokrasi Indonesia? Semua orang sudah tahu bahwa birokrasi Indonesia hingga kini mengidap bermacam-macam penyakit. Maka tak heran kalau birokrasi ala Indonesia menjadi pusat rujukan tersendiri dengan kosmetik "Indonesianian". Birokrasi "Indonesianian" merupakan perpaduan dari nilai-nilai kultur tradisional-konservatif di masa lalu dan nilai-nilai modernitas yang diintroduksir oleh kolonial Belanda serta produk modernisasi di era kontemporer.

Ciri tipikal birokrasi "Indonesianian" dapat dibeberkan di sini, dengan melihat fakta-fakta. *Pertama,* birokrasi bukanlah pelayan rakyat maupun mesin untuk efisiensi administrasi, melainkan perpanjangan tangan negara untuk mengontrol dan mendisiplinkan rakyat. Unit dan personalianyapun terlalu besar jumlahnya, terlalu banyak "meja" yang harus dihadapi publik, dan setiap "meja" pasti minta jatah "amplop". Inilah kinerja yang tidak efisien, yang membikin ekonomi biaya tinggi *(high cost economy)*. *Kedua,* kinerja dan kewenangan birokrasi bukan atas dasar legal formal, tapi rasionalitas formal. Ada banyak aturan main yang dibikin oleh pemerintah, tetapi semua itu tidak dijunjung tinggi, sekedar formalitas saja. Bahkan, aturan main yang ada tidak dipakai

mua orang? Budayawan yang banyak bergelut dibidang kemanusiaan, Romo Mangun, mengatakan "kita cuma disuruh menghapal jawaban tapi tidak diajari cara bikin pertanyaan." Dengan iklim pengajaran seperti itu, mampukah pendidikan kita mencetak manusia yang tidak cuma cerdas tapi juga kompetitif, sekali pun dilimpahi dengan fasilitas lengkap? Beliau meragukannya.

LANTAS?

Kapan kita akan mandiri? Belum cukup puas bereksperimen dengan demokrasi, negara segera tampil kembali ke muka dan mengumumkan kembalinya faham negara sebagai keluarga ditandai dengan kembalinya "Bapak". Sebelum benar-benar bang- krut, rumah tangga Indonesia rupanya harus segera berganti bapak, kali ini dengan bapak pembangunan. Kali ini justru lebih riskan, karena setelah hampir tiga dekade lebih berkuasa, Bapak satu ini berniat melemparkan --anak-anaknya yang tak kunjung diakuinya kedewasaannya-- ke mulut harimau persaingan liberal.

Bila Indonesia dianalogikan sebagai keluarga, Ibu Pertiwi sudah habis-habisan memeras diri sendiri demi menuruti kemauan negara "sang Bapak" yang berdalih akan menyejahterakan anak-anaknya, yaitu rakyatnya. Sikap pilih kasih dari bapak membuat sebagian anaknya jadi gemuk dan manja. Pun setelah besar mereka masih tak henti-hentinya merengek minta perlindungan dan bantuan. Kini ketika Ibu pertiwi sudah ringkih dan tak segar lagi, Bapak kian kurang ajar karena justru mengumpankannya ke tetangga- tetangga yang lebih kaya, lewat *ijab kabul* GATT dan APEC.

> **.....'*Bapak*' kian kurang ajar karena justru mengumpankannya ke tetangga-tetangga yang lebih kaya, lewat *ijab kabul* GATT dan APEC.**

Rupa-rupanya yang dimaksud dengan Indonesia emas itu berarti awetnya perkawinan antara bapak (politik otoritarian) dan ibu (ekonomi rente). Suatu perhelatan yang bikin rakyat kebat-kebit dan dihantui cemas tak kunjung henti.

Kini setelah 50 tahun merdeka apakah kita telah mengalami perubahan substantif, dalam arti telah mencoba secara konsisten, berusaha dengan keras dan tegar menegakkan negara bangsa yang moderen, egaliter dan demokratis dan meninggalkan praktek negara kekeluargaan yang patrimonis dan represif? *Wallahu'alam bissawab.*

Happy Birthday Indonesia!

Sopril

Laporan Amien, Amalinda, Alexandra, dan berbagai sumber sekunder

---

sebagai *rule of law*, melainkan sebagai *law of rule* untuk kepentingan penguasa demi kelestarian status quo. *Ketiga*, para aparat melakukan kontrol politik, administrasi dan ekonomi. Birokrasi yang idealnya merupakan pelaksana kebijaksanaan maupun penyelenggara teknis administrasi, dalam prakteknya fungsi mereka meluas, yakni pembuat keputusan yang mendominasi kehidupan ekonomi. Tidak ada demarkasi yang jelas antara fungsi politik dan fungsi produksi. Barang siapa yang berkuasa, maka dia akan menumpuk kekayaan. Kasus-kasus korupsi atau kolusi, misalnya, termasuk dalam rubrik semacam itu. Lagipula, birokrasi kita tidak apolitik seperti idealnya birokrasi, malah mendominasi politik. Berpolitiknya pun cenderung memanipulasi rakyat, seperti dukungan mereka habis-habisan buat si kuning Golkar.

Keempat, hirarkhi dan tindakan diarahkan pada hubungan patron-klien. Hubungan para atasan dan bawahan tersusun secara hirarkhial, pribadi, penuh kekeluargaan. Atasan adalah pelindung dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material maupun spiritual para bawahannya. Sebaliknya para bawahan wajib loyal dan patuh terhadap atasan, apa pun yang dilakukan oleh atasan. Sehingga sekalipun atasan *nyeleweng*, semisal korupsi, toleransi bawahan sangat tinggi.

Sebagai akibat pola itu, muncul budaya "mohon petunjuk kepada Bapak". Dalam hal rekruitmen jabatan, karir maupun promosi seorang pejabat tidak semata-mata ditentukan dengan kualifikasi teknis, tetapi lebih bergantung pada kecerdikan orang itu dalam memelihara dan memanfaatkan hubungan pribadi dengan atasan, sebagaimana halnya dalam mendapatkan jabatan. Jabatan-jabatan birokrasi ini, lebih banyak amat ditentukan oleh "restu" dan penunjukkan dari pemegang di tingkat atas ("bapak").

Kelima, aparat birokrasi tidak biasa merumuskan kebijakan yang konseptual dan benar-benar operasional, tetapi lebih suka pada slogan-slogan atau simbol-simbol. Slogan- slogan yang dimiliki setiap daerah, misalnya, tidak lebih hanya untuk kepentingan pejabat daerah untuk mencari penghargaan Adipura dari Pusat. Padahal realisasi dari slogan-slogan itu menyita banyak "energi" yang tidak efisien dan banyak mengorbankan rakyat. Program "kuningisasi" yang menggejala belakangan ini termasuk dalam rubrik di atas. Itu kan simbolisasi yang tidak efisien, tidak efektif, hanya untuk menyenangkan petinggi Golkar.

Itulah beberan kinerja dan ciri khas penyakit birokrasi ala Indonesia, yang masih menjangkiti, sekalipun negeri ini sudah merdeka 50 tahun lamanya. Keemasan yang dirayakan secara "simbolis" sekarang ini, adalah miliki birokrasi, bukan milik rakyat. Keemasan birokrasi adalah kecemasan rakyat.

Sutoro Eko adalah alumnus Fisipol UGM, staf pengajar APMD Yogyakarta
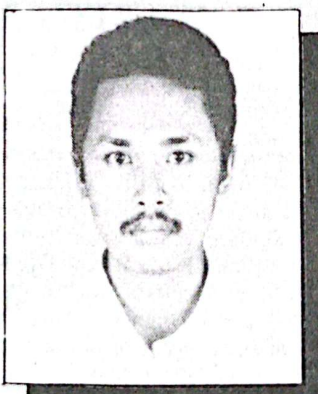
setengah abad RI :

MENDUNGNYA SEBUAH REFLEKSI

Agustus 1995 ini genap limapuluh tahun usia negeri ini. Tahun yang begitu monumental kata konvensi umum. Seperti umumnya ketika bertambah usia, refleksi dalam melacak kembali jejak-jejak yang telah ditinggalkan --kalau itu berbekas-- layak digelar guna belajar darinya. Apakah perjalanan itu kelam atau terang benderang, bukan masalah. Refleksi ini juga membantu mendewasakan, karena darinya kita bisa belajar dari kekurangan-kekurangan.

REFLEKSI yang digelar oleh para pembicara diskusi kali ini berbeda-beda titik acuannya. Apa yang dirangkum berikut lebih menyerupai sebuah mozaik pemikiran. Mengetengahkan empat pembicara yakni Revrisond Baswir (staf pengajar FE UGM), Dr.Faruk (staf pengajar Fakultas Sastra UGM), Djudjur T. Susilo (mahasiswa Sosiologi UGM) dan Mulyadi Malik (mahasiswa Filsafat UGM). Diskusi yang dipandu oleh Nur Choiron melengkapi laporan utama SINTESA edisi kali ini dan ditulis kembali oleh Amalinda.

PEMINDAHAN KEKUASAAN YANG BELUM SELESAI

Tampil sebagai pembicara pertama, Djudjur berpendapat yang lebih tepat sesungguhnya adalah perayaan 50 tahun Proklamasi RI bukan 50 tahun kemerdekaan. Menurutnya kemerdekaan dalam arti sebenarnya belum terasakan secara konkrit. Ia juga tertarik dengan pemasangan simbol-simbol kecil bertuliskan 50 tahun RI Emas dipojok atau sudut kanan atas media cetak dan elektronik. Menurutnya ini merupakan upaya mensosialisasikan segala sesuatu terlihat bagus seperti simbol-simbol itu. Djudjur mencurigai bahwa ini --mengutip Antonio Gramsci-- adalah upaya hegemoni negara lewat jalur mental dan intelektual yang direproduksi secara terus- menerus, setelah secara fisik negara mendominasi di level lembaga.

Berkaitan dengan peringatan Proklamasi yang menurut Djudjur lebih tepat, masih banyak agenda tertinggal dan belum sempat dibenahi dari teks Proklamasi. Pemindahan kekuasaan adalah salah satunya. Dari pandangannya, Djudjur melihat bahwa ini relevan dalam konteks kekinian. Pemindahan kekuasaan itu termasuk juga pergeseran kekuasaan dari eksekutif ke legislatif, atau antar generasi. Mengutip Denny J.A bahwa masalah mendasar yang harus diperjuangkan adalah mengenai hal-hal itu. Dan disertai juga dengan konsolidasi di seluruh lapisan kehidupan.

Dikaitkan dengan kondisi riel generasi sekarang, menurutnya era ini tidak semata-mata milik generasi 45. Pemindahan kekuasaan sudah harus dilakukan dan dibuat terbuka bagi siapa saja. Djudjur mengusulkan untuk merebut peran sejarah. Walau ia menyadari secara kultural ini tidak bisa diterima. "Tapi kalau kita cukup sadar dan kuat, akan lebih bagus jika kita dapat mengambil peran itu." ujarnya.

".....konstitusi telah bergeser fungsinya. Ia kerap digunakan untuk keperluan kekuasaan semata...."

Revrisond Baswir
Dosen FE - UGM

FarukHT
Dosen Fak. Sastra - UGM

Sementara itu situasi sosial politik Indonesia dicermati Djudjur mengetengahkan dua dikotomi : masyarakat dan negara. Padahal menurutnya dikotomi semacam ini tidak tersisa lagi di benak setiap orang Indonesia. Yang ada hanyalah upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi. "Secara simbolik dari apa yang kita pakai seperti jeans, sepatu persepsi kita diarahkan pada pemenuhan ekonomi!". Mengutip puisi Afrizal Malna bahwa tidak ada negara dalam kesunyian diri seseorang. Yang ada adalah pasar. Pasar dalam bentuk iklan-iklan TV yang tanpa disadari telah membombardir kesadaran manusia-manusia Indonesia. "Ini lebih dashyat daripada masuknya ideologi" katanya. Sebagai subyek sejarah, manusia Indonesia harus kritis melakukan perlawanan terhadap pembelengguan oleh kebutuhan-kebutuhan ekonomi itu yang telah menjadi raja. Sesuai perannya sebagai khalifah di muka bumi ini, turut menentukan sejarah dan tampil secara otonom dengan landasan yang besar. Menurut mahasiswa Sosiologi ini butuh perjuangan.

Kondisi riel yang ada dan terbentang serta menjadi materil refleksi seolah saling menjalin kuat satu sama lain. Sulit mendeteksi di sebelah mana simpulnya sehingga bisa menata ulang jalinan itu. Kerja keras dan militan jelas dibutuhkan. *What is to be done ?* --mengutip Lenin-- dilemparkan Djudjur untuk didiskusikan bersama sekaligus merancangnya.

TERLINDASNYA PESAN KONSTITUSI

Revrisond Baswir memulai refleksinya dengan gugatan bahwa refleksi tidak terikat pada tahun atau tanggal atau berdasarkan momen tertentu, refleksi bisa dilakukan setiap saat selama ada kesempatan untuk itu.

Menurutnya konstitusi negeri ini telah amat tergeser perannya sebagai acuan/juklak perencanaan pembangunan. "Para ekonom sudah tidak peduli lagi itu dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan perekonomian dan menurut saya ini suatu masalah yang sangat mendasar", ujarnya. "Bagaimana mungkin sebuah bangsa mempunyai konstitusi dan konstitusi itu dianggap seolah tidak ada", tambahnya lagi.

Konstitusi menurut staf pengajar FE UGM ini, telah bergeser fungsinya. Ia kerap digunakan untuk keperluan kekuasaan semata. Orang baru ingat akan konstitusi ketika dikutip oleh penguasa, aparat saat memberi

sanksi terhadap kesalahan Kalau kekuasaan mau, tambahnya lagi, semua orang bisa saja dipenjarakan karena aturannya bisa dicarikan.

Dalam hubungan dengan konteks ekonomi, bunyi pasal 33 mengandung dua hal penting yakni perekonomian yang disusun oleh rakyat dan yang kedua koperasi adalah bentuk ideal pemberdayaaan ekonomi rakyat. Pada dataran riel koperasi tidak laku walau dibacking UUD yang jelas. "Lihat saja, volume usaha koperasi yang cuma 0,5% dari keseluruhan kegiatan ekonomi negeri ini, dan ini menyedihkan", katanya. Padahal nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi tidak ada cacatnya. Kekuasaan tertinggi dipegang Rapat Anggota yang artinya kekuatan rakyat bermain, kalau direlasikan dalam konteks perekonomian nasional, rakyat yang menyusun perekonomian.

Persoalan penyusunan tidak bisa berlepas diri dengan susun menyusun yang lain, parlemen, lembaga dan institusi terkait lainnya ikut terputar bersama dalam lingkungan permasalahan. Ini bersambung juga pada masalah politik dan komponen yang menyertainya, seperti sistem sosial Indonesia, UU Ormas, Orpol, Sistem Pemilu. *Something wrong* dengan penyusunannya kalau ternyata amanat konstitusi hanya bisa involusi alias jalan di tempat.

Sesungguhnya koperasi tidak sendirian tersisih dan tidak berdaya, sektor negara seperti BUMN lain juga sangat menyedihkan. BUMN padahal punya aset paling besar tetapi minim volume usaha dan labanya. Sektor swasta yang kondisinya terbalik justru berdiri di posisi terdepan dalam perekonomian di Indonesia. Kondisi BUMN yang secara riel seperti itu, berakar dari pengelolaan yang tidak efisien. "Kalau tahun 1987-1988 sektor perbankan dipegang oleh bank-bank pemerintah, sekarang? Sudah kalah baik dan diambil alih oleh swasta". Di titik ini Revrisond sepakat dengan pembicara pertama, Djujur, bahwa dimana-mana ada kapital -- atau 'pasar' dalam bahasa Afrizal Malna-- "Kita semakin dekat dengan perekonomian liberal", ujarnya. Koperasi tidak populer, BUMN tidak efisien, ekonomi makin liberal, "Berarti apa yang dicita-citakan konstitusi sudah jauh ditinggalkan", tambah dosen yang S-2nya dijalani di Michigan, USA, seraya menutup refleksi singkatnya.

Kondisi riel jarang bisa berjalan bergandengan dan beriringan dengan konsep. Secara kultural orang Indonesia menurut Revrisond memiliki "kesadaran ganda", yakni kesadaran yang bisa dipakai guna menghadapi hal-hal yang formal dan untuk hal-hal yang sungguhan. Ini dijalani oleh manusia-manusia Indonesia secara rileks tanpa beban menjalani fenomena riel dan formal yang saling bertolak belakang. "Jadi tidak heran walau sholatnya jalan tapi korupsinya nggak ketinggalan," ujarnya. Ini dilacak Sony--panggilan akrabnya--karena salah satu sebabnya berdirinya institusi- institusi tidak berangkat dari kebutuhan riel, berdasarkan kemampuan kita, tata krama, budaya dan lain-lain. Institusi- institusinya adalah institusi tiruan.

KEBUDAYAAN KOSMETIK

Dengan lebih dominan memotret kebudayaan secara dekonstruktif, Dr Faruk menjadi pembicara ke-3. Dosen fakultas Sastra ini menilai bahwa kebudayaan Indonesia tidak beda fungsinya dengan kosmetik yang punya peran memperindah dan menutup yang jelek. Kebudayaan kosmetik singkatnya. Bangunan-bangunan yang dikonstruksi oleh bangsa ini tidak berangkat dari kebutuhan yang riel. Bangsa ini, menurut Faruk lebih lanjut, mengadaptasi belaka secara permukaan.

Di titik ini ada kesamaan pendapat dengan pembicara sebelumnya. Faruk mengambil contoh birokrasi di Indonesia. Birokrasi yang ada sekarang, secara empirik telah terlepas jauh dari ide awal pembentukannya. Birokrasi malah serba menyulitkan, dan bukan melancarkan seperti ide awalnya. Atau lagi aturan-aturan hukum yang berlaku yang hanya indah luarnya saja. "Ya.. seperti pupur, pemulas mata, yang membuatnya indah dan sedap dipandang mata !" ujarnya. Banyak contoh keseharian disekitar kita yang mencerminkan kondisi itu. Ini membentuk apa yang menurut istilahnya "realitas yang seolah-olah ada padahal sesungguhnya tidak ada."

Realitas yang hanya ada pada format "seolah-olah" tadi, dicontohkan Faruk -- seperti yang dicontohkan Djudjur -- adalah simbol-simbol atau emblem di pojok kanan media cetak dan elektronik kita dan ada dimana-mana. Ini seperti menawarkan pada masyarakat banyak bahwa memang dalam arti yang sesungguhnya usia setengah abad bangsa ini, segala sesuatu telah top kondisinya, serba bagus baik dan indah. Istilah- istilah 'Tahun Emas', 'Tahun Perak" atau malah --jangan-jangan-- akan ada 'Tahun Loyang', dalam pandangan Faruk makin menguatkan keberadaan realitas yang tidak ada itu, seolah-olah benar-benar ada.

Pembicara terakhir diskusi dengan kemasan refleksi ini, dimanfaatkan oleh Mulyadi Malik' mahasiswa fakultas Filsafat untuk mengurutkan secara kronologis sejarah negri ini sejak zaman kolonial silam. Dari uraiannya, Mulyadi menawarkan --dalam menjawab pertanyaan What's to be done— mempengaruhi kebijakan, itu yang pertama. Yang kedua merevolusi sistem. Untuk yang pertama menurutnya, kita bisa memanfaatkan partai, NGO atu pusat-pusat pendidikan. "Yang pertimbangannya ini akan mengarah pada bentuk demokrasi parlementer". ujarnya. Sementara yang kedua menurutnya akan membengkakkan piramida korban. PR bangsa ini menurutnya adalah bagaimana mengefektifkan partai. Sehingga mampu mengakar pada masyarakat kecil. Selanjutnya kita akan berhadap-hadapan dengan hukum. " Kebijakan politik kita dilegitimasi oleh hukum, sementara negara kita adalah negara hukum. Maka kita dibenturkan dulu dengan hukum. Kita kena hukumnya dulu." ujarnya sambil meruntunkan logikanya. Menurutnya, hukum seharusnya menjadi penjaga politik bukan malah politik yang menjagai hukum.

Beragamnya perspektif masing-masing pembicara diskusi SINTESA kali ini, menginventarisasi beragamnya masalah sebagai bahan refleksi. Daftar what is to be done ternyata makin panjang. Anggaplah refleksi ini sebagai kado manis dirgahayu RI ke-50.

"....PR bangsa ini... adalah bagaimana mengaktifkan partai. Sehingga mampu mengakar pada rakyat kecil..."

Djujur T. Susilo
Mahasiswa Sosiologi - UGM

Mulyadi Malik
Mahasiswa Filsafat - UGM

NASIONALISME:

antara NATION - STATE dan FIKSI

Ariel Heryanto lewat wawancaranya dengan Amien, Evi, Sopril dari SINTESA mengajak kita sejenak merefleksikan fenomena perayaan kemerdekaan tahun ini. Sebuah perayaan yang digelar secara istimewa. Ditandai parade sikap'nasionalis', padahal nasionalisme itu bagi Ariel adalah fiksi. Berikut percik-percik pikirannya yang ditulis ulang oleh Djudjur.

MENDIRIKAN sebuah bangsa itu berat. Apalagi bila sebelumnya terdiri dari bermacam suku bangsa. Jelas masih banyak yang harus diselesaikan. Mulai dari soal persatuan, kebersamaan, kesejahteraan sampai kemungkinan berkembang. Maka ketika peringatan ulang tahun kemerdekaan mencapai angka 50 dirayakan secara besar-besaran persoalan ini terus relevan meskipun sudah ada Sumpah Pemuda dan Polemik Kebudayaan pada tahun 1930-an.

Sebelum buku Ben Anderson, **Reflection on The Origin & Spread of Nationalism**, beredar, sudah banyak buku-buku tentang nasionalisme. Tapi buku Anderson ini menjadi **katalis** yang penting untuk menggugat ulang sejumlah asumsi-asumsi yang sudah berumur 50 tahun. Nasionalisme tidak semata-mata sebagai cita-cita mendirikan *nation state*. *Nation State* yang di dalamnya terkandung integrasi nasional atau kebudayaan. Tetapi yang masih menjadi masalah, apa yang akan kita perbuat terhadapnya ?. Apa mau kita anggap lelucon yang sudah lewat saja ? Apa itu sesuatu yang keramat, sesuatu yang diberikan Tuhan?

Menurut Ben Anderson *nation* adalah sebuah fiksi.*Nation is fiction*. Sama seperti cerita Maria Mercedes, Dora Emon, Garth. Yang membedakan kalau cerita tersebut, selesai kita menontonnya, membacanya atau mendengarnya, selesai pula hiburan itu. Sedangkan untuk *nation* orang mau mati-matian perang sampai saling membunuh. Fiksi tidak pernah riil sehingga bisa diejawantahkan dalam bentuk riil atau seakan-akan riil. Mirip cerita *Sam Pek Eng Tay* ada aktor main di panggung, panggungnya riil tetapi ceritanya sendiri fiksi.

Fiksi juga itu tidak bisa dianalisis. Kalau dibongkar bisa bubar semuanya. Orang sudah mengerjakan ini 10 tahun yang lalu. Misalnya tentang asal usul Indonesia, dari mana Indonesia berasal dan sejak kapan Indonesia berada ?, Kalau kita menyatakan Indonesia berumur 50 tahun,berarti Indonesia tidak pernah dijajah. Saat itu adalah proklamasi Indonesia. Kalau Indonesia ada sejak Indonesia diproklamasikan ada dua hal yang menjadi lelucon besar. *Pertama* hebat betul sebuah negara bisa dibentuk hanya dengan proklamasi, jika demikian kita buat saja proklamasi tiap hari agar ada negara baru. *Kedua*, kalau Indonesia ada sejak 17 Agustus 1945, tanggal 16 Agustus 1945 dan sebelumnya itu belum ada Indonesia. Itu berarti yang dijajah Belanda bukan Indonesia, lalu apa ?, Kalau itu Indonesia sejak kapan ia ada? Sejak kapan ia dijajah ? Tidak pernah terjawab kecuali sebuah dongeng.

> **PABRIK FIKSI TENTANG NATION YANG PALING PENTING ADALAH NOVEL DAN PERS**

Sekarang kajian tentang **nation**, nasionalisme, dalam ilmu sejarah, sosiologi, antropologi dan ilmu politik banyak menggunakan teori-teori sastra. Pemakaian teori-teori sastra berimplikasi pada upaya pembongkaran fiksi secara besaran-besaran. Diantaranya etnisitas, pri - non pri, wanita-laki-laki. Sedangkan zaman menuntut kita untuk menerima bahwa itu suatu fiksi dan sering yang riil tunduk pada fiksi. Tapi jangan main-main dengan fiksi! Orang sampai mati-matian bunuh diri untuk sebuah fiksi yang dianggap riil. Selalu ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik meremehkan fiksi. Ia sekedar menjadi teks kedua dari yang riil, yang dinilai benar, ilmiah dan yang lain kita anggap jiplakannya. Nasionalisme pun masih sebatas debat intelektual. Karena *nation- state* sebagai fiksi dibuat oleh intelektual yang percaya itu, bukan dimulai oleh aparatur dan birokrat negara. Dari sini satu pabrik fiksi tentang *nation* yang paling penting ada dua, yaitu novel dan pers.

Membincangkan *nation-state* yang menarik bukan semata dia fiksi tapi karena ia juga *powerful*, yaitu menampilkan diri sebagai bukan fiksi. Seperti Indonesia, kita bisa lihat dimana fiksinya dan bagaimana itu dibuat. Keberadaan VOC waktu itu tidak berbeda dengan *Matahari Dept. Store, Sogo* atau yang lain. VOC menarik karena datang cuma untuk berdagang, tapi kemudian berkembang terus. Selain *majakin* orang, mencetak mata uang, tapi **bikin** teritori, tentara, penjara dan pengadilan. Itu namanya *state*, *nation*nya belum ada. Yang menjelma menjadi Republik Indonesia ya itu. Bayangkan kalau Matahari dan Sogo membuat itu. Lewat sekolah, koran dan macam-macam, bagi penduduk yang menganggap aneh bisa diajar menjadi biasa.

Sementara salah satu kategori *nation* adalah teritori. Lalu sejak kapan teritori ada ?, 50 tahun yang lalu ?, Tidak !, Lebih dari 350 tahun ? Tidak juga. Teritori itu Sumatra, Kalimantan, sejak kapan adanya ?, Bisa berubah menurut waktu, tapi secara tegas kapan ? Yang penting apa batasnya? Jadi kalau tahun 1910 artinya sebelum 1910, abad 20 Indonesia belum ada padahal sudah dijajah 350 tahun. Dengan demikian sebenarnya kita itu mengkudeta Belanda. Karena mereka menindas lalu kita melawan. Di samping sebetulnya kita pun tidak pernah membuat. Sebab dalam kisah, mitos,

dongeng, hikayat sejarah Nasional melulu orang asing yang menjajah kita. Sementara dari 30-40-an terjadi hubungan internasional yang sangat tegang yaitu Amerika, termasuk Belanda, yang menentukan situasi Indonesia sekarang. Kalau waktu itu sedikit diubah ceritanya, barangkali Indonesia tidak seperti sekarang, mumgkin menjadi satu bagian dengan Malaysia atau Filipina, bahkan ada Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Proses politik seperti ini perlu dipelajari. Pembelajaran ini memang kerap ditindas sekedar menyelesaikan sebuah fiksi bernama integrasi nasional.

Pada titik ini fiksi itu menjadi penting. Karena maksud fiksi cukup jelas dan dalam menghadapi musuh memakai senjata yang dibawa musuh. Seperti nasionalisme kita mengambil dari pelajaran setiap semester di sekolah-sekolah, tidak dari kerajaan Mataram maupun kerajaan Sriwijaya. Dengan itulah kita menikam Belanda. Kalau memakai bambu runcing saja bahkan mungkin dengan ABRI juga tidak bisa. Harus dengan sebuah fiksi, makanya jangan main-main dengan fiksi. Disadari maupun tidak demi sebuah perjuangan fiksi itu dipakai. Setiap jaman dan setiap perjuangan pun pasti ada fiksi.

VOC ITU TIDAK ADA BEDANYA DENGAN MATAHARI DEPT. STORE

Pada jamannya nasionalisme adalah fiksi yang sangat mulia, tapi *tetep* fiksi. Biar ada jasanya dan sudah menyelesaikan ja- sanya jangan memperlakukan ia secara statis. Bahkan menurut saya fiksi mengenai nasionalisme itu tidak akan laku lagi. Kalau begitu mengapa kita bersama-sama di sini ?, Itu sama saja seperti mengapa kita sama-sama ke Matahari. Dengan demikian Indonesia ini adalah pilihan kecil dari sebuah pasar yang bernama bumi. Selain dahulu kejayaan fiksi karena ada perbedaan kebudayaan.

Lalu apa kita sama semua? Perbedaan kelas masih ada, perbedaan agama, ras, gender masih ada, dan itu bukan nasionalisme lagi. Dan apakah dalam 50 tahun yang dikeramatkan ini kita punya tempat untuk ngomong-ngomong soal-soal ini. Persoalan sekarang siapakah yang mengaku 'kita' sekarang, apakah bukan sekedar nostalgia. Dan mungkin sekarang masalahnya adalah kesenjangan. Mengapa ada jenis kelamin seperti ini?, Mengapa ada sistem agama seperti ini ?. Itu pun diperjuangkan dan dipersoalkan lewat sejumlah fiksi baru, tidak bisa tidak, tentu dengan cara yang berbeda. Sekarang demokratisasi menjadi fiksi yang sedang mode di Indonesia. Itu adalah suatu dongeng, suatu kisah bahwa setiap rakyat mempunyai hak yang sama. Untuk menghela demokratisasi selain memproduksi informasi yang mengakrabkan masyarakat pada realitas keseharian seperti soal beras, gaji, semen maka lebih penting menambah jumlah media, bukan informasinya sebab itu berbeda. Lebih banyak telpon umum, telpon genggam, komputer, *e-mail*. Kalau sudah sebanyak itu bagaimana lagi mau mengaturnya. Dan yang memperbanyaknya adalah para kapitalis bukan aktifis pro demokrasi, seperti ketika VOC datang dengan maksud dagang tapi mediumnya amat politis. Meski dari sudut ilmu politik semua itu ada yang mengatur tapi tidak dari kesusasteraan. Orang mengarang puisi, dibacakan, interpretasi pendengarnya berbeda-beda. Padahal politik itu sama seperti puisi, dikeluarkan dengan maksud A, di lapangan jadi B kena si C jadi D. Seperti berita presiden sakit, siapa yang membuat berita ? Apa dia bisa mengontrol interpretasi pembaca-pembacanya?. Atau pemilu, merayakan sesuatu kemenangan yang sudah diketahui sebelumnya, atau politik etis apa Belanda bermaksud mencerdaskan bangsa ? Ya, tidak!

Djudjur. T. Susila

ROMO MANGUN : "BANGSA KITA ITU BANGSA RADIO SATU BAND"

Sebagai salah satu rangkaian dari wawancara laporan utama kali ini, SINTESA menemui Romo Mangun di kediamannya. Romo Mangun --budayawan yang banyak bergumul dalam pembelaan kaum kecil, bicara banyak hal. Mulai dari pendidikan bangsa ini, nasionalisme, integrasi sampai demokrasi. Memasuki usia yang ke-50, menurutnya bangsa ini masih harus membenahi sistem pendidikannya. Yakni yang mencerdaskan, tidak sekedar menghasilkan orang pintar. Karena dari situlah berbagai aspek kehidupan berhulu. Seperti yang dikatakannya,"...demokrasi mengandalkan orang-orang yang cerdas.". Di bagian lain kami menampilkan wawancara dengan Arbi Sanit, dan Sritua Arief.

Romo, Nasionalisme begitu dituhankan di negeri ini. Sebetulnya setelah 50 tahun sejauh mana kita telah berhasil menegakkan nasionalisme itu di segala bidang.

Dalam sejarah negara kita, para founding fathers kita tidak mencantumkan nasionalisme sebagai tujuan nasional. Kalau kita lihat mukadimah, tujuan nasional kan mencerdaskan bangsa, jadi nasionalisme itu bukan tujuan bangsa. Saya melihatnya hanya sebagai sarana.

Kelihatannya Romo banyak menyoroti soal mencerdaskan kehidupan bangsa, soal edukasi, pendidikan?

O iya. Karena kalau bangsa kita tidak cerdas, susah dan tidak aman juga. Misalnya, pemerintah kita lebih menekankan stabilitas, tapi itu sekaligus tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab orang yang tidak cerdas itu paling tidak bisa membuat keamanan, kacau. Gak bisa berlogika, gak bisa berdiskusi, keputusan yang satu dicabut lagi, tidak konsekuen, main belakang.

Kalau ukuran kecerdasan itu sendiri, gimana?

Wah, susah. Tidak bisa dikatakan dengan satu dua kata. Banyak kriterianya. Tapi salah satu yang bagus adalah: Orang yang cerdas itu mampu untuk bertanya, dan pertanyaan yang penting. Orang yang hanya mampu menjawab pertanyaan orang lain itu belum tentu cerdas. Beo pun bisa. Robot pun bisa. Nah kalau sekarang, murid-murid termasuk mahasiswa tidak boleh bertanya. Kalau banyak bertanya malah di *black list*. Jelas tidak mencerdaskan. Yang mencerdaskan itu kan selalu mengajak untuk bertanya. Dalam semua ilmu pengetahuan dan riset, yang jadi doktor adalah ia yang mampu membuat pertanyaan baru, bukan pertanyaan lama diulang-ulang lagi. Jadi inti ilmu pengetahuan, inti kemajuan bangsa ialah kalau Anda mampu mengajukan pertanyaan baru, dari diri sendiri. Nah, apa ini terjadi? Saya lihat tidak. Semua orang diwajibkan untuk menjawab persis seperti yang diperintah dosen, penguasa dan mungkin penatar.

Kalau SD Romo Mangun itu sendiri bagaimana, Romo?

Kami sekarang mencoba suatu yang lain. Jadi dimana-mana sekarang, termasuk dalam pandangan umum, Cerdas Cermat di televisi, anak yang ranking tinggi itu yang bisa menjawab pertanyaan apapun dari si guru. Kami mengajarkan, anak harus bertanya, dididik dan dilatih untuk bertanya, pelan-pelan. Mungkin untuk pertama pertanyaan yang tolol atau meniru-niru atau njiplak. Tapi lama-lama diajak untuk bertanya pertanyaanmu sendiri.

Tapi keadaannya sekarang di SD umum masih hafalan. Sepertinya menyedihkan sekali, jadinya seperti apa?

Kok Anda bilang SD, lah wong mahasiswa juga masih hafalan kok. Jadi dalam situasi seperti ini mana mungkin bangsa kita cerdas.

Apa benar sistem seperti ini memang dipolitisir?

Sistem pendidikan ini tidak mendukung anak yang cerdas.

Jadi memang ada tujuan-tujuan politis tertentu yang melatarbelakanginya?

Wah kalau itu jangan tanya saya. Tanya yang bikin sistem itu.

Kembali lagi ke sekitar nasionalisme , di dalam buku The End of Ideology (Daniel Bell,red.), dikatakan bahwa nasionalisme itu hanya sebagai alat atau instrumen. Dan kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, lantas untuk apa?

Ya buat apa. Tapi bukan nasionalisme yang umum tapi nasionalisme tertentu, memang bisa saja sudah tidak diperlukan.

Dengan kondisi Indonesia yang sangat plural, faktor geografis, budaya, bahasa, etnis, nasionalisme tetap dibutuhkan untuk menyatukan bangsa ini.ya kalau relevan itu saya kira semua relevan. Nggak ada yang tidak relevan. Kalau yang diutek-utek itu, nasionalisme sebagai hal yang terpenting, ya sudah, silakan lihat sendiri. Jadinya seperti ini.

Jadi Romo kelihatannya kurang percaya terhadap nasionalisme.

Nasionalisme tertentu. Saya tidak percaya terhadap nasionalisme tertentu.

Bisa lebih spesifik nggak Romo?

Nasionalisme itu , wajarnya kan sebagai alat, saran, jalan. Bukan sebagai orangnya. Tapi kalau jalan itu dijadikan kendaraan, kalau alat itu dijadikan tuan, ya silakan.

Sampai sekarang, seperti tadi dikatakan Romo bahwa nasionalisme digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan macam- macam. Tapi melihat kenyataan di Indonesia kemapanan belum tercapai.

Ya karena begini.. nasionalisme itu kan awal mulanya dari para founding fathers kita kan hanya sarana untuk memerdekakan bangsa, khususnya rakyat yang paling menderita, bukannya memerdekakan yang paling kaya atau berkuasa. Dulu itu selalu rakyat yang paling menderita, itu dulu yang harus dibebaskan. Kalau kita setia pada itu, ya no problem.

Jadi sekarang ada penyelewengan?

Ya jelas ada. Sekarang saya tanya pada anda, apa benar kita sudah merdeka. Apa 50 tahun RI ini masih RI yang sama. Jangan-jangan ini sudah RI lain. RI 50 tahun.. yang mana toh sebenarnya, apa sudah baru lagi tapi belum 50 tahun. Tapi ini hanya pertanyaan loo..

Na, kalau menurut Romo nasionalisme sekarang sudah kayak gini,

kenapa bisa ada penyalahgunaan nasionalisme?

Kenapa? Ya tanya yang berbuat itu.

Tapi kalau kita mengamati juga kan kita bisa tahu kira- kira dimana salahnya ?

Jawaban yang paling gampang tapi bukan yang paling benar, adalah karena yang mendirikan Republik kita sudah meninggal. Jadi yang sekarang ini orang-orang baru. Tapi itu mungkin lo. Mungkin ada jawaban yang lebih tepat. Dan yang bisa menjawab kan anak muda.

Anak muda itu tidak dikasih kesempatan ......

Ah, anak muda kok minta dikasih kesempatan, nggak ada, anak muda itu harus merebut kesempatan.

Tapi mahasiswa sekarang kan banyak yang apatis.

Itu normal saja kok. Dulu jaman Bung Karno juga begitu, mayoritas pemuda-pemudi kita itu ikut Belanda. Jadi dulu, diantara 50 juta, yang berjuang seperti Sukarno itu paling 200. Selebihnya apatis semua. Hal biasa itu, jadi jangan dijadikan alasan. Yang berjuang itu selalu sedikit kok, jangan harap yang mayoritas itu ikut berjuang. Jadi yang mayoritas itu hanya dansa-dansi, jadi pegawai Belanda. Dan seandainya disuruh milih, yang intelek-intelek, pegawai-pegawai, raja-raja, milih ikut Belanda. Pada saat Yogya diduduki Belanda, RI hampir hancur, raja yang setia pada RI hanya tinggal dua. Hamengkubuwono IX dan Pakualam ini.

Ada teori bahwa nasionalisme itu membentuk suatu integrasi nasional.

Nggak, integrasi itu bukan nasionalisme. Integrasi itu perasaan solidaritas. Bukan nasionalisme.

Berarti tidak bisa dibangun dari nasionalisme ?

Nasionalisme itu kan suatu sikap tertentu. Jadi yang mempersatukan itu bukan nasionalisme, tapi solidaritas, gotong royong, dan merasa senasib.

Kalau menurut Romo sendiri integrasi nasional sekarang bagaimana?

Jelas, kalau di Indonesia tidak ada hukum, setiap kelompok, setiap orang mesti cari selamatnya sendiri. UGM dengan KAGAMA, ITB punya apa lagi, UI punya alumni UI. Nah, kalau semua begitu, mana kesolidaritasan? Mana keintegrasian, wong semua cari selamat sendiri-sendiri.

Jadi selama ini memang integrasi belum terbentuk ya?

Bukan belum terbentuk, tapi sudah tidak ada lagi. Huuaaahaha.... saya mengalami tahun 45 sampai 55 itu, sungguh, solidaritas nasional itu ada. Dulu itu orang sanggup untuk berkorban, sampai mati aja mau kok. Istilah romantis itu .. gugur di medan laga sebagai bunga bangsa.

Apakah untuk memunculkan integrasi atau rasa solidaritas, kita harus menciptakan musuh baru lagi

Tidak. Dulu memang seluruh rakyat menderita dan ada yang dinamakan *solidarity maker*. Namun sekarang istilah itu tidak ada. Semuanya cari selamat dan keuntungan sendiri.

Menilik kondisi sekarang, apabila terdapat solidarity maker apakah hal itu dapat digunakan untuk mereshuffle keadaan itu.

Solidarity maker itu bukan orang yang hanya membakar semangat tetapi lebih memberikan contoh. Dan *solidarity maker* itu orang yang selalu setia. Karena perbuatannya mereka menjadi *solidarity maker*. Jadi bukannya karena pidatonya. Mereka mau dibuang, dipenjara dan lain-lain. *Solidarity maker* bukan dari orang yang memperkaya diri. Contohnya di India, Vietnam dll

Apa yang Romo rasakan selama 50 tahun merdeka ?

Kalau dikatakan dalam satu kalimat, ya susah. Tapi di Indonesia ada satu keuntungan: tidak ada perang saudara. Pernah ada tapi sudah tidak ada lagi. Itu harus kita syukuri. Tidak seperti Rwanda, Burundi, dan dataran Cina. Kita sudah 30 tahun lebih tidak ada perang, walau pun dibeberapa tempat masih ada perang, seperti di Timtim. Itu memang satu keuntungan tapi harus dibayar mahal. Tidak ada di dunia ini yang cuma-cuma. Masalahnya apa generasi muda sekarang menganggap itu terlalu mahal, atau mahal tapi rasional. Itu kan kalian sendiri yang harus menilainya. Apalagi kalau tidak cerdas, keamanan bangsa yang tidak cerdas itu mahal sekali. Seperti di Jepang atau di Jerman mereka orang-orang cerdas, jadi keamanannya relatif gampang. Tapi kalau di Afrika, kan tidak begitu cerdas, jadi banyak pembantaian. Seperti sekarang di Indonesia kan banyak preman, itu kan tanda bangsa yang bodoh.

Kalau integrasi ekonomi, bagaimana ?

Ya, semuanya cari untung sendiri-sendiri. Seperti sekarang semen naik, apa itu integrasi ekonomi ? Semua tahu kalau harga semen naik begitu tinggi, pedagang-pedagang kecil itu kan mati semua. Pasti nanti di monopoli oleh pedagang besar. Lalu
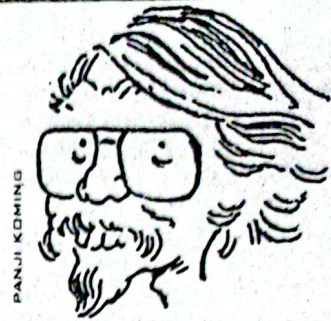
orang kecil itu kalau mau bangun rumah gimana? Kalau konglomerat besar ya jelas bisa dapat modal dari kredit bank dunia.

Kalau masalah demokrasi, bagaimana ?

Kalau bodoh ya nggak bisa demokrasi. Semua like and dislike. Kalau nggak suka, wah...kamu anjing. Demokrasi itu mengandalkan orang-orang yang cerdas. Jadi bisa berbincang secara rasional, tahu untung-ruginya. Kalau tidak tahu kan asal senang-nggak senang, kalau tidak punya argumentasi, tahu-tahu... kamu PKI. Kalau kita baca koran kan entah panglima atau pembesar itu sering ngomong yang tidak cerdas toh..?! Seperti kasus Kedungombo, orang bela sawahnya kok PKI, anti pembangunan. Ya itu, kalau bicara dengan orang yang intelektualnya kurang kan seperti mendengarkan radio satu band, diputer-puter BBC ya nggak jalan. Itulah, bangsa kita itu kan bangsa radio satu band.

Apa bisa memulai demokrasi, apabila tingkat kecerdasan masih rendah?

Wah sulit, demokrasi dengan orang yang tidak cerdas itu sulit. Tapi memang kita harus terus berjuang. Tapi yang penting itu bukan demokrasi, tapi orang-orang kita itu apa sih sikapnya? Apa cuma ngawur atau like dan dislike saja? Atau nafsu? Kalau orang-orangnya seperti itu susah untuk demokrasi. Jadi kita harus menghadapi bangsa yang sehat dulu baru bicara demokrasi. Sekarang ini bangsa Indonesia bahasanya masih kacau, tidak tahu mana titik-koma, subyeknya mana, kata kerjanya mana. Bahasa itu kan bisa dijadikan indikator. Kalau bahasanya ngawur ya mesti pikirannya juga ngawur.

Ada pesan buat teman-teman nggak Romo?

Ya... supaya generasi muda maju saja. Ironis memang, tapi itu realitas. Kalau bukan generasi muda siapa yang akan mengubah keadaan?

Amin, Iwan, Evi dan Linda

"KALAU MAU PERTUMBUHAN

KITA akan memperingati 50 tahun Indonesia merdeka tapi kenapa ide tentang nasionalisme ekonomi justru makin sayup-sayup?

Nasionalisme ekonomi kita telah dijabarkan oleh para pendiri republik. **Pertama** bahwa Indonesia harus berubah menjadi produsen barang primer ke produsen barang-barang olahan, artinya dengan mengolah barang-barang primer, selain nilainya membesar, tenaga kerja yang diserap banyak dan *multiflier effect*nya lebih banyak. Supaya kita tidak jadi *onderneming* besar memproduksi bahan mentah, mempertahankan barang tambang.

Kedua, penguasaan pribumi di dalam kekuatan ekonomi, itu jelas dan itu dilaksanakan di jaman kabinet Natsir dan kabinet Ali Sastroamidjojo, dengan membentuk Bank Industri Negara dan *segala macem*. Tapi kesalahan terbesar pada waktu itu ini jatuh pada elit pribumi ke orang-orang partai politik bukan ke bawah. Mungkin juga belum kesampaian, karena waktu itu kabinet baru tiga bulan kan udah tumbang.

Tapi Jepang kok bisa bertahan?

Ya.. karena seluruh sistem sosialnya mendukung. Perbedaan antar parpol tidak begitu prinsipil. Tidak ada kontes kekuasaan yang begitu atraktif. Di Indonesia ada pengaruh PKI yang sangat kental, sehingga kontes kekuasaan sampai mengorbankan program. Kemudian Orde Baru, diberi kesempatan selama 25 tahun punya stabilitas politik, tapi tidak digunakan untuk mencetak ekonomi pribumi, malah memperkuat konglomerasi. Kalau Jepang dalam 25 tahun pasti sudah besar sekali itu. Atau mungkin di Indonesia sengaja adanya *missing the chance* demi kepentingan segelintir orang.

Kalau membaca sejarah pembangunan ekonomi Indonesia setelah merdeka, sepertinya mengulang yang lain, ada korelasi negatif antara pembangunan politik dengan ekonomi. Apa nggak ada jalan keluar?

Sebetulnya ada teori yang mengatakan semakin berkembang ekonomi maka semakin berkembang pula demokrasi. Kalau seiring sejalan, mungkin pertumbuhan ekonomi tidak terlalu pesat, tapi apa tujuan kemerdekaan itu cuma pertumbuhan ekonomi? Tujuan kemerdekaan adalah keadilan ekonomi. Beda itu. Kalau tujuannya pertumbuhan ekonomi, bantai langsung aja... buat saja konglomerasi, pasti apapun bisa diproduksi. Tapi lantaran tujuan kemerdekaan itu menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka jangan utamakan pertumbuhan ekonomi, bisa saja pertumbuhan ekonominya seret tapi mencapai adil dan makmur.

Karena filosofi waktu itu adalah teori pertumbuhan, sementara teori strukturalis belum begitu gencar, masih di Amerika Latin. Maka penasehatnya Soeharto, seperti Ali Sastroamidjojo, Ali Wardana, yang lulusan Berkeley dicekoki teori pertumbuhan neo- klasik. Pembangunan menurut neo-klasik ada dua komponen, pertama *you* tumbuhkan ekonomi, nanti ada tetesan ke bawah dengan sendirinya, jadi tidak usah dipersoalkan soal pemerataan. Kedua, karena Indonesia nggak punya modal yang banyak, sementara menurut teori Straud dan Cennery, negara-negara berkembang butuh utang luar negri karena eksportnya tidak bisa membiayai importnya. Jadi masuklah utang luar negeri dan modal asing. Nah inilah yang membikin *crash* pembangunan, ditambah pengusaha. Sementara supaya investasi pembangunan di Indonesia aman, pertama jangan ada larangan mentransfer keuntungan, makanya kita menganut paham rejim devisa bebas. Kedua jangan ada kegoncangan politik, jadi harus ada stabilitas politik.

Itu kan fenomena awal pembangunan orde baru...

Diorde lama kan kabinet selalu tumbang kemudian ada komunisme, maka Indonesia kemudian berkiblat ke barat bahkan tahun 1967 saya dengar undang-undangnya dikoordinasikan dengan buatan Amerika, UU Modal Asing. Pada waktu itu ketua BKFRI-nya Prof Sadli. Isinya membuka Indonesia seluas-luasnya bagi modal asing, maka masuklah asing. Mereka kan sudah ada gambaran Indonesia, mana emas, mana tembaga, mana minyak, hutan. Jadi kalau mau melihat Indonesia lihat saja di Washington, di situ ada gambar Indonesia dilihat dari udara. Jadi secara ekonomi kita terbuka, secara politik kita pro barat.

Kalau reformasi sosial kita harus mengawalinya dari mana?

Dari pertanian. Jadi faktor ketiga dari reformasi ekonomi adalah menaikkan daya beli masyarakat. Dan itu erat kaitannya dengan pertanian. Kalo pertanian itu sudah diberi kesempatan mendapatkan harga yang adil, maka dapat meningkatkan daya beli. Ndak perlu ngemis-ngemis, kalo perlu nggak usah ekspor sebab negara kita bukan negara kecil seperti Singapura yang harus mengekspor.

Spesifiknya bagaimana?

Ndak, kalo dia itu sudah dapat harga yang adil pendapatannya kan tinggi ya to... sehingga terjadi permintaan terhadap barang- barang industri jadi industri itu adalah lanjutan pertanian. Yaa... memang begitu urut-urutannya, pertama kali yang diminta tentu alat-alat pertanian timbullah produsen cangkul, kalo dulu dia tidak mengenal alat-alat ini sekarang malah minta, akibatnya jumlah orang dipertanian menurun, dia pergi ke Industri., diterima di sana sebagai pekerja tapi harus pendapatannya lebih tinggi daripada waktu jadi petani.

> **"....mungkin di Indonesia sengaja dimunculkan mising the chance demi kepentingan segelintir orang."**
>
> **Dr. Sritua Arief**
> Dosen UKSW Salatiga

Tapi di Indonesia itu kan mayoritas buruh tani, land owner nggak pernah jalan...

Itu tentu ada sebabnya. Makanya, mungkin kembali pada elit lagi. Tapi kan sudah ada undang-undangnya jadi tinggal melaksanakan undang-undang agraria, cuma itu kan produk Masjumi dan PSI. Cuma yang paling getol melaksanakan itu golongan komunis, sehingga mengganggu *status quo* golongan santri dan kyai di desa-desa yang kebetulan menguasai tanah-tanah. Makanya PKI sama NU *berantem* di desa-desa.

Apakah perubahan yang dibawakan Habibie cukup substantif?

Pengaruh pikiran yang dibawanya begini, mencontoh negara-negara besar yang menikmati penjualan barang-barang bernilai jual tinggi, yaitu computer, pesawat terbang, alat-alat komunikasi dan segala macam. Jadi daripada kita mengekspor 1.000 ton kopi, lebih baik eksport 1 CN-250, nilai tambahnya kan lebih tinggi. Kalau berhasil, selain devisa masuk lebih banyak, teknologi bangsa Indonesia juga jadi tinggi karena, berhenti menunggu rombongan Habibie. Jadi nggak perlu *you* kejar, *you* pakai konteks you sendiri, misalnya teknologi tepat guna, banyak orang terserap. Inilah industri kita.

Sementara GATT itu kan produk Amerika, akibat dia tidak bisa menyelesaikan masalah neraca perdagangan dan juga neraca fiskalnya Ada *paper* dari Frederick Brekster direktur lembaga studi *International Economics Institute*, dia ke Indonesia mendampingi Clinton, yang menyatakan Amerika harus menjual ide *free-trip*, supaya barangnya laku, terutama jasa-jasa. Ini yang lebih dipentingkan daripada investasi. Paket itu ada empat; *free-trip, free flow investment, free flow services* dan hak paten. Sehingga perkembangan teknologi akan terhalang, karena sudah ada hak paten. Waktu itu saya jumpa Pak Habibie, dia nggak percaya. Saya bilang nanti kita cuma akan jadi pemegang lisensi, tidak bisa kita mencipta, kecuali Pak Habibie bisa bikin pesawat tanpa bensin, itu boleh.

Jadi menurut prediksi saya, pembayaran LN secara kwalitatif makin besar. Yang masuk belum tentu,

Kalau kamu denger kasetnya Permadi..(hahahahaha). Dia bilang sekarang arahnya kesana, tapi bukan rakyat yang revolusi, tapi yang melanggar konstitusi itu. Yang menyeleweng ini yang mendorong revolusi. Rakyat itu mana mau *violence*, tapi kalau didorong ke posisi yang semakin parah tentu dia ... Jadi ada saya tadi bikin diagram. Pagar pertama: luar negeri, yang kedua, kita dikerangkeng oleh kekuatan kuat di dalam negeri. Yang namanya massa kita tetap dalam pinggiran. Pendobrak' kan nggak ada jalan lain selain politik, nggak bisa kita imbau. Sekarang kan main himbau. Contohnya diimbau untuk kasih 25% saham pada koperasi, dibalesnya 3%. Itu kan sebenarnya melecehkan himbauan.

Kalau reformasi secara ekonomi kita percaya pada petani, kalau politik mulai dari mana?

Pertama *floating-mass* harus dihilangkan, kedua: kamu tangkap anjuran Pak Harto membikin sistim distrik, supaya pemilu jadi lebih demokratis, jadi kita gak coblos gambar tapi pilih orang. Setelah itu kita referensi ke UUD, Bagaimana kekuasaan parle-

BANTAI LANGSUNG SAJA...!"

walau kita teknologinya pesawat terbang, tapi demam teknologinya akan menyebar di semua sektor, itu dia punya obsesi. Persoalannya, lakukah itu bila bersaing dengan buatan Swedia, Kanada, Amerika Serikat? Nah, dia nggak peduli itu, padahal biaya sosialnya besar. Nggak dapat dari menteri keuangan, dia ambil dari dana reboasasi yang pembukuannya juga nggak jelas itu, akibatnya pada kerusakan hutan.

Dia kan orang teknik, jadi tidak mempersoalkan biaya. Tapi kita kan mempersoalkan biaya, terutama biaya sosialnya. Apa nggak lebih baik biayanya kita gunakan kepada hal-hal yang lebih berguna, kembali ke eksport kopi tadi. Kalau 1.000 ton kopi, kita tahu berapa banyak orang yang terlibat didalamnya, dan tak ada kandungan impornya, jadi 99% devisanya saya yakin masuk Indonesia itu harus kita pertimbangkan. Nah kalau ini kita korbankan?

Tujuan Republik Indonesia bukannya untuk mengejar Amerika dan Jepang, tapi untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Jepang mana mau karena tekstil kita juga akan terhalang masuk. Barang-barang kita, bangsa lain juga bisa produksi. Sehingga akhirnya kita lebih banyak yang keluar daripada masuk. Selain hutang LN kita juga sudah besar. Sekarang aja khan kita lebih banyak bayar daripada terima. Belum lagi ada Yendaka.

Saya tidak anti tehnologi. Saya hanya anti melakukan pembiayaan teknologi pada saat kita sedang banyak masalah. Alangkah baiknya kalau biaya itu kita lempar ke dalam, untuk mendukung ekonomi rakyat sekokoh-kokohnya dengan tekhnologi yang sederhana, membuat rakyat bisa berproduksi seefisien mungkin. Sedangkan tekhnologi kita sekarang ini *social cost*nya terlalu besar, kita menggunakan biaya dengan mengambil pembiayaan untuk proyek lain.

Selama ini rakyat itu selalu berada di pinggir. Pergantian aktor juga sebenarnya tidak membawa perubahan apa-apa. Selalu sejarah ditulis secara elitis.

Ya, jadi perubahannya harus mendasar, sistimnya yang dirubah.

Apa itu berarti harus revolusi ya?

men, kekuasaan mahkamah agung, BPK dan kabinet. Kita kunci di sana. Kalau nggak, misalnya di DPR, tidak ada lagi penunjukkan, hanya 39% yang dipilih, yang lain ditunjuk.

Sopril

BAGI YANG PERCAYA BAHWA DEMOKRASI ITU HARUS DIREBUT, ADA DATA PERJUANGAN DI TAHUN 1994 DI SEKTOR BURUH, MAHASISWA DAN PETANI.
DITAHUN 1994, TAHUN YANG BERGOLAK ADA 1126 KALI PEMOGOKAN BURUH (JABOTABEK 581, JATIM 200, SUMUT 140, JAKARTA 126, JATENG 54, RIAU 5, KALBAR 3, SUMSEL 1) 100-AN AKSI MAHASISWA (82 DI JATENG) DAN AKSI PETANI SEBANYAK 50-AN.
MAJU TERUS, PANTANG MUNDUR. SATU PERLAWANAN, SATU PERUBAHAN !

DISAMPAIKAN OLEH KRU SINTESA

ARBI SANIT :
"...KONSTITUSINYA BISA DIUBAH SAMA SEKALI"

SETELAH 50 tahun merdeka, kita menemukan kenyataan kuatnya* state *dalam proses* nation building, *apa ini masih bisa dibenarkan?

Ya, kalau *nation building*nya sendiri belum selesai, masih banyak yang perlu dibenahi. Misalnya penyeimbangan antara ikatan kepada bangsa dengan kemandirian individu dan kelompok. Banyak penguasa ingin menyelesaikan tugasnya dengan cepat, lalu menggeser pengertian persatuan jadi kesatuan bangsa. Itu dua pengertian yang besar sekali bedanya. Kalau persatuan, orang memang loyal pada bangsa tapi tidak harus mengorbankan kepentingan kelompok atau individu. Kalau konsepsi kesatuan, ikatan kepada bangsa nomor satu, yang lain boleh dikorbankan. Jadi semua orang harus satu, seragam, lebih parah lagi sentralisasi. Itu sah-sah saja dalam konsepsi kesatuan tapi tidak dalam konsepsi persatuan. Harus ada upaya menyeimbangkan ikatan kebangsaan dengan kemandirian kelompok atau individu.

Bila masalah integrasi ini dihadapkan dengan otonomi, spertinya kontradiktif ?

Otonomi itu memberi kebebasan,kewenangan kepada kelompok dan individu dan daerah untuk menentukan arah, kegiatan mereka sendiri. Tapi kalau kita pakai kesatuan, otonominya habis, kalau pakai konsepsi persatuan, otonomi bisa ditegakkan.

Jadi, bagaimana cara mencapai integrasi yang utuh dan bulat?

Saya kira yang pertama distribusi kekuasaan, kalau perlu bukan hanya pembedaan tapi juga pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Jadi kita kembali ke ajaran-ajaran Trias Politika, sebab ajaran itu sekarang tidak berjalan. Mana beda eksekutif dan legislatif sekarang? *Kan* campur aduk semuanya. Kalau kita bisa memisahkan unit-unit kekuasaan atau jenis-jenis kekuasaan, maka otonomi bisa kita tumbuhkan, itu berarti ada kekuasaan nasional dan kekuasaan daerah yang masing-masing jelas batasnya.

Berarti kita harus menjalankan* Trias Politika *secara murni?

Ya tidak perlu secara murni. Tapi kita harus lebih banyak meningkatkan kehidupan kenegaraan dan kekuasaan kenegaraan kita ke dalam Trias Politika, sebab tanpa itu kita bisa acak-acakan.

Soal eksekutif yang tampak dominan terhadap legislatif?

Ya ini penyakitnya konstitusi yang tidak menjelaskan apa batas- batas eksekutif dan juga penyakit-penyakit struktural lain seperti birokrasi yang berkuasa, apalagi militer. Jadi tidak ada batas- batas dan pemisahan-pemisahan. Sebab birokrasi itu tugas utamanya tidak berpolitik, tapi dengan acak-acakan mereka berpolitik.

Mungkin masalahnya terletak di aspek kultural?

Masalahnya bukan hanya kultural, masalah struktur justru lebih berat daripada kultur. Kultur itu diperalat ole suktur. Maksudnya begini, karena stukturnya sentralistis, maka kecenderungannya sentralisasi pula kalau birokratnya yang berkuasa, dimana-mana begitu kan? Untuk melegitimasikan bahwa sentralisasi dan birokrasi itu sah, di*iming-iming*kan nilai- nilai budaya yang mendukung birokrasi. Kan banyak nilai- nilai budaya kita, banyak info, mana yang dipilih? Nah yang memilih itu struktur, untuk melegalkan struktur yang ada. Nah sentralisasi dan birokrasi yang ada memilih budaya gotong royong, musyawarah mufakat, stabilitas, sentralisasi. Nah itu juga kultur yang dimiliki nenek moyang kita dulu.

Apa itu bukan semacam Jawanisasi?

Ya, kebetulan struktur yang banyak dipakai sekarang lebih banyak cocok dengan budaya Jawa.

Kaitannya dengan rejim yang berkuasa sekarang?

Justru itu, rejim sekarang kan dilatarbelakangi dan terdiri dari birokrat, militer maupun sipil. Yang mendukung tatanan yang diimpikan struktur yang sekarang, adalah pikiran-pikiran kemasyarakatan yang berasal dari Jawa. Jawa itu ya sentralisasi. Sejak jaman kerajaan, otoriter, paksaan itu lazim.

Di samping integrasi sosial-politik, kita juga masih punya masalah dengan integrasi budaya. Selama ini kita mencari identitas Indonesia kayak apa dan selama ini yang terjadi seakan- akan budaya Indonesia adalah budaya Jawa?

Sebenarnya memang agak susah mengembangkan satu integrasi budaya, yang lebih proporsional diantara pluralitas budaya yang ada. Sebab memang ada budaya yang dominan sifatnya, artinya budaya itu lebih matang, rinci dan tua daripada yang lain, apalagi bila budaya itu di dukung oleh satu sistem kekuasaan, seperti budaya Jawa. Di zaman orde baru ini terlihat jelas dukungan struktur yang ada terhadap budaya Jawa. Re-Interpretasi yang dipakai penguasa dipaksakan kepada rakyat. Misalnya 36 butir Pancasila, itu hampir semuanya berasal dari Jawa, lalu di P-4 kan, itu kan Jawanisasi namanya. Mungkin itu bisa diperbaiki dengan membuka, katakanlah kemandirian. Jadi mengembalikan pilihan-pilihan budaya itu kepada masyarakat sendiri. Yang penting pusat-pusat kebudayaan, universitas- universitas, pesantren- pesantren, kelompok-kelompok masyarakat, pengajian- pengajian, itu dibebaskan mengembangkan nilai-nilai budaya. Itu berarti kalau pun mereka tetap menerima budaya Jawa, telah melalui proses adaptasi yang cukup matang.

Dengan kenyataan sekarang ini, apakah kita masih harus mengacu ke konstitusi yang sekarang atau harus merubahnya?

Saya kira konstitusinya bisa direvisi atau justru dirubah sama sekali. Yang jelas konstitusinya harus disesuaikan dengan (kondisi) sekarang. MPR harus bisa melakukannya. Kalau diganti sama sekali mungkin berat, sebab kita harus memulai lagi UUD baru. Saya kira lebih baik yang ada diperbaiki saja, itu berarti amandemen, berarti pasal-pasal yang menekan otonomi, dan pasal- pasal yang mengutamakan kesatuan daripada persatuan, serta pasal-pasal yang menghilangkan eksistensi dan kekuasaan rakyat sehingga negara yang jadi mutlak, itu semua harus direvisi.

Amien, Iwan dan Lobrin

MERDEKA!

Adakah kekuatan magis kata "merdeka" hari ini ? Setelah 50 tahun sebagai bangsa merdeka, barangkali kita telah alpa. Atau, mungkin semakin sulit bagi kita untuk menarik garis yang tegas antara "kita" dan "penjajah". Jangan- jangan kata merdeka diam-diam yang telah tergusur oleh kata "globalisasi" yang jauh lebih bombastis.

Tapi, benarkah kita telah kehilangan pertautan dengan kata merdeka ? mungkin tidak. Hanya kita seperti tak ada waktu lagi untuk menyoalnya. Dan kita merasa telah menggenggam kemerdekaan kuat-kuat. Setiap bulan Agustus --sebagai bagian dari seremoni kenegaraan -- kita hanya sibuk melap-lapnya agar tampak mengkilat. Kita terlanjur percaya bahwa soalnya adalah : bagaimana mengisi kemerdekaan.

Seolah-olah kemerdekaan seperti bejana. Kita tinggal mengisinya -- yang kalau mungkin -- sampai luber. Ada dua hal yang kita lupakan. Pertama, kemerdekaan telah kita ubah menjadi sekedar kata benda. Kedua, perumpamaan sebagai bejana sesungguhnya menyiratkan kemungkinan untuk retak bahkan bocor. Sebagai kata benda kemerdekaan adalah realitas yang terberi.

Padahal, makna kemerdekaan menyimpan di dalamnya keperihan, penderitaan juga darah. Karenanya, kemerdekaan, tak lain, perjuangan yang tiada putus-putusnya melawan realitas sebaliknya yakni ketidakmerdekaan. Ia tak ubahnya sebuah jalan panjang penebusan.

Barangkali persamaannya dengan bejana bahwa kemerdekaan bisa retak, bocor atau dirongrong oleh banyak kekuatan. Dengan kata lain kemerdekaan bukanlah momen yang statis. Dan tidak kebal dari kekuatan yang hendak memberangusnya. Karena itu, ia setiap saat menjadi calon korban. Celakanya, seperti kata Albert Camus ketika " kemerdekaan dibunuh, ia tidak pernah sendirian." Kemerdekaan memang telah menjadi ruh yang mengidupi banyak bagian dalam masyarakat. Kendati, kita tetap yakin kemerdekaan akan senantiasa menjadi kebutuhan dan ketidakmerdekaan selalu menghadang. Kemerdekaan dalam bentuknya yang paling dasar --barangkali juga paling gampang dilanggar di negeri ini -- adalah kemerdekaan berbicara dan menyatakan pendapat. Pelbagai bentuk represi dari kemerdekaan ini tampak dari kasus : pembreidelan terhadap beberapa media, "recalling" terhadap wakil rakyat yang vokal, pengadilan terhadap sikap kritis mahasiswa dan seterusnya. Kemerdekaan berbicara dan menyatakan dan menyatakan pendapat sesungguhnya menunjukkan keutuhan hubungan kita dengan kebenaran. Toh, kita tahu, kebenaran terlalu besar untuk digenggam sendirian.

Tanpa kemerdekaan berbicara dan menyatakan pendapat, yang ada hanya penindasan, penghisapan dan pembunuhan harkat manusia. Karena itu, kemerdekaan berbicara bukan kebutuhan segelintir elit. Karena itu, kemerdekaan berbicara bukan kebutuhan segelintir elit. Ia juga bukan kemewahan bagi kaum bawah. Kemerdekaan adalah pengakuan paling dasariah dari martabat manusia untuk berikhtiar bersama- sama menemukan kebenaran. Hanya dengan kemerdekaan bersuara, maka kebenaran tidak pernah bisa dipaksakan. Slogan- slogan bisa dipertanyakan dan utopia politik bisa digugat.

Ketiadaan kemerdekaan bersuara berarti pula hilangnya daya kritis masyarakat. Padahal, daya kritis masyarakat sangat dibutuhkan bagi kukuhnya semua pilar penyangga bangunan sosial. Penggumpalan kekuasaan yang cenderung merepresi kemerdekaan berbicara telah mengkorupsi nilai- nilai dari martabat kemanusian. Bahkan suatu saat ia bisa menjelma menjadi bom waktu yang bisa meluluhlantakan bangunan sosial. Sekali lagi, tanpa kemerdekaan berbicara dan menyatakan pendapat, daya kritis masyarakat menjadi sesuatu yang masuk akal.

SEOLAH-OLAH KEMERDEKAAN SEPERTI BEJANA , KITA TINGGAL MENGISINYA, KALAU MUNGKIN SAMPAI LUBER

Memang kemerdekaan bukanlah hadiah yang diberikan oelh negara atau penguasa. Tetapi, ia hak milik yang harus diperjuangkan setiap hari oleh semua orang dengan tetap merawat kebersamaan. Acapkali kemerdekaan ditolak pertama- tama justru bukan karena hak-hak istimewanya, melainkan kewajiban-kewajibannya yang melelahkan. Karena itu, kemerdekaan adalah sebuah resiko.

Dengan merayakan perbedaan pendapat akan semakin mendekatkan pertautan kita dengan kebenaran. Yang berarti memberi spasi bagi tumbuhnya dialog. Juga, kemungkinan- kemungkinan baru untuk menyelesaikan konflik bisa dicari. Bukankah penyair Toto Sudarto Bachtiar pernah mengingatkan kita dalam sajaknya, *Kemerdekaan adalah laut bagi semua suara.* S***

DOK. SWARA
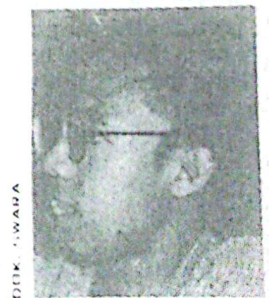
Budi Irawanto
Mahasiswa Komunikasi UGM dan staf YIER (Yogyakarta Institute of Education Research)

...DAN SANG CUCU

Bisnis anak pejabat digugat. Memang terkesan terlambat, Kunio Yosihara, Yahya Muhaimin, Richard Robison, Alexander Irwan dan sejumlah pengamat ekonomi politik lainnya, dalam sejumlah buku maupun lusinan artikel, sudah memblejeti secara panjang lebar super aktifitas bisnis anak pejabat yang dipimpin oleh PPP (Putera Puteri Presiden). SINTESA Edisi 08 tahun 1992, pernah mengangkat persoalan ini di rubrik "Aneka" dengan judul "Kekaisaran Anak Keturunan". Tetapi, kerajaan bisnis Soeharto yang dipaparkan masih sampai pada generasi kedua yaitu generasi anak-anaknya. Kali ini SINTESA akan melengkapi lika-liku bisnis "Cendana" yang ternyata sudah sampai generasi ketiga, generasi sang cucu.

BISNIS KELUARGA

Menyoal aktivitas bisnis keluarga Soeharto sungguh bukan sesuatu yang lumrah di Indonesia. Dalam diskusi yang bersifat tertutup sekalipun, jarang yang berani menyoroti sepak terjang Keluarga Nomor Satu itu. Selain resiko represi, membicarakan bisnis dinasti Soeharto juga akan berdampak "pencaplokan" --terutama bagi pengusaha. Ini terjadi, saat seorang pengusaha ditanyai jurnalis tamu tentang praktek bisnis Soeharto, mula-mula ia menebar pandang ke sekeliling restoran, kemudian merendahkan suara, barulah ia menjawab, "Jika terdengar Anda membicarakan mereka, mereka akan mendekati bisnis Anda dengan penuh minat. Dan, sekonyong-konyong, mungkin saja Anda mendapati diri Anda berhadapan dengan mitra tanpa investasi."

Sebagai sebuah dinasti bisnis terkaya di Asia, keluarga Soeharto hanya dapat disaingi oleh Sultan Brunei. Demikian tulis Hans Vriens dalam *The Grandson Also Rises*". Argumen itu sangat beralasan, jika dilihat dari aktifitas anak-anaknya, saudara dekat, dan konco-konco di sekelilingnya. Khusus anak-anak Presiden misalnya, kini tak lagi berkutat dengan bisnis kecil-kecilan. Mereka sudah merangsak memasuki kontrak multi miliar dollar. Peran utama mereka dalam proyek semacam itu, kerap kali berupa joint venture dengan investor asing, adalah sebagai fasilitator. Mereka "cuma" mengutip '*fee*' atau prosentase kepemilikan sebagai imbalan bagi pihak asing yang mendapat akses kontrak, perijinan dan pemasaran. " Adalah prosedur standar yang lumrah bila anak-anak itu tidak membayar uang dalam joint venture mereka dengan perusahaan asing. Pembayaran mereka berwujud pengaturan persetujuan pemerintah," kata seorang pengacara Jakarta yang pernah menyusun draft beberapa perjanjian joint venture anak keturunan Soeharto.Aktivitas semacam itu membawa akibat : dua generasi pertama dan empat generasi kedua anggota keluarga Soeharto pada tahun 1993 masuk pada lingkungan keluarga pribumi (bukan Cina) termakmur menurut majalah Info Bisnis. Konglo-merasi mereka berkisar diantara kepentingan korporasi pa-ling gemuk milik negara.

SEBAGAI DINASTI BISNIS TERKAYA DI ASIA, KELUARGA SOEHARTO HANYA DAPAT DISAINGI OLEH SULTAN BRUNEI.

BISNIS CUCU SULUNG

Meski hampir tak seorang pun memperhatikan, dan tidak menjadi headline surat kabar-surat kabar Indonesia yang sangat populer dengan sikap hati-hatinya, kini Indonesia --yang berusia setengah abad-- mendapat kado istimewa berupa tampilnya generasi ketiga bisnis keluarga Soeharto. Ari Haryo Wibowo --cucu tertua Soeharto-- telah mengibarkan bendera perusahaan induk miliknya yang ekpansi bisnisnya melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Menurut standar bisnis Keluarga Cendana, yang dimiliki Ari itu masih terbilang kecil, hanya enam anak perusahaan yang bernaung di bawah Perusahaan ARHA (Ari Haryo Wibowo). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan perusahaan milik kebanyakan orang lain, bisnis cucu Soeharto ini adalah bagian dari konglomerasi yang sangat menggurita.

Pemilik sekaligus pendiri yang masih muda belia ini, walau memulai kiprah bisnis dua tahun silam, memiliki rencana jangka panjang yang ambisius bagi ARHA Group. Ari berniat terjun dalam pembuatan kapal, perkebunan kelapa sawit, pengolahan minyak kelapa sawit, telekomunikasi, pariwisata, konstruksi landas pacu bandara, kanal dan pabrik pipa fiberglass. Sejauh ini bisnis utamanya baru pada tingkat memasok aneka jasa dan material bagi BUMN. Ari, putra sulung Sigit Harjojudanto -- yang hobi menyanyi ini-- adalah cucu pertama Presiden yang memancangkan konglomerasi miliknya sendiri. Rencana dan ambisinya boleh jadi terkesan mengada- ada bagi bocah hijau dua puluh empat tahun, tapi siapapun akan mengubah kesannya bila melihat bahwa kakeknya secara pribadi yang memberi persetujuan tiap lisensi investasi asing di Indonesia(total *in-flow* tahun lalu diperkirakan mencapai $ 22 milyar).

"Masa depan ARHA Group bukan main cerahnya," Demikian Wilson Nababan, presiden direktur PT CISI Raya Utama, biro jasa informasi kredit terbesar di Jakarta. Dalam laporan konfidensial untuk para klien Nababan mengatakan, " Berkat relasinya yang luas dengan pemegang kekuasaan politik disini, ARHA group dapat dengan gampang menggaet kontrak, terutama sekali di sektor pemerintah. Penilaian semacam ini bisa menjelaskan mengapa ba-nyak pemodal kakap sangat bernafsu menjalin kerjasama dengan Ari. " Sumitomo Group (Jepang) menyatakan kesediaannya mendukung ARHA Group dalam mencapai targetnya," ungkap seorang analisis keuangan di Jakarta. Artinya, tidak lama lagi ARHA Group bakal merangkul bank terbesar di dunia.

Bisnis Ari yang minim pengalaman ini, dimulai tahun 1991 dengan mendirikan PT Arha Wisanto Invesco (AWI) bersama Emir Baramuli --putra A. Baramuli yang terkenal karena membongkar Kredit Macet Edy Tanzil-- . AWI yang belum genap empat tahun telah berubah total menjadi holding company yang menaungi 6 anak perusahaan. Melalui PT Gading Mandala AWI kini akan memulai menggarap mega proyek pipanisasi air minum sejauh 120 kilometer dari sungai Mahakam ke Bontang dengan nilai investasi sebesar US$ 140.

PUN UNJUK GIGI !

Lewat PT. Arvesco Ikabina Eindo, AWI kini juga menggarap pembangkit listrik berkekuatan 200 megawatt di Padang Sidempuan Sumut yang investasinya mendekati US$ 300 juta Untuk proyek ini, konon cucu Presiden ini melibatkan EBASCO sebuah perusahaan Amerika yang bergerak di medan perlistrikan. AWI juga menguasai hampir 50% distribusi obat-obatan Cina. Melalui PT Arvesco Husada, bisnis distribusi obat-obatan dari negeri Mao Zedong, AWI memiliki omzet bulanan antara 3 sampai 4 mliiar.

Di luar sukses AWI, Cucu sulung Presiden ini juga masih memiliki lima holding company lainnya yaitu PT. Arha Wisanto Group, PT. Arista, PT. Arha Puja Group, PT. Puja Group, PT. Arsentra, serta PT. Arbamass. Lewat PT. Arsentra, Anak Suluing Sigit harjodunanto ini, juga meraup keuntungan lewat bisnis mengoperasikan telepon umum koin. Ada sekitar 20.000 pesawat alat komunikasi yang dikuasai. Dahsyatnya, Ari memperoleh 30% dari total koin yang dilumat alat bicara tersebut. Sementara lewat PT Arbamass, Ari mampu meraup 41,41 milyar rupiah setiap tahunnya lewat bisnis stiker yang ditempelkan pada setiap minuman yang mengandung alkohol.

Di luar *holding company*, Ari --keponakan kesayangan Tommy Soeharto-- juga menguasai perdagangan daging dan es batu di wilayah Jakarta. Bukan itu saja, bersama Penerbit Ganeca Bandung, menyuplai buku-buku pelajaran sekolah dari berbagai tingkatan.

Bisnis cucu Presiden , sebagai sebuah fenomena dia sangat spektakuler. namun, tetap saja jejak langkahnya mirip dengan putera-puteri Presiden sebagai pendahulunya yang mampu secara *sim salabim* -- sekejap membangun imperium bisnis. Naga-naganya, bisnis Ari akan mengikuti route bisnis papa, oom serta tante-tantenya, yang menguasai ladang bisnis di mana-mana.

ANTARA MALAPETAKA DAN BERTAHAN

Banyak pengamat yang meyakini bahwa rakyat akan melakukan balas dendam terhadap anak- anak itu setelah Soeharto tidak lagi menjabat sebagai presiden. "Mereka akan ditendang dari pentas," seru seorang bankir Indonesia di Jakarta yang murka. "Tak seorang pun membutuhkan mereka berikut konglomerasi omong kosongnya lagi.

Betulkah demikian? Masih belum pasti. Karena, faktanya tidak semua orang melihat adanya malapetaka yang menyongsong anak-anak dan cucu Soeharto. Makin banyak yang meragukan, bahwa koalisi super kokoh antara konco-konco etnis Cina dan dinasti Soeharto bisa ditumbangkan tanpa revolusi. "Jelas, jelas sekali jika rakyat marah jika segelintir kelompok secara mutlak mengontrol ekonomi kita," kata seorang pengamat keuangan Indonesia. "Tapi boleh jadi mereka terlalu kuat untuk disingkirkan begitu saja. Seperti Filipina, setelah terjungkalnya Marcos, kerajaan bisnis kerabat Soeharto akan hidup lebih lama daripada Soeharto sendiri."

POHON BISNIS ARI SIGIT SOEHARTO

HOLDING	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG USAHA USAHA	KERJASAMA	INVESTASI	KETERANGAN
1.ARHAWISANTHO INVESCO	PT. Bontang Tirta Sejahtera	Pipanisasi Air Minum, 120 KM dr S.Mahakam ke Bontang	PT.Ganding Mandala Utama	US$140 juta	Akhir 1995 beroperasi
	PT. Arvesco Ikabina Esindo	PLT Batubara 2 X 100 MW di Padang sidempuan Sumut	Ebasco (USA)	US$300 juta	
	PT. Arvesco Husada	.Pemasaran Obat-obat Cina	--	--	Nilai penjualanRp.3-4 miliar
			--	--	
	PT. Arvesco Internusa Engineering	Konsesi Penambangan Pasir	Perusahaan Taiwan	-	Izin Baru Keluar
		Reklamasi Pantai Utara Jakarta (2000ha)	--	--	--
	PT. Arvesco Invesco	Pembebasan Lahan untuk Modern Land Tangerang	--	--	Telah berjalan 2 tahun
	PT. Arvesco Ganeca	Penerbitan Buku	PT. Ganeca	--	Telah berjalan
	PT. Arhariandry Fiber Glass	Pabrik Fiber Glass di Surabaya	--	--	Telah berjalan
	PT. Arhatel Utamindo	Supplier Telkom khusus box telpon umum	--	--	Telah memasok 20.000 box
	PT. Arvesco Handayani	Refinery	--	--	--
	PT. Arvesco Limpah Sejahtera	--	--	--	Belum beroperasi
	PT. Arvesco Korintrada Agrotama	--	--	--	Belum beroperasi
2. ARBAMASS	PT. Arbamass Multi Invesco	Labelisasi Minuman Keras	--	--	--
	--	Eksportir CrudePalm Oil	--	--	--
	--	Penerbangan	--	--	--
		- Ground Handling		US$ 100 juta	Proposal sudah masuk
		Airport di Jakarta, Surabaya, Batam	--	--	
		-Sekolah Penerbang	Pilatus (USA)	US$ 80 juta	Proposal Sudah Masuk
3. ARHASENTRA	--	Supplier PLN	--	--	--
4. ARHISTA	--	Telekomunikasi	--	--	--
5. ARHAPUJO GROUP	--	--	--	--	--
6. ARHAWISANTO UTAMA	--	--	--	--	--

SUMBER: PROSPEK, 10 APRIL 1995

Disadur dari tulisan Hans Vriens , *"The Grandson A lso Rises"* ASIA, INC Edisi Maret 1995, dan berbagai sumber lainnya

SEKTARIANISME DALAM WAC

Pada perkembangan paling mutakhirnya saat ini, kapitalisme telah menjadi kekuatan besar yang, dalam bahasa Boudrillard, secara mencengangkan sanggup membentuk realitas-realitas maya dan terbalik. Dalam jala dunia *hyperrealitas* inilah, dunia ditransformasikan secara menyeluruh, dan kesadaran manusia, termasuk kesadaran tentang *Yang Absolut* mengalami pembentukan ulang. Ironisnya, hasil transformasi tersebut mendudukan manusia menjadi sekedar pantulan dari realitas- realitas palsu yang, secara suksesif dan sangat gencar, diparadekan melalui kesan-kesan dalam media informasi massa. Manusia dikumpul-satukan dan lantas dicerai-beraikan menjadi serpih-serpih tanpa kedaulatan otonom pada dirinya sendiri.

Lenyapnya kedaulatan subjek manusia seperti itu berarti juga susutnya sebentuk sistem pemaknaan hidup, legitimasi transendental atas subjektivitas manusia di hadapan realitas, yang semula sanggup memberikan seperangkat acuan nilai normatif bagi pelbagai bentuk perilaku. Agama sebagai sistem nilai dan makna dengan sendirinya mulai kehilangan fungsi sosialnya. Sebab posisi agama sebagai keharusan fungsional, seperti keyakinan Durkheim, dewasa ini mulai digeser oleh superioritas saintek yang menghasilkan ideologi-ideologi yang lebih lembut, seperti *soap-opera*, film kartun, sinetron, komedi atau serbuan informasi lain yang sanggup mengimplosikan jagat raya.

Posisi fungsional agama yang semula merupakan keharusan kolektif dihempaskan ke sudut terpencil dunia privat masing- masing orang. Utopia tentang syurga dan neraka, atau ketabahan menanggungkan petaka digeser oleh hasrat akan progres serta kepuasan serentak dan akibat serta-merta. Daya kohesi sistem kepercayaan berantakan dicabik serba-neka informasi yang sanggup menghadirkan dunia secara sangat cepat langsung di depan mata, tanpa interaksi fisik dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Secara telak citra telah membungkam aneka seruan dan pekabaran ideologis. Dunia menjadi transparan sekaligus nmembeku. Tanpa puisi masa silam dan suspensi : sebuah sistem kesukariaan. Dengan konsumsi tinggi, syurga ditarik turun ke bumi dan seluruh hasrat bisa dilepaskan tanpa kendali.

DOK. SETRAJANA

Hikmat Budiman
Alumnus Fisipol UGM,
Mantan Litbang KPALH Setrajana

Transformasi radikal seperti itu, akhirnya menyisakan semacam ruang hampa makna pada spasi kesadaran manusia modern yang terlanjur terjebak dalam keruwetan silang-sengketa kesan- kesan dari dunia hyperrealitas tadi. Manusia modern hanya mencari dan terus mencari kepuasan tanpa batas, kerinduan tanpa pelipur dan lantas telak ditikam kesepian dalam gaduhnya riuh-rendah informasi yang, seperti dihayati Lyotard, '*over- loaded*', *mbludak* centang-perenang. Di pihak lain, serbuan mahagencar rasionalitas instrumental proyek modernisasi semesta, habis-habisan menumpas seluruh pesona masa silam, mitos dan agama. Sejak dini Weber telah mengingatkan hal ini dalam tesisnya yang termashur tentang *disenchanment of the world* (sirnanya pesona dunia). Kepercayaan yang akhirnya bersifat mitis pada rasio, itu telah merontokkan tindakan-tindakan penuh makna dalam agama.

II

Perpaduan kapitalisme dan pendewaan atas rasionalitas instrumental membentuk wacana modernitas sebagai sebentuk proyek hegemonik yang keras tanpa ampun. Tak ada lagi tempat untuk berlindung dari prahara. Bahkan negara tidak lebih dari sekedar sebuah institusi terbesar, yang jalannya dibimbing oleh mekanisme kapitalisme berikut aparat-aparat kontrol hegemoniknya. Privatisasi sensibilitas keabsolutan dibarengi pula oleh pengkooptasian lembaga-lembaga keagamaan untuk digabungkan pada struktur kekuasaan negara. Maka munculah agama resmi yang hegemonik. Agama hegemonik ini pada dasarnya merupakan fungsi dari kekuasaan hegemonik yang lebih besar, negara. Sementara negara adalah instansi kekuasaan dari mekanisme kapitalisme global yang dengan gemilang berhasil meraih posisi hegemoniknya selepas Perang Dunia II.

Sebagai kekuatan atau kekuasaan hegemonik, wacana kapitalisme senantiasa melakukan intervensi pada basis kesadaran untuk menerima standarisasi. Sebab standarisasi merupakan mekanisme penting bagi tegaknya dan terpeliharanya kekuasaan hegemonik itu. Mekanisme tersebut, antara lain, berlangsung melalui tiga etape yang saling terkait. Ketiganya adalah interpretasi, moral dan *power*.

Melalui tahapan interpretasi penafsiran diseragamkan sehingga definisi realitas sosial yang terbentuk adalah legitimasi bagi *status quo* yang ada. Dalam batas ini, intervensi kesadaran antara lain juga dipaksakan via *linguistic of power*. Sementara dengan moral, intervensi dilakukan guna membakukan postulat-postulat normatif atau sistem nilai, yang akan menyokong dan memberikan legitimasi bagi kekuatan hegemonik. Kemudian melalui *power*-lah seluruh rangkaian standarisasi tadi disempurnakan, untuk memaksakan penerimaan ideologis dan menumpas setiap penegasian atau visi-visi alternatif-oposisional. Produk akhirnya adalah kultur dan struktur kekuasaan hegemonik yang serba terpusat dan tunggal. Konsensus yang lahir dari satu pola negosiasi asimetris dan komunikasi monologis. Maka menjadi jelas bahwa hegemoni kapitalisme tanpa kompromi telah melakukan standarisasi segala bidang. Tidak terkecuali bidang sensibilitas keabsolutan yang juga terus-menerus digedor dan dilindas, sehingga ia hanya tinggal sekedar sebagai, meminjam term yang sangat subtil dari Peter L. Berger, *a rumor of angels*, kasak-kusuk tentang para malaikat. Agama menjadi sekedar sekumpulan keharusan yang tidak lagi real dan aktual. Sebab yang nyata dan hadir setiap hari adalah citra. Mencecap citra orang menjadi

ANA KAPITALISME MUTAKHIR

terasing dari dunianya yang nyata, sebab yang harus diacunya adalah lapis-lapis representasi dunia.

Dalam perspektif ini, munculnya sekterianisme bisa dilihat sebagai usaha menciptakan atau memanfaatkan ruang oposisi. Dengan kata lain, ia adalah visi religius sekaligus kultural suatu komunitas tertentu yang mencoba menampik dan mengelak dari kooptasi hegemonisme. Negasi atas kesepakatan-kesepakatan konsensual yang dipaksakan via proyek-proyek kekuasaan dominatif. Maka tidak mengherankan bahwa penanganan yang dilakukan terhadapnya seringkali berupa serangkaian tindakan koersif yang dihasilkan dari perpaduan antara agama resmi dan negara.

Syntalitas kelompok-kelompok sekterianisme dicirikan oleh kecenderungan asosial dan apokalipstik. Sebab *milieu* sosial yang ada justru tampil sebagai ancaman dan sumber keresahan. Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan utopia yang sanggup memberikan janji dan harapan. Kebutuhan tersebut, dalam sebagian besar kelompok sekterianistik, terpenuhi melalui *retreat* pada harapan dan janji yang termaktub dalam kitab-kitab suci. Utopia ini sekaligus dikristalisasikan sebagai ideologi, yang mengikat dan membakukan pemahaman akan nilai-nilai tertentu serta sikap terhadap realitas yang relatif sama.

...DI LAIN PIHAK AGAMA KONSTITUSIONAL TIDAK AKAN DITINGGALKAN PEMELUKNYA HANYA JIKA IA SANGGUP MEMBERI JAWABAN ATAS TANTANGAN AKTUAL KEHIDUPAN

Demikian maka sekterianisme bisa muncul baik dalam masyarakat yang sepenuhnya sekular, maupun pada masyarakat yang secara formal menolak sekularisme. Term sekterianisme sendiri sebenarnya mengisyaratkan adanya sebentuk kekuasaan (agama, negara atau bentuk-bentuk lainnya) hegemonik. Sekterianisme adalah term yang melekat dalam pola relasi dominasi. Maka para penghayat visi-visi alternatif tersebut dikategorikan sebagai *the lesser communities* dari komunitas yang lebih besar. Sampai di sini, sekterianisme tidak bisa hanya dipahami sebagai reaksi atas persoalan-persoalan agama *an sich*. Melainkan dan bahkan ia lebih sering lahir sebagai respon terbuka atas problema sistemik yang lebih luas dan kompleks, yakni problema kebudayaan dan peradaban secara keseluruhan.

Bertambah kuatnya kecenderungan ke arah sekterianisme dalam wacana peradaban mutakhir dewasa ini, dengan demikian, tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai simptom frustasi sosial dan psikologis yang melahirkan rekonstruksi utopia-utopia lama yang lantas ditahbiskan sebagai ideologi. Melainkan juga perlu dilihat sebagai suatu upaya repostulasi transendental dari pelbagai problema dan harapan hidup yang paling akhir. Ia adalah bentuk keinginan untuk menulis sejarah sendiri, dengan pertama-tama menampik standarisasi. Sekterianisme juga muncul sebagai jawaban alternatif atas *immediate interest* yang tercipta dalam kondisi dunia kontemporer. Di lain pihak, agama institusional akan bisa bertahan, dalam arti tidak ditinggalkan pemeluknya, hanya jika ia sanggup memberikan jawaban atas tantangan aktual kehidupan. Tanpa itu, yang ada hanyalah formalitas.

Persis di titik inilah, kita bisa mengarifi sekterianisme sebagai artikulasi dari kebutuhan akan model-model penafsiran dan pemaknaan yang tak terpenuhi oleh hasil standarisasi tadi. Karena itu ia juga merupakan disensus terhadap negosiasi asimetris. Reaktualisasi ritus-ritus eksotis, tendensi-tendensi purifikasi dan eksklusivisme yang selama ini melekat pada sebagian besar gerakan/kelompok sekterianisme hanya merupakan proses pencarian visi alternatif yang, karena kekurangan sumber daya dan *power*, tidak musti selalu berorientasi pada penumbangan hegemoni. Kecenderungan ke arah pemberontakan yang kerap dilakukan kelompok ini adalah persoalan lain yang tidak akan dibahas di sini.

Maka persoalannya bukanlah bagaimana menghilangkan kecenderungan ke arah sekterianisme. Melainkan bagaimana mengupayakan bersama adanya ruang dan kesempatan bagi semua orang, untuk menghayati dan menjalani sendiri hubunggannya dengan Yang Absolut. Bahwa setiap orang berhak memilih caranya sendiri dalam menghayati dunia, yang terus-menerus ditransformasikan oleh simpang-siurnya pelbagai peristiwa dan citra. Saya percaya bahwa para rasul dan nabi pun tidak pertama-tama diturunkan untuk menegakkan (lembaga) agama. Mereka dikaruniakan Tuhan sebagai *uswah*, teladan keteguhan dan keberanian hati sekaligus konsistensi tindakan untuk senantiasa melakukan negasi-oposisional terhadap hegemonisme tafsir tentang "Tuhan- kebenaran-dunia". Mereka adalah para pencetus visi religius dan kultural alternatif yang dengan sadar melakukan disensus permanen dan lantas merobek integritas sebuah tatanan, dan, secara dialektis melakukan reintegrasi tatanan baru. Maka Muhammad SAW pun memilih gua Hira sebagai ruang oposisi terhadap hegemoni kekuasaan kaum Jahiliyah.

Sesungguhnyalah, di dunia ini selalu saja ada ruang untuk beroposisiyang menganga laksana kerinduan langit malam pada purnama.***

MAHASISWA DIHUKUM KURIKULUM?

Haramnya politik di kampus menumpulkan kepekaan sosial mahasiswa. Padahal itu syarat mutlak kepemimpinan. Dulu dijanjikan, bila mahasiswa tekun belajar, otomatis mereka akan punya leadership yang bagus. Kenapa hasilnya malah terbalik?

Mahasiswa cerdas dan tanggap mungkin kini cuma tinggal dalam teori, buku sejarah atau rumusan muluk berita negara. Yang biasa terlihat kini adalah mahasiswa, tak beda dengan orang muda lainnya: santai, suka-suka dan agak canggung. Canggung terhadap lingkungannya sekaligus bingung dengan hari esoknya. Padahal dulu mahasiswa sangat sensitif. Bukti terkuatnya adalah gencarnya aksi-aksi mahasiswa menegakkan orde baru. Tapi kini? Anda bisa lihat sendiri.

Tertuduh atas menumpulnya kesadaran mahasiswa ini adalah sejak diharamkannya politik praktis di kampus dengan datangnya NKK/BKK. Tapi menteri P dan K waktu itu, Dr. Daoed Joesoef, sang pencetus NKK/BKK, yakin bahwa mahasiswa yang tekun belajar adalah pilihan terbaik.

Kurikulum ibarat kompas dalam suatu proses belajar mengajar. Kurikulumlah yang akan menentukan patokan merah hitamnya dunia pendidikan, termasuk pembentukan kesadaran peserta didiknya. Dalam pelaksanaannya, kurikulum seringkali mendapat hambatan, bahkan sering kehilangan aspek yang *seharusnya* mendukungnya, langsung maupun tidak. Kendala yang pertama dan mendasar adalah terlalu seringnya pergantian kurikulum. Pergantian ini biasanya merupakan "bonus" pergantian "seorang" **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan** di negara kita yang tercinta ini. Ini tentu mengancam konsistensi dan tujuan jangka panjang dari sistem pendidikan yang diberlakukan di Republik ini.

Korban dari pergantian kurikulum ini misalnya, di dunia pendidikan tinggi adalah penghapusan beberapa mata kuliah dan bahkan tidak jarang beberapa program studi. Alasannya karena program studi yang bersangkutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan keilmuan. Untuk kasus seperti ini, pertimbangannya adalah jangan sampai mengorbankan mahasiswa yang telah terlanjur memilih suatu program studi (*Wawasan*, 31 Maret 1995).

Perubahan kurikulum sebenarnya dapat juga memberi dampak positif bagi proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Misalnya menanggapi kasus munculnya tuntutan untuk perubahan kurikulum di Jurusan Sosiologi Fisipol UGM, **Dr.** Nasikun, dosen Sosiologi, mengemukakan kurikulum yang dibuat tahun 1971 dianggap sudah tidak lagi dapat menjawab tantangan-tantangan perkembangan masyarakat dan lebih- lebih perkembangan teori. Ini dapat membuktikan bahwa perubahan kurikulum sebenarnya lebih tepat apabila dilaksanakan ketika kurikulum sudah tidak dapat menjawab tantangan riil yang ada, bukan dilakukan tiap ada pergantian menteri P dan K.

PERANAN DOSEN DAN MAHASISWA

Selain terlalu gampangnya kurikulum bertukar isi, kendala lain bagi pendidikan datang dari *skill* dosen dalam menghantarkan mata kuliah. Memang tidak bisa disembunyikan lagi, bahwa banyak mahasiswa yang mengeluh mengenai cara dan sistem seorang dosen dalam membawa mata kuliah. Dan itu harus diakui dapat berpengaruh pada hasil dari proses belajar mahasiswa itu kelak, yang lebih jauh dapat menggagalkan arah dan tujuan dari diberlakukannya kurikulum. Hal ini diakui juga oleh Dr. Nasikun, yang berpendapat bahwa apabila kualitas dan kuantitas dosen tidak memadai, kurikulum macam apapun tidak banyak artinya. Pendapat serupa dikemukakan **Wisnu** (Komunikasi '93), suatu proses belajar mengajar yang kurang berhasil --kalau tidak mau dibilang gagal-- dimungkinkan oleh dua hal, yaitu kurikulumnya yang tidak baik, atau pengajarnya (dosen) yang tidak baik. Dalam artian tidak memenuhi kapasitas secara normatif.

APABILA KUANTITAS DAN KUALITAS DOSEN TIDAK MEMADAI, KURIKULUM MACAM APAPUN TIDAK BANYAK ARTINYA

Seringnya dosen *mangkir* mengajar, atau kadangkala dosen yang hanya mampu memberikan muatan ilmu yang minim dari mata kuliah yang diajarkannya, membuat mahasiswa tidak mendapatkan kandungan ilmu yang maksimal seperti yang diharapkannya. Inilah yang dikeluhkan oleh A'an, dan --tambahnya-- ini menciptakan *gap* yang sangat lebar antara ilmu yang harus diterima oleh mahasiswa dan ilmu yang diberikan dosen-dosen. Kadangkala ini membuat mahasiswa merasa apa yang ia terima dari bangku kuliah *gitu-gitu aja*, terlebih lagi dengan adanya kepadatan kurikulum yang dirasa cukup memberatkan mahasiswa. Dan parahnya, ini membuat mata kuliah-mata kuliah yang diajarkan terasa membosankan, dan hanya membahas kulit luarnya saja, ini dirasakan oleh A'an dan Wisnu di jurusan mereka masing- masing.

Tapi tentu saja dosen-dosen tidak mau disalahkan begitu saja. Misalnya menurut **Dr. Bambang Setiawan** ketua jurusan Komunikasi, adalah tugas dan kewajiban dari mahasiswa sendiri untuk lebih memperdalam mata kuliah yang diterimanya dari bangku kuliah, bila perlu secara swalayan. Bagi mahasiswa sendiri, memperdalam pelajaran ternyata sangat sukar, banyak kendala yang menghadang. Misalnya sistem kredit semester (SKS), yang menggiring mahasiswa untuk pragmatis, hanya berorientasi pada pengumpulan jumlah kredit semester, dan pencarian nilai yang setinggi-tingginya, dengan cara menelan apa saja yang diterima dari dosen, serta menjawab pada waktu ujian. Ini membuat mahasiswa kehilangan daya kritis dan kreativitasnya, dan itu sangat terasa pada saat sekarang ketika iklim dialogis mulai ditumbuhkan oleh dosen dalam cara pengajarannya. Mahasiswa yang diajak untuk berdialog tidak mampu mengkritisi permasalahan-permasalahan yang dilontarkan oleh dosen yang bersangkutan.

Iklim tidak dialogis ini juga diakui oleh Dr. Nasikun, dan ia mengatakan bahwa hal ini terjadi karena pedagogi

yang kita pilih sangat dikotomis, menempatkan dosen serba tahu sebaliknya mahasiswa serba tidak tahu. Klaim ini yang membuat mahasiswa menjadi rentan dan tidak responsif. Menurut A'an, iklim ini terjadi karena bila ada mahasiswa yang ingin aktif berdialog dengan dosen di kelas malah dianggap sombong dan *keminter* oleh teman-temannya. Ada juga mahasiswa yang enggan mengemukakan pendapatnya karena takut apa yang dia ungkapkan akan menyinggung dosen, dan terkena sanksi akademis yang cenderung bersifat sentimental. Ini disebabkan karena memang ada dosen yang tidak suka jika mahasiswa berbeda pendapat dengannya, jadi mahasiswa secara psikologis merasa diharuskan menerima saja apa yang diberikan dosen tersebut agar *aman* dan nilai tidak menjadi buruk.

Masalah lain adalah tidak transparannya pemberian nilai pada mahasiswa, terutama ujian. Sebab mahasiswa kadangkala merasa bingung, ketika ia merasa mampu mengerjakan ujian suatu mata kuliah, tetapi nilai yang keluar mengecewakan. Demikian pula sebaliknya, ada yang merasa sangat pesimis ketika mengerjakan ujian suatu mata kuliah, tetapi nilai yang keluar sangat baik. Ini dirasakan oleh Aditya (Pemerintahan '93), yang juga dirasakan oleh A'an dan Wisnu. Solusi yang ditawarkan misalnya mahasiswa diberitahu bagaimana prosentase untuk mendapat A, B, dsb. Mahasiswa juga berhak tahu kriteria dalam penilaian, selain itu, sebaiknya dosen mempunyai bukti-bukti yang jelas mengenai hal-hal yang mendasari penilaiannya, terlebih ketika ada mahasiswa yang datang menanyakan tentang nilai yang diperolehnya. Sampai saat ini, kebanyakan dosen hanya menjawab dengan enteng "memang begitulah kemampuanmu..." tanpa memberikan bukti-bukti yang jelas. Ini yang amat mengecewakan mahasiswa. Sehingga dalam langkah selanjutnya, mahasiswa umumnya lalu menghindari mata kuliah yang dipegang oleh dosen yang bersangkutan, dan mengambil mata kuliah lain yang dipegang oleh dosen yang dalam penilaian relatif lebih mudah, hal seperti inilah yang dirasakan oleh Aditya.

Jika hal seperti itu terus terjadi, maka terbuka kemungkinan tidak runtutnya mahasiswa dalam mengambil mata kuliah dari satu semester ke semester berikutnya. Dalam situasi seperti ini, dosen wali sangat diharapkan bimbingan dan arahannya, tetapi dalam kenyataannya dosen wali seringkali tidak memberikan bimbingan atau arahan kepada mahasiswanya. Dosen wali terkesan hanya sebagai seorang "tukang teken" KRS mahasiswa, lain tidak. Sebenarnya tugas dosen wali itu membantu mahasiswa mengatur mata kuliah mana yang sebaiknya diambil lebih dahulu, dan mana yang belakangan. Ini dimaksudkan agar ilmu diterima optimal paling tidak sebagai dasar pengertian atau dasar teori dari mata kuliah berikutnya. Tetapi seperti kata Wisnu, *boro-boro* untuk berdialog panjang lebar, untuk meminta tanda tangan KRS saja dosen walinya sukar ditemui. Ia juga menghimbau agar dosen wali menyediakan sedikit waktu bagi mahasiswanya untuk berdialog secara panjang lebar. Sehingga --bagi A'an-- itu dapat membuat hubungan interpersonal yang baik antara dosen wali dengan mahasiswanya.

KURIKULUM DAN PERMINTAAN PASAR

Dengan sistem kurikulum sekarang, mahasiswa tampak telah menguasai pelajaran. Tetapi ketika terjun ke masyarakat pelajaran tersebut kurang *applicable* di dunia kerja.

..KEWAJIBAN MAHASISWA UNTUK MEMPERDALAM MATA KULIAH, BILA PERLU SECARA SWALAYAN

Menurut **Dr. Ichlasul Amal**, dosen jurusan Hubungan Internasional, fenomena ini tidak hanya menimpa lulusan ilmu sosial, tapi juga pada lulusan ilmu eksakta. Tetapi beliau menekankan bahwa pendidikan kita memang mempersiapkan para generalis, disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan. Itulah perbedaan Universitas dengan Akademi. Meski begitu, ini tetap menjadi pemikiran mahasiswa, mereka kadangkala bingung dan takut jika mengingat ilmu yang mereka terima belum memberikan apa- apa, sedangkan tuntutan pasar di luar menginginkan ahli- ahli yang menguasai bidang-bidang praktis.

Apalagi dengan kehadiran D3 Komunikasi, bagi Wisnu itu akan lebih mengaburkan prospek mahaiswa S1. Memang ia menyadari bahwa S1 itu akan dijadikan akademisi, sedangkan D3 akan dipersiapkan sebagai praktisi. Tetapi baginya, ini akan sama saja, sebab walaupun S1 mengetahui masalah-masalah teoritis tapi tidak tahu yang praktis, itukan percuma. Dalam pandangan Dr. Ichlasul Amal, ia membantah anggapan yang mengatakan lulusan dari program profesi dapat diandalkan. Selama mahasiswa dididik untuk berpikir secara rasional dan kritis, maka ia bisa masuk mana saja. Bagi A'an kehadiran D3 komunikasi itu sebaiknya dijadikan cambuk bagi S1, untuk meningkatkan kemampuan agar tidak kalah dari lulusan D3 yang waktu kuliahnya lebih pendek.

Untuk jurusannya sendiri, A'an mengakui adanya pe- simisme diantara teman-temannya mengenai prospek pasca lulus, terlebih-lebih ketika mengetahui jumlah pengangguran yang terbanyak berasal dari ilmu-ilmu huma- niora dan sospol. Ini terjadi karena sistem pendidikan yang salah, sebab bila dilihat Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan, perbandingannya sering tidak berimbang antara ilmu eksak dengan non eksak. Banyak PTS memilih mendirikan jurusan yang non eksak karena biaya yang relatif murah. Ini yang menimbulkan makin banyaknya pengangguran-pengangguran intelektual.

LINK AND MATCH

Link and match dapat memberi rasa aman bagi masa depan seseorang dengan pendidikan yang sedang dijalaninya. Selain itu konsep ini muncul karena pendidikan yang ada kurang berorientasi, itu anggapan Dr. Bambang Setiawan. Tapi ia menambahkan bahwa dengan link and match ini tidak berarti persoalan berhasil. Bagi A'an dan Aditya, mereka sepakat bahwa konsep ini adalah konsep yang baik dan cukup menjanjikan tetapi konsep ini masih dalam batasan *lips service* saja dan belum ada usaha dari pemerintah yang secara nyata untuk mewujudkan hal itu.

Yang jelas, untuk mengurangi pengangguran dari lulusan sospol, perlu adanya perubahan kurikulum agar kurikulum dapat mengakomodasi dan mengantisipasi tantangan- tantangan yang ada di masyarakat. Dan ini perlu suatu perubahan yang substansial bukan hanya formalnya saja. Selain itu, perlu adanya suatu tekad dari pemerintah agar kurikulum yang ada itu dapat terjamin kontinuitasnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan manusia yang cerdas, kritis, dan responsif.

Iwan Pribadi dan Agung
Reportase: Evi, Linda, Mira

Saat ini, era westernisasi melanda Rusia, Cina, Vietnam dan sebagian Amerika Latin. Tetapi jika pasar- pasar "barat" ini memang ingin tumbuh, kejahatan dan korupsi harus hengkang.

TRANSISI KAPITALISME :

MASUKLAH KALAU BERANI !

Menunggu hukum identik dengan pertumbuhan yang tinggi membutuhkan lebih dari sekadar spekulasi yang gegabah. Setiap hari mesin-mesin fax berdengung, layar-layar komputer menyala dan kapal-kapal pengangkut barang berlabuh di seluruh dunia. Hari ini, prototipe dari kapitalisme modern di St. Petersburg semudah di San Fransisco. Tapi lihatlah lebih dalam apa yang tampak di permukaan dan akan terlihat perbedaan antara kehidupan ekonomi bank-bank Rusia atau Brasil dengan di AS. Bank-bank tersebut merupakan permainan tingkat tinggi yang kasar di mana keberanian dan tenaga dihargai lebih dari sekedar peraturan, hukum maupun keadilan.

Inilah garis batas kapitalisme, sebuah daerah kegiatan ekonomi baru yang memasukkan bagian-bagian dari Uni Soviet lama, Cina, sebagian Amerika Latin dan Vietnam. Korupsi dan kejahatan merajalela, kekerasan meledak terus menerus dan sistem hukum lemah. Resiko bagi kehidupan dan limbah cukup besar. Tapi kemenangan dapat memberikan hasil yang besar bagi semua yang berkecimpung di dalamnya.

Pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan lebih dari sekedar pengambilan resiko yang sembrono. A-khirnya, ekonomi *Frontier* ini membutuhkan suntikan modal yang besar dari pihak luar, baik investor-investor individu, perusahaan maupun bank. Dan untuk melompat ke tahap pertumbuhan berikutnya, perekonomian ini harus dimasyarakatkan. Ia harus memasukkan serangkaian aturan dan lembaga, mulai dari pengefektifan pengadilan sampai memfungsikan pasar-pasar uang. Sampai tahun 2000 nanti, perekonomian seperti Rusia dan Cina akan menjalani perubahan-perubahan itu.

TANDA-TANDA KEMAJUAN

Tidak semua ekonomi Frontier melalui tahap itu --seperti halnya pelanggaran hukum di Sisilia dan Columbia. Meski demikian, masih tampak tanda-tanda kemajuan. Eropa mengalami atmosfer seperti itu 5 tahun yang lalu, setelah tembok Berlin jatuh tapi kejahatan dan korupsi tetap ada. Tetapi Kitab Undang-Undang sipil yang mengatur tentang transaksi bisnis pribadi telah diperbaharui dan pasar uang terus berkembang dengan cepat.

Eropa memang jauh lebih berkembang ketimbang Cina dan Rusia. Namun ada tanda-tanda bahwa pembaharuan mulai memasyarakat di Cina dan Rusia juga. Di Cina, perusahaan-perusahaan desa --sama seperti bisnis lain, menjumpai birokrat pemerintah bila gagal memenuhi kewajibannya. Dan saat ini Rusia memiliki konstitusi baru dan Kitab UU bisnis sedang dibuat.

MUDA DAN LAPAR

Kapitalisme garis depan diperuntukkan bagi orang-orang yang paling kuat. Di AS, sebagian besar orang-orang yang tinggal di rumah dan penambang-penambang di daerah barat berusia muda dan relatif miskin, tetapi lebih terdidik dibanding rekan-rekan mereka di tempat lain. "Mereka semua adalah spekulator (*great-risk takers*)", ujar Coary D. Libecap, seorang sejarawan ekonomi di Universitas Arizona. Ada banyak usaha yang gagal, tetapi para pemenang menangguk keuntungan dengan cepat.

Tidak ada bedanya di Moskow dengan di Shenzhen. Di Rusia, orang-orang pintar sudah memulainya sejak awal 1987, ketika Gorbachev mula-mula mengenalkan reformasi. "Selalu ada keuntungan bagi penggerak-penggerak pertama," kata Simon Johnson, developer program di RJR Nabisco-Fuqua School of Bussiness di St. Petersburg, "Keuntungan paling besar diraih oleh orang-orang pertama yang menjual pisang, orang-orang pertama yang menjual komputer."

Di Cina, pembukaan ekonomi telah menghasilkan banyak cerita sukses sejalan dengan cerita-cerita kegagalan. Han Wei,yang awalnya seorang pejabat dari suatu masyarakat pertanian, memulai bisnisnya 9 tahun yang lalu dengan 50 ekor ayam. Sekarang, dia terkenal sebagai "raja ayam" Cina dan punya jaringan bisnis senilai $25 juta. Meski demikian, "Banyak naik turunnya di Cina," kata Barbara Sands, ekonom di Universitas Arizona, "banyak kebangkrutan, lalu permulaan baru dan kegagalan baru. Sejumlah perusahaan desa berhasil karena adanya seorang yang pandai. Yang lain gagal berulang-ulang."

Di Rusia, Cina dan Eropa Tengah, calon bisnis-bisnis swasta seolah-olah memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Di Polandia, 60% lapangan kerja dan *output* datang dari sektor swasta. Di Rusia, berkat cepatnya swastanisasi, 70% tenaga kerja dapat ditampung.

Bukanlah suatu kejutan kalau pengusaha- pengusaha itu bertahan tanpa hukum dan pengadilan sebagaimana yang terjadi di kalangan bisnis AS. Sepanjang sejarah, sebagian besar perdagangan dan bisnis dilakukan melalui sistem--yang oleh Mancur Olson dari Universitas Maryland disebut sebagai *self-enforcing markets*. Yaitu pasar-pasar yang beroperasi semata-mata atas dasar kepercayaan yang saling menguntungkan dan tanggung jawab pribadi. Saat ini, *self-enforcing markets* lah yang beroperasi di ekonomi frontier.

Pada saat yang sama, pengusaha pada pasar-pasar semacam itu menjalankan dan mengawasi bisnis dan partner dagang mereka seenak mereka, tanpa mempedulikan hukum. Cornelius Vanderbilt, pengusaha di New York City, pernah menulis pada rekannya yang merampas kekayaannya: "*Gentleman*, anda telah berusaha untuk menipu saya. Saya tidak akan menuntut anda, karena hukum memakan waktu terlalu lama. Saya akan menghancurkan anda."

Di bagian barat Amerika pada pertengahan 1800, para pencari emas menunjukkan dari pelanggaran hukum yang lebih lunak. Mereka menyusun sebuah sistem "pemerintahan-otonom" melalui klub- klub penambang yang menyele-

saikan masalah-masalah klaim tanah dan ketimpangan pengadilan yang relatif lebih sedikit menggunakan kekerasan. Akhirnya UU Federal mengkodifikasikan konvensi-konvensi para penambang itu.

Seringkali, pemerintah-otonom (*self-government*) seperti itu diperluas dalam keluarga-keluarga dan melalui jaringan kerja etnis. Hal ini menawarkan sebuah jalan untuk membuat ikatan-ikatan baru dan memba-ngun bisnis. Di antara kelompok besar yang berbahasa Cina, jaringan-jaringan bisnis tumbuh dengan cepat di abad ini. "Perdagangan di sektor karet, misalnya, didominasi oleh orang-orang Cina Hokian selama boom ekonomi pada 1950-an", ujar Janet T. Landa, ekonom di Universitas New York. Jaringan-jaringan kerja semacam itu --bagian dari orang-orang Cina perantauan, akhir-akhir ini telah menanamkan investasi secara besar-besaran di Cina dan negara-negara Pasifik.

> " KORUPSI ADALAH WABAH DI HAMPIR SEMUA NEGARA YANG SEDANG BERADA DI TENGAH-TENGAH ANTARA MODEL STATIS DAN MODEL PASAR. "
>
> (*Jeffrey Sachs, Ekonom Harvard University*)

Meski demikian, jaringan kerja etnis ini dapat juga membahayakan. Chechen, Azerbaijanis dan grup- grup etnis lainnya mengoperasikan sebagian dari gang-gang etnis jahat di Rusia saat ini. Pertarungan senjata di jalan-jalan demi pengawasan bisnis dan daerah adalah suatu hal yang tidak asing di Moskow, dan para bankir serta bisnismen lainnya secara rutin memperkerjakan *bodyguards* untuk melindungi mereka dan keluarga mereka.

Menakutkan. Tetapi banyak ekonom percaya bahwa elemen- elemen kejahatan di Rusia ini pada akhirnya akan menurun meski belum ada buktinya sejauh ini. "Akan lebih menguntungkan bila melakukan kontrak yang jujur dan terhormat," ramal Judy Shelton, ekonom di Institut Hoover di Universitas Stanford.

PERMULAAN YANG LAMBAN

Meski kontrak-kontrak yang jujur sudah terjadi, korupsi pemerintah dapat saja bertahan. "Korupsi adalah wabah di hampir semua negara yang sedang berada di tengah-tengah, antara model statis dan model pasar," Jeffrey Sachs, ekonom Universitas Harvard. Ia adalah penasehat bagi Polandia dan Rusia ketika keduanya mengalami transisi menuju kebijakan ekonomi pasar bebas, mengamati. Menurutnya hal yang paling penting adalah meliberalisasikan perdagangan dan mengakhiri pengendalian harga. Di Bolivia, bahkan sesudah 1985, ketika ijin tidak lagi diperlukan dalam menjalankan bisnis-bisnis tertentu, masyarakat antri menyogok untuk memperoleh ijin itu. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa ijin dan tentu saja suap-menyuap, tidak lagi penting.

Tapi bentuk pelanggaran hukum lainnya --seperti tidak adanya hak-hak harta benda yang jelas dan hukum yang mengatur segala sesuatu dari tanah sampai persamaan kepemilikianlah yang menghalangi ekonomi frontier berkembang menjadi pola-pola yang berkesinambungan dari suatu pertumbuhan. Pengusaha-pengusaha perlu meningkatkan modal di pasar-pasar daripada berhubungan hanya dengan orang-orang yang mereka kenal dan percaya, atau orang- orang yang harus mereka sogok dan takuti. Dan mereka harus punya jalan lain yang dapat disediakan/dibantu oleh sistem hukum bila transaksi finansial berjalan buruk.

Pembangunan institusi ini telah berjalan baik di Eropa Tengah. Polandia mempunyai komisi keamanan yang kuat dan peraturan-peraturan ketat yang mengatur masalah saham, pialang dan sebagainya. Saat ini, kapitalisasi pasarnya mencapai $3,5 juta. Republik Czech, dengan ekonomi yang lebih stabil tetapi dengan peraturan keamanan yang lebih lunak, mempunyai pasar yang lebih mudah berubah, dengan modal sebesar $14 juta. Lembaga-lembaga investor Eropa dan AS mempunyai kepentingan yang besar dalam perekonomian ini sebagaimana perekonomian Rusia, lantaran hukum-hukum yang mengatur keamanan perdagangan lebih belum sempurna.

PELAJARAN-PELAJARAN BERAT

Seperti halnya di semua kasus yang calon-calon pasarnya mulai tinggal landas, spekulasi yang gila-gilaan adalah hal yang wajar. Musim panas yang lalu di Moskow, rencana piramid yang diarsiteki oleh MMM kolaps dan meninggalkan beberapa orang investor--sebagian besar warga negara Rusia miskin--dengan tangan kosong. Meski demikian, kejadian-kejadian seperti itu tampaknya tidak membuat masyarakat menjadi emoh pada kapitalisme dan pasar bebas. "Masyarakat belajar melalui pengalaman tentang spekulasi yang berlebihan," kata Robert W. Vishny, ekonom di Universitas Chicago.

Lagi, sejarah menawarkan beberapa perspektif. Kekacauan keuangan adalah kejadian biasa di AS ketika pasar- pasar tumbuh di pertengahan akhir abad 21 dan awal abad 20. Peraturan dibuat tidak untuk melindungi investor dan keserakahan menular.

Sekarang desakan untuk turut serta "mesin pembuat uang" ini tidak jauh berbeda dengan di daerah-daerah perbatasan yang mempunyai pertumbuhan cepat. Dan sejalan dengan peraturan-peraturan yang bertambah baik, kesempatan berinvestasi akan semakin luas , dan semakin banyak pula orang yang berkecimpung dalam pasar. Hal itu, ditambah pengenalan efektif KUV (legal codes) yang mengatur transaksi antara pihak-pihak swasta, seharusnya akan memasukkan lebih banyak perusahaan-perusahaan investor (institusional investors) asing, terutama yang berkantong tebal.

Skandal dan kegagalan akan tetap menjadi headline. Tetapi pada awal abad 21, ekonomi Frontier saat ini nantinya akan sedang berada dalam perjalanan menuju ekonomi kapitalis modern dalam kenyataan (*reality*) sebaik tampaknya (*in appearance*).

TINGGAL LANDAS

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN KAPITALISME

(*How Frontier Capitalism Evolves*)

TAHAP 1 :

Ekonomi statis runtuh atau memudar. Pengusaha pasar gelap memperoleh keuntungan luar biasa, dan sebagian di antaranya menjadi gangster. Korupsi pemerintah menyebar (*spreads*).

TAHAP 2 :

Pengusaha kecil, seringkali dibiayai oleh pinjaman keluarga, tumbuh subur/merebak. Peraturan-peraturan dalam hukum tetap lemah, tapi masyarakat bisnis mulai mengembangkan peraturan-peraturan dagang mereka sendiri.

TAHAP 3 :

Pertumbuhan ekonomi cepat tapi sulit diukur. Pasar- pasar uang mulai berkembang, membuka tabungan-tabungan dan menarik investor-investor asing. Undang-Undang sah yang lebih jelas muncul.

Diterjemahkan oleh Yooke dari Bussines Week, Desember 12, 94

Oleh : Karen Penner in New York with Peter Galuzka in Moskow, Karen Loury Miller in Bonn and bureau report.

INDONESIA:

SETTING THE TONE FOR 1998 ?

Adakah yang menarik dalam perkembangan masalah pembangunan politik Indonesia pada dewasa ini? Presiden Soeharto masih memegang kekuasaan setelah terpilih dalam Pemilu 1993 dengan memilih Harmoko, --menteri Penerangan-- menjadi Ketua Umum Golkar, partai yang berkuasa yang menjadi instrumen setiap mobilisasi politik rejim negeri ini. Presiden juga kehilangan kekuatan kontrolnya terhadap kekuatan militer. Sebagai pemimpin tertinggi kekuatan militer di Indonesia, presiden merupakan satu-satunya orang yang menentukan perekrutan didalam tubuh militer. Institusi lain seperti DPR tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi kebijakan penentuan pimpinan ABRI. Demikianlah cara sistem politik kita bekerja.

Meskipun demikian tidak ada satupun orang dapat memahami kondisi politik Indonesia secara utuh sebab terkadang kita dibenturkan dengan kenyataan bahwa presiden mampu mengatur perubahan kapan pun dia mau. Sebagai contoh perubahan pada staff pimpinan militer, Jendral Wismoyo Arismunandar diganti oleh Jendral Raden Hartono, Kasospol ABRI. Apa implikasi politik dari perubahan yang terjadi tersebut ? Jawabannya sangat simpel: persiapan menjelang tahun 1998, dimana Soeharto akan menggunakan cara kritis terakhirnya untuk menentukan apakah dia akan terus berkuasa sampai tahun 2003 ataukah mempersiapkan transisi lunak ke era pasca Soeharto.

Dr. Afan Gaffar

IA AKAN TETAP BERKUASA... JIKA TUHAN MENGIJINKAN

Ketika jendral Wismoyo terpilih jadi pimpinan angkatan bersenjata, setiap orang memprediksikan dia merupakan orang yang akan menggantikan kedudukan Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, sebab Feisal mestinya pensiun pada tahun 1994 tetapi presiden mengambil langkah tak terduga dengan memperbaharui pola politiknya secara tiba-tiba. Biasanya dia akan memberi perpanjangan waktu bagi Panglima ABRI dan KSAD, jika keduanya telah mencapai usia 55, contohnya Benny Murdani, Try Sutrisno, dan Eddy Sudrajat.

Wismoyo adalah perwira yang sangat populer, kemanapun dia pergi, dia akan disambut dengan meriah. Penduduk setempat akan melantik dia menjadi sesepuh komunitas tradisional. Dia adalah ipar dari Nyonya Soeharto, dengan demikian orang-orang percaya bahwa dia adalah pilihan logis untuk menggantikan Feisal Tandjung. Tapi Soeharto adalah jenius dalam mengatur posisi orang-orang disekelilingnya. Daripada mempromosikan Wismoyo dia menunjuk Jendral Hartono, seorang perwira dari Jawa Timur yang juga sangat populer di kalangan umat Islam. Kenapa Hartono ? Ada dua alasan yang prinsip mengapa Presiden memilih Hartono.

Pertama, meningkatnya pengaruh BJ Habibie, menteri riset dan tehnologi yang juga memegang sekitar 30 posisi strategis di bidang ekonomi dan politik. Sekarang ini di Indonesia beredar sorotan publik tentang naiknya pengaruh "3H", yaitu Habibie, Hartono, dan Harmoko. Mereka semuanya sangat dekat dengan masyarakat politik Islam. Habibie ketua umum ICMI, organisasi yang didukung oleh hampir semua intelektual muslim kecuali Abdurrachman Wachid, ketua NU yang kontroversial. Harmoko adalah ketua dari Golkar yang hegemonik sekaligus penasehat ICMI. Setiap bulan Ramadhan, Harmoko mengunjungi pesantren-pesantren. Tahun ini misalnya, ia berkelana dari Kalimantan barat sampai Kalimantan timur dan melakukan dialog semu dengan masyarakat yang belum pernah dikunjungi birokrat dari Jakarta sebelumnya.

Kedua, Soeharto membutuhkan komunitas politik Islam baik untuk memobilisasi dukungan untuk masa lima tahun mendatang maupun untuk melanjutkan kebijaksanaan ekonomi dan politik jika ia tidak lagi berkuasa.

Sejak 1993 rakyat Indonesia terperangkap dalam perdebatan apakah akan ada suksesi atau tidak. Dr. Amien Rais, ketua PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa tahun 1998 harus ada suksesi. Ia memberikan beberapa alasan. Pertama, Soeharto telah berkuasa terlalu lama dan Indonesia memerlukan tokoh baru dengan visi yang baru. Kedua, kebijaksanaan ekonomi Soeharto terlampau memanjakan anak-anak dan keluarganya seperti juga kepada pengusaha-pengusaha keturunan Cina lewat fasilitas perijinan dan proteksi. Ketiga, tahun 1998 usia Soeharto sudah mencapai 77 tahun dan itu sudah terlalu tua untuk terus menjadi presiden. Usulan Dr. Amien Rais tersebut disambut dengan pro dan kontra. Sebagian masyarakat, terutama para aktivis politik dan mahasiswa mendukung ide suksesi tersebut. Mereka menyebarluaskan argumen- argumen Amien Rais tersebut.

Perdebatan mengenai suksesi tersebut sirna begitu saja setelah presiden mengajukan pendapatnya, bahwa suksesi harus sesuai konstitusi. Amien Rais sendiri berusaha menghindari diskusi-diskusi tentang suksesi karena sangat riskan baginya untuk mengutik-utik jabatan presiden terutama setelah Amien Rais resmi terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah.

Sangatlah menarik untuk dicatat bahwa selama lima tahun terakhir ini presiden mampu memperluas dukungan politiknya di kalangan masyarakat politik Islam. Alasannya sederhana, yaitu kebijakan Soeharto terhadap Islam sangatlah akomodatif dengan memberikan sumbangan pada semua organisasi Islam dan pusat-pusat pendidikan Islam di seluruh nusantara, dengan membangun ratusan masjid dan fasilitas Islami lainnya melalui yayasan khusus. Ekspresi umum tentang Islam di masa lalu seperti "ekstrim sayap kanan" sekarang tak terdengar lagi. Karena itu Lukman Harun, aktivis muslim yang cukup vokal dan mantan wakil ketua umum Muhammadiyah, pernah menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung Soeharto sebagai presiden seumur hidup.

Dari perspektif ini tampaknya harapan akan adanya suksesi di tahun 1998 di Indonesia sangat kecil selama Soeharto masih sehat wal afiat. Saya yakin bahwa sang presiden masih menikmati jabatannya sebagai ketua umum Gerakan Non Blok sebagaimana ia menikmati perjalanannya ke Kopenhagen untuk menghadiri konferensi PBB yang dilanjutkan dengan mengunjungi Bosnia-Herzegovina. Ia akan tetap berkuasa sampai tahun 2003, jika Tuhan mengijinkan. ***

"PRAHARA '65"

POLITIK ORDE BARU

Hampir tiga puluh tahun , malapetaka '65 berlalu. Selama rentang waktu yang demikian panjang, teka-teki yang disuguhkan --tentang siapa aktor di belakang tragedi itu-- masih belum terpecahkan. Amerika Serikat (CIA), PKI, Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, Republik Rakyat Cina adalah aktor-aktor sekaligus dalang yang selama ini dituduhkan.

Berikut SINTESA menurunkan laporan seputar silang pendapat ini. Dalam waktu dekat informasi seputar itu akan dibentang dari arsip nasional ditambah 'beberan'sumber resmi gedung putih Amerika -- yang sudah saatnya dibentang karena telah genap

berusia 30 tahun dimana itu merupakan momen pe'release'annya. Dampak hegemoni Orde Baru ternyata banyak memberi kontribusi kemandegan perolehan informasi laporan kali ini. Beberapa sejarawan handal, intelektual ataupun nara sumber yang berkompeten justru memilih diam atau lebih tepatnya "tiarap" ketika diminta keterangannya tentang peristiwa ini. Pramoedya AT dan Arief Budiman saja yang bersedia diwawancarai. Karena itu, laporan kali ini lebih banyak hasil "pontang-panting" investigasi literatur. Di bagian lain tim SINTESA juga memaparkan daftar korban pembantaian '65 dari berbagai sumber yang sering dilupakan dan sengaja dilupakan dalam membahas "prahara politik" Orde Baru.

MENCARI "GOLPISTA" enam lima

Peristiwa G-30 S '65 demikian dahsyat pengaruhnya. Terbukti, dengan banyaknya kalangan yang intens terhadap peristiwa itu. Tentu saja, lepas dari maksud dan misi politik masing- masing. Berbagai kalangan tersebut, bercerita banyak mengenai peristiwa itu. Terutama dalam menyibak misteri pelaku sebenarnya. Selain pelaku peristiwa, juga diungkap masalah motif dan berbagai teori yang mendorong terjadinya kerusuhan, yang lantas dikenal sebagai Kudeta 30 September '65.

PERCOBAAN kudeta telah ditafsirkan beraneka ragam. Susahnya, atau mungkin justru menarik, masing-masing saling bertentangan. Menurut versi Angkatan Darat, yang nota bene rezim pemerintah Orde Baru, mendakwa PKI sebagai pelaku kudeta atau Golpista G30S. Versi inilah yang kemudian terus direproduksi selama Orde Baru ini. Bahkan, sebagai bagian hegemonisasi, peristiwa ini setiap tanggal 30 September selalu diputar film G30S. Seluruh rakyat Indonesia terkena *"wajib nonton"* film tersebut. Tetapi, bagi **Ben Anderson** dan **Ruth McVey,** dua ahli yang menyajikan paper pada Januari 1966, justru ragu. Mereka menyajikan paper berisi tafsiran temporer bahwa PKI, yang kemudian dilarang, tidak memainkan peranan utama dalam peristiwa itu G-30 S. Makalah Ben dan Ruth McVey inilah, yang kemudian populer dikenal *Cornell Paper*.

Kedua pendapat yang bertentangan ini, di kalangan ilmuwan dan ahli politik barat, menjadi polemik hangat yang berkepanjangan. Perdebatan yang muncul berkisar pada keterlibatan PKI. Meski pada akhirnya kebenaran Cornell Paper itu dipertanyakan, tepatnya setelah pengadilan terhadap para pimpinan PKI itu memvonis, memang PKI terlibat dalam G-30 S. Lepas dari semua tindakan politik, yang disertai dengan tindakan represi, yang diterima para pimpinan PKI untuk --dengan *terpaksa*-- mengaku terlibat. Namun itu sama saja mengambangkan persoalan, sejauh mana sebenarnya keterlibatan PKI dalam peristiwa yang merasuki seluruh memori kolektif bangsa ini. Pengakuan itu --seperti hampir didengar semua orang --dilontarkan dua tokoh kunci Partai Komunis Indonesia, **Sjam** dan **D N Aidit**. Mereka mengatakan, PKI berperan penting dalam peristiwa tersebut. Dan, itulah senjata AD untuk menghantam kedudukan PKI. Karena menurut AD, PKI-lah, dan hanya PKI, satu-satunya pelaku peristiwa G30S.

Tapi seperti kata **John F. Kennedy**, *...jikalau politik kotor, maka puisi akan membersihkannya...* dan mirip puisi, tetapi lebih dari sekedar puisi, sejarah akan meluruskannya. Dunia intelektual tentu tidak lantas setuju begitu saja. Para penulis Makalah Cornell, --dua sarjana Amerika yang liberal-- mengemukakan hipotesa alternatif yang dirasakan sejalan dengan fakta-fakta yang telah diumumkan berkaitan dengan percobaan kudeta sampai 1966. Dikatakan, para golpista G-30 S tersebut adalah *para Kolonel Jawa* yang tidak puas, lantas kecewa, dan memberontak. Melawan para Jendral dalam kepemimpinan Angkatan Darat yang tidak mendukung kampanye konfrontasi Malaysia.

Makalah itu juga memaparkan, PKI tidak memiliki motif tertentu untuk kudeta. PKI justru menanggung untung besar dari sistem politik yang berlaku. Mendukung, atau bahkan melakukan kudeta, bagi PKI hanya menghancurkan kedudukan politik mereka. Logisnya, --lagi-lagi Cornell paper-- strategi yang terbaik bagi PKI adalah mempertahankan *status quo*. Penulis *Cornel Paper* ini mempunyai dua hipotesis yang berkaitan dengan kondisi lapangan saat sebelum dan sesudah peristiwa G-30 S itu terjadi.

Pertama, **Aidit** dibawa ke Halim untuk mencegah PKI agar tidak ikut mengeksploitasi keadaan, dan *kedua*, untuk menekan presiden agar ia mau memberi dukungan terhadap gerakan tersebut. Suatu teori lain tentang keterlibatan pihak-pihak tertentu yaitu teori tentang adanya *perwira-perwira progresif*, yang bergerak sebelum PKI, melibatkan diri dalam G-30 S. Hal ini, berkaitan dengan adanya isu perpecahan ditubuh militer. Yakni, antara para jendral di Jakarta dengan para kolonel di daerah. Terutama di Jawa. Teori lain menuturkan, kecil kemungkinan para perwira untuk menentang kepemimpinan AD tanpa persetujuan presiden. Juga pendapat, keberpihakan Soekarno pada PKI dan sikap kakunya AD dalam penolakan kebijakan presiden telah menimbulkan konfrontasi.

Lain lagi dengan **Arnold Brackman**. Ia berpendapat Soekarno memberikan ijin terhadap rencana PKI untuk melakukan gerakan melawan para jendral. Sebaliknya, **A.C.A Dake** mempertahankan pendapat berdasar pemeriksaan terhadap **Bambang Widjanarko** yang mengatakan, keinginan presiden itu hanya diutarakan kepada **Letkol Untung**. Tetapi PKI hanya memainkan peranan yang sangat terbatas.

Dan sebuah argumen yang,konon , sangat kontroversial dipaparkan **W.F. Wertheim,** yang sepakat dengan pendapat bahwa Sjam, seorang anggota

REPRO WORLD VIEW PUB

Biro Chusus (BC) PKI, memainkan peranan yang sangat sentral dalam mengorganisasikan percobaan kudeta. Yang kontroversial dari pendapat Wertheim adalah, ternyata tokoh Sjam adalah orang yang disusupkan Angkatan Darat ke tubuh PKI. Hal ini menepis semua argumen tentang Sjam yang menyatakan bahwa Sjam, seorang PKI, yang disusupkan ke AD. Memang, pada akhirnya argumen ini menimbulkan banyak pertanyaan. Dan Wertheim, seperti ditulis Crouch--dengan retorika mirip cerita detektif, tetapi cukup logis agaknya --menyisipkan jawaban yang menjelaskan bahwa suatu kejadian akan nampak siapa dalangnya, Dari siapa pemenang atau yang beruntung dari kejadian tersebut.

Mengenai tuduhan keterlibatan PKI dalam peristiwa G-30 S, menurut Crouch, dalam *Militer dan Politik di Indonesia*, setidaknya terdapat tiga kelemahan yang sangat mendasar. *Pertama* para pelaku peristiwa tersebut, dapat dilihat jelas, adalah anggota angkatan bersenjata terutama dari kesatuan Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Tidak seorangpun anggota PKI yang dapat dihubung-hubungkan dengan kepemimpinan G30 S. Apabila memang PKI terlibat mengapa kasus ini terus ditutup-tutupi? *Kedua* PKI tidak pernah mengerahkan gerakan massanya untuk mendukung Untung kecuali demonstrasi massa di Yogyakarta. Kalaupun memang benar PKI menjadi dalang kudeta itu, mengapa dia tidak menggunakan senjata utamanya yang berupa kekuatan massa tersebut? Kelemahan yang *ketiga* seperti yang diungkapkan dalam makalah Cornel, Crouch mengatakan, PKI pada waktu itu dalam keadaan yang sangat menguntungkan dalam segi politik. Perkembangan politik yang terjadi tahun 1964 sampai terjadinya percobaan kudeta itu sangat menguntungkan PKI. Sehingga mengapa PKI harus mengambil resiko dengan melakukan kudeta karena hal ini justru akan merusak posisi PKI yang sudah terlanjur mapan.

Lebih jauh, pelacakan tentang percobaan kudeta tersebut menyodorkan satu pertanyaan kunci dari berbagai misteri G30S. Yakni , masalah kebenaran adanya **DEWAN JENDRAL**. masalah ini menjadi polemik tersendiri dalam upaya menyingkap tabir yang selama ini menyelimuti percobaan kudeta . Menurut kebanyakan terdakwa, pelaku kudeta mengatakan bahwa Dewan Jendral memang ada. dan menurut mereka, Dewan Jendral akan mengadakan suatu kudeta.

Namun seperti kata **Ahmad Yani**, didalam buku *Militer dan Politik di Indonesia* karya Crouch yang sekarang dilarang beredar, institusi Dewan Jendral memang sesungguhnya ada. Tujuan dibentuknya Dewan Jendral digunakan sebagai sarana segala pembahasan promosi dan pengangkatan di tubuh AD, tetapi tidak membahas masalah yang sifatnya politis. Sekalipun demikian, Crouch mengatakan bukan tidak mungkin AD mempunyai semacam badan *Politbiro* yang mengatur masalah gerak politik AD. Crouch juga mensinyalir, Dewan Jendral tersebut mengemban fungsi sebagai politbiro AD.

..... TEORI LAIN ... TENTANG ADANYA PERWIRA-PERWIRA YANG PROGRESIF...

Selain isu Dewan Jendral, terdapat pula isu tentang *komplotan perwira progresif*. Isu ini terungkap lewat beberapa sidang Mahmilub bagi para pelaku kudeta yang berasal dari kelompok militer. Dari hasil tersebut, dua perwira AD **Kolonel Nugroho Notosusanto** dan **Letnan Kolonel Ismael Saleh** menerbitkan tulisan tentang percobaan kudeta tersebut dan menerangkan bahwa *"Kudeta tersebut, yang diatur sedemikian rupa sehingga tampak seperti 'suatu urusan intern AD', dilakukan oleh orang-orang PKI dalam korps perwira. Para perwira ini.... adalah komunis atau paling sedikit simpatisan komunis yang menerima 'pembinaan' yang sistematis dari PKI."* Dari pendapat ini disimpulkan bahwa Nugroho dan Ismael Saleh menganggap bahwa anggota AU dan AD yang terlibat dalam kudeta itu adalah pelaku sadar dari PKI yang tidak mempunyai motivasi bebas dari diri sendiri. Akan tetapi pendapat ini disanggah dan tidak terbukti ketika pengadilan terhadap para pemimpin PKI terjadi.

Penulis Cornell Paper beranggapan bahwa percobaan kudeta itu adalah suatu gerakan dari para perwira yang tidak puas, terutama divisi Diponegoro melawan pimpinan tertinggi AD. Ketidakpuasan ini karena banyak ex-perwira divisi Diponegoro yang mengalami kebobrokan dan meninggalkan semangat Djogja atau semangat revolusi, ketika mereka sudah menempati posisi tinggi di AD. Hal ini diperkuat dengan kegiatan dukungan terhadap kudeta tersebut yang banyak dilakukan oleh sebagian besar unsur dari divisi Diponegoro tersebut. Di samping perwira progresif dari kesatuan AD, kudeta itu juga didukung oleh kesatuan AU.

Argumen lain yang spekulatif adalah adanya keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G-30 S ini. Soeharto merupakan salah satu tokoh terpenting dalam tubuh AD yang luput dalam daftar mereka yang diculik. *Menurut Wertheim, Soeharto mungkin sekali berada dipihak yang berkomplot, karena tidak puas terhadap kepemimpinan para jendral AD yang tidak mampu menjawab tantangan PKI.* Kudeta G-30 S ini dilakukan untuk memberikan dalih bagi AD untuk menindak PKI. **Dalam teori ini Sjam mungkin merupakan orang AD yang disusupkan kedalam tubuh PKI.**

Berbagai argumen yang muncul seperti yang diungkap di depan, membuktikan, --bahwa kebenaran sejarah, atas siapa pelaku golpista 65--, sampai kini masih terus menjadi sengketa. Jawabannya bergantung siapa hakimnya, dan siapa yang membunyikan informasinya. Karena sejarah memang berisi cerita para pemenang. Dan, propaganda politik tipis bedanya dengan sejarah sesungguhnya. Di luar itu, cepat atau lambat, kebenaran akan diluruskan dengan sendirinya oleh sejarah itu sendiri, atau bahkan pemenang selanjutnya.

Amin.S, Yussac.F.A., dan Andi Arief

PRAM: "ITU HANYA BADAI dalam SEGELAS KOPI"

Pramoedya Ananta Toer --akrab dipanggil Pram,-- sekarang ini, selepasnya dari tahanan Orde Baru selama 14 tahun, ternyata masih harus merasakan jenis "penjara" lain. Itu karena keaktifannya dalam Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA). Pemenjaraan ini punya kaitan erat dengan Peristiwa G 30 S PKI, yang menurutnya bukan pemberontakan. Reportase SINTESA, Amalinda, mewawancarainya dan berbicara banyak seputar peristiwa G 30 S PKI ini.

Bagaimana posisi anda ketika terjadi peristiwa G30S?

Posisi saya waktu itu hanya sebagai Rakyat Indonesia biasa. Memang ada yang menuduh saya sebagai anggota LEKRA, organisasi Kesenian Rakyatnya PKI. Saya waktu itu diangkat menjadi anggota kehormatan Lekra organisasi kesenian rakyat.

Menurut anda pihak-pihak mana saja yang ikut terli bat dalam peristiwa G 30 S tersebut?

Setiap perubahan fundamental yang terjadi di Indonesia, sejak dulu pasti ada faktor eksternalnya. Sejak jaman Sriwijaya, Majapahit, kolonialisme Belanda, Jepang, dan sampai sekarang, setiap revolusi pasti ada faktor X- nya. Jadi peristiwa G30S ini ada pula faktor X itu. Bangsa kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di daratan Asia jauh tertinggal, sehingga menjadi permainan (maaf bicara begitu). Karena ini berdasarkan sejarah. Indonesia dikenal hanya setelah menjadi jalan lalu lintas perdagangan antara Tiongkok, India dan sebaliknya.

Peta konflik yang terjadi saat itu bagaimana?

Jangan tanya tentang siapa orang yang terlibat. Masalahnya mulai tahun 1963 Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Ini awalnya adalah kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah setelah Perang Dunia II ada dua bangsa Asia yang memelopori kemerdekaan bagi bangsanya. Dua bangsa itu yaitu Vietnam 15 Agustus 1945 dan Indonesia 17 Agustus 1945 jadi hanya selisih dua hari. Karena kedua bangsa ini akibatnya Asia Afrika bergejolak karena ingin merdeka. Hal ini membikin khawatir Inggris, karena Malaysia sendiri waktu itu bergolak dan mereka malah pro Indonesia sebagai guru untuk merdeka. Karena Inggris khawatir *life-line*-nya dari London sampai Australia, jadi tidak boleh terputus oleh gejolak di Semenanjung Malaya. Sehingga mereka membentuk Malaya melalui upaya memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. dan tidak mengherankan jika Indonesia bersimpati terhadap Malaysia. Indonesia menentang pembentukan British Malaysia karena jika dibiarkan maka *live-imperialism* Inggris akan mengganggu Indonesia.

Tetapi oleh pers asing, konfrontasi tersebut dianggap sebagai taktik Soekarno untuk melupakan kesulitan dalam negeri. Kesulitan tersebut berupa pemboikotan bangsa barat terhadap Indonesia, karena dalam sejarahnya, Barat selamanya menghisap kaum kulit berwarna. Itu terjadi sejak adanya pelayaran sampai sekarang. Konfrontasi ini semakin membahayakan Inggris, pertempuran terjadi antara Inggris bersama persekutuannya ANZUS dengan Indonesia disepanjang perbatasan Kalimantan Utara. Pertempuran itu dilakukan baik melalui darat, laut maupun udara.

G30S merupakan kelanjutan masalah konfrontasi Malaysia. Kebetulan kepentingan Inggris terhadap Malaysia dalam hal *live-imperialism* bertemu dengan kepentingan kepentingan AS. Sebab strategi global AS yang menjadikan negara- negara lain menjadi pasar dia. Sebagaimana AS memusuhi negeri komunis karena menolak dijadikan pasar bagi barangnya. Sehingga pemberontakan G30S tidak merupakan masalah Ideologi.

Berarti sama kejadiannya dengan peristiwa PRRI, PERMESTA?

Memang hampir sama dengan peristiwa PRRI-Permesta. AS, Eropa menjadi kuat karena merampasi milik kaum berwarna. Selama 2 abad orang negro di AS dihisap. Dalam perjalanan menuju ke AS negro-negro tersebut sebanyak 10 % dibunuh dalam kapal-kapal yang membawanya ke daratan AS. Begitu juga Belanda menghisap bangsa kita. Dan banyak orang Indonesia mati akibat beberapa stelsel yang dilakukan oleh Belanda. Karena itu mereka sekarang kaya. Sehingga ketika kemarin Indonesia membicarakan utang luar negeri, saya mengatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai utang luar negeri. Justru merekalah yang mengambil kekayaan Indonesia. Saya pernah menulis tentang hal tersebut tahun 1956.

Pada tahun 1965 AS kepayahan di Vietnam, dia tidak mau pengaruh Vietnam tersebut merambat ke selatan, sehingga AS memutus pengaruh tersebut sampai di sebelah selatan Vietnam. Sementara itu di Indonesia sedang disiapkan tenaga sukarela yang dilatih untuk menghadapi Inggris di semenanjung Malaya. Jumlah sukarelawan yang disiapkan berjumlah 40.000 orang. Untuk memadamkan niat Soekarno ini maka diadakanlah G30S dengan tujuan untuk memadamkan usaha Soekarno melawan imperialisme Inggris sekaligus menggulingkan Soekarno, dan juga untuk membubarkan PKI. Itu sebabnya terjadi pembunuhan terhadap jendral-jendral yang ditemukan di Lubang Buaya. Terus Soekarno, Aidit, Soeparjo kok, ngumpul di Lubang Buaya, kan aneh. Jadi hal ini pasti ada yang ngatur agar mudah untuk menangkap mereka. Setelah itu pers asing memberitakan bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S tersebut. Tahun ini arsip dokumen AS yang membuktikan bahwa AS terlibat dalam peristiwa G30S akan dibuka, tetapi dokumen Inggris belum dibuka. Jadi, G30S PKI sebenarnya adalah persoalan Inggris dan AS. AS untuk memutus pengaruh komunisme dalam hal ini Vietnam ke selatan dan Inggris untuk menyelamatkan garis imperialismenya. G30S menurut saya kejadian yang dibikin menjadi besar saja.

Berarti tentara dalam hal ini Angkatan Darat tahu tentang hal itu?

Saya tidak dapat menjawab hal ini karena seharusnya arsip yang seharusnya menjawab. Tapi saya punya hipotesa, karena sejak semula saya

seorang nasionalis kiri dan saya mengalami masa pahit akibat ulah bapak saya yang juga nasionalis kiri, sementara orang lain masuk jadi **"bener"** seperti Nasution dan Soeharto saat itu. Saya tidak rela karena kondisi saat itu yang pahit sekali. Yang penting adalah bahwa dalam persoalan G30S jangan sampai kita menuduh orang-orangnya tapi yang lebih penting adalah **the why and the how**, seperti Untung, bagaimana bisa dia menculik jendralnya Soekarno. Padahal jendral jendral itu setia pada Soekarno. **Mereka dibunuh lantas Soekarno dituduh terlibat G30S berarti kan, Soekarno meng-kup Soekarno** Itu logika dari mana dan itu sampai sekarang masih ramai.

Kalau dikaitkan dengan konstelasi politik saat ini dan dengan isu suksesi 1998 bagaimana, pak?

Selamanya akan tetap sedemikian itu. Soal suksesi jangan dibicarakan sekarang, soal hari depan itu kalian yang pegang. Jangan belajar dari orang-orang jamannya Soekarno karena mereka tidak mampu mengelola konflik yang ada. Sehingga Soekarno, Hatta, Syahrir sampai matinya tidak bisa ketemu. Jangan jadi korban konflik. Ngomong soal G30S saya peringatkan, angkatan 45 waktu melawan Belanda mempunyai senjata sementara angkatan muda sekarang tidak punya dalam menghadapi militerisme yang sekarang dibelakang persekutuan multi regional dan dibelakang AS. Berbeda dengan waktu lalu yang hanya menghadapi Belanda.

Jadi soal siapa yang terlibat G30S, itu tidak penting sebelum menjawab the why on the how.

Begini, selama ini Orba membikin fakta yang seolah- olah mendukung pemerintah sekarang, ini bagaimana?

G30S itu bukan pemberontakan tapi hanya kup. *Itu hanya badai dalam gelas kopi* **karena hanya soal yang tidak berarti, terjadi kemudian ketahuan dan muncul tuduhan misalnya Aidit yang dituduh sebagai biang keladi mengapa ditangkap terus dibunuh mestinya dikorek keterangan dulu, tapi mengapa musti dibunuh. Jadi jendral-jendral yang dibunuh itu adalah jendral yang setia dengan Soekarno.**

Bagaimana dengan perbedaan pendapat antara AD dengan Soekarno?

Hal ini bersandar masa revolusi semasa revolusi itu pemimpin politik kita melihat perlawanan bersenjata tidak mungkin memenangkan perlawanan. Karena jalan diplomasi dan perlawanan bersenjata dalam revolusi tidak mungkin memenangkan perlawanan dalam revolusi melawan Belanda yang disokong negara pemenang PD II. Jaman itu tentara sudah dipimpin Nasution, orang KNIL. Menurut saya Nasution tidak suka pada rakyat jelata bersenjata. Padahal rakyat mendapatkan senjata sendiri dengan jalan menyerang Jepang. Jadi dalam revolusi itu tentara lebih banyak menaklukkan rakyat bersenjata daripada Belanda. Waktu militer terusir dari Jawa Barat terus lari ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, di sanalah katanya mereka menang melawan tentara merah PKI. Kan aneh di Jawa barat lari dari Belanda di Jawa Tengah dan Jawa Timur membabati rakyat. Padahal itu soal konflik biasa. Saya berpesan seharusnya kita mengelola konflik bukan menjadi korban konflik. Jeleknya di Indonesia jika sudah kalah malah dihina sampai tujuh turunan. Saya *nggak ngerti* peradaban apa ini.
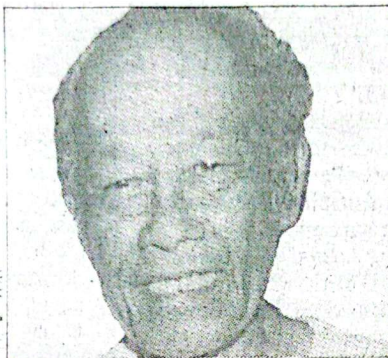
"YANG BERHASIL MENG-KUP-KAN SOEHARTO, SEHINGGA DIA YANG MENDAPAT KEUNTUNGAN"

Apa kepentingan historis Orba terhadap kejadian tersebut?

Orba secara historis mendapat keuntungan dari keja dian tersebut. Meskipun mulutnya memaki-maki G 30 S, sebetulnya Orba mendapat keuntungan. Harusnya mereka berterima-kasih, tetapi karena mereka hipokrit ya, beginilah.

Dalam hal ekonomi politiknya?

Ya, takluk saja dengan pemodal besar. Saat itu kapital memerintah penguasa-penguasa regional sampai semua tunduk. Orang kulit berwarna akhirnya yang menjadi korban.

Menurut anda apa yang menyebabkan NEFO gagal?

NEFO gagal kerena memang belum masanya. Itu karena bengsa kulit putih masih terlalu kuat tetapi Soekarno tetap memaksa pembentukan Nefo. G30S terjadi dalam rencana supaya semua kena dan selesai. Tetapi Soekarno tidak semudah itu untuk digulingkan. **Akhirnya dengan jalan merangkak Kup-nya Soeharto berhasil mengguling-kannya. Yang meng-kup kan Soeharto.** Sehingga dia yang mendapat keuntungan.

Harto itu orang KNIL dan juga orang Mangkunegaran. Demikian juga Nasution. Waktu orang susah dan dibuang dia enak-enak mendapat gaji. Saya berhak ngomong begitu karena saya penasaran kenapa sampai 14 tahun dirampas kebebasan saya dan dipaksa untuk bekerja selama 14 tahun. Saya berhak untuk tahu itu dan saya mencoba mencari tahu tentang hal tersebut.

Menurut anda apakah keluarnya buku "Kehormatan Bagi yang Berhak" karangan Manai Sophian itu cukup memberikan informasi?

Bagi saya sih nggak. Tapi saya senang ada orang Indonesia yang berani menyatakan pendapatnya berdasar materi yang dapat dipertanggungjawabkan, itu sudah suatu kemajuan. Biasanya orang Indonesia tidak berani karena konsekuansinya berat, penjara atau teror. Tapi ini adalah sikap berani. Jadi kalau soal G30S tidak menyebutkan masalah konfrontasi sebagai titik tolak-nya bagi saya adalah NOL. Omong kosong itu. karena urutannya ada faktor Ekstern yang menentukan.

Anda tadi menyebutkan AD berperan dalam peristiwa tersebut?

AD sebenarnya telah berperan sejak masa revolusi. Dan terjadi pertentangan antara militer dan politisi.

Apakah AD dalam hal ini mendapat keuntungan kapital terutama dalam kaitannya dengan kapital AS yang masuk ke Indonesia?

Ya, tokoh-tokohnya saja. Saja tidak menuduh, lho. Pernah ke Cibubur lihat rumah-rumah jendral, nggak ? Rumahnya luar biasa. Gajinya seberapa tho ? Pagarnya saja bisa puluhan juta harganya. Saya kira dengan gajinya beli mobil saja tidak mampu. Dari jumlah dia bayar pajak akan terlihat berapa jumlah gajinya.

Begini, ada salah satu hipotesa yang menyebutkan bahwa salah satu segi positif dari Angkatan Darat, saat itu kekuatan tsb tidak menggunakan kekuatannya semaksimal

mungkin. Sehingga jika mereka mau mungkin jika sudah dikuasai militer akan terjadi suatu pemerintahan junta militer.

Bukan begitu. Pada saat itu Soekarno kuat malah sebagian tentara dipihak Soekarno seperti AU dan AL.

Tapi yang kuat saat itu kan AD?

Ya kuat karena kan di darat. Perlu diingat bahwa Soekarno adalah orang yang mempersatukan bangsa-bangsa di Indonesia tanpa meneteskan darah setetespun sehingga terbentuk suatu nation state. Nah dengan demikian dia lebih kuat dari militer. Kalo dia menghantam militer KNIL kliknya Soeharto bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan karena provinsi-provinsi *frontier* akan berdiri sendiri sebagai negara dan itu pasti akan disokong oleh negeri kapitalis dan selanjutnya Indonesia akan bubar seperti Uni Soviet sekarang. Dan kalau bubar, Jawa tidak bisa hidup. Kalau toh Jawa pingin hidup dia hanya bisa ekspor 2 hal, manusia berpacul dan manusia berbedil jadi mengekspor pembunuh. Jadi hipotesa dosen kamu itu tidak sepenuhnya benar dan nggak cocok dengan kenyataan.

Berapa besar korban akibat peristiwa G30S tersebut?

Itulah, pemerintah Orba nggak mau untuk mendirikan komisi saja tidak mau. Soekarno yang membentuk **fact finding commision,** untuk menyelidiki berapa banyak korban. Tetapi ketika dilapangan, pihak tentara selalu memberikan jawaban yang seragam, menjawab jumlah sekian dan minta PKI untuk dibubarkan. Tetapi ketika di tanya ke penduduk jumlahnya bisa 10 sampai 20 kali lebih besar.

Menurut anda berapa?

Wah, saya sebenarnya tidak berhak untuk menjawab hal tersebut.

Tapi menurut Domo (Sudomo) sekitar 1 juta.

Itu biaya untuk mendirikan Orba, dan jangan lupa, untuk melahirkan bangsa dan negara Indonesia Soekarno tidak meneteskan darah setetes pun.

Ada kemungkinan lebih ?

Saya kira lebih, sebab itu yang dibunuhi, terus. Tahun '69, ketika saya mau diberangkatkan ke Buru, ditempatkan di Nusa Kambangan, di salah satu penjara yang namanya Karang Tengah. Di situ saya sempat membaca papan: Kekuatan 500 sekian
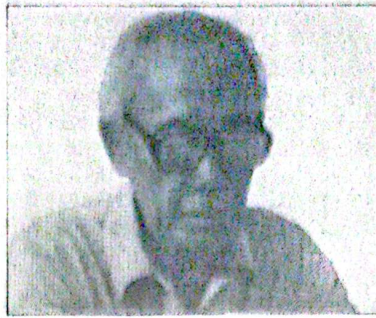
org, mati 200 sekian org. Separonya itu. Itu tertulis, saya baca itu. Kemudian di Buru, berapa teman-teman saya yang dibunuhi disana. Untung saya catat, tapi cuma sampai tahun '78, '79 sudah tidak saya catat lagi. Masih tetap dibunuhi, jangankan di dalam penjara, diluar penjara banyak yang dibunuhi. di Timtim, sepertiga penduduk dibunuhi. Ini bangsa apa...?

Itu fakta?

Ya fakta! Kalau gak percaya, bikin cacah jiwa. Aceh, gubernurnya sendiri bilang, "Penduduk merosot jumlahnya". Itu gubernur Aceh sendiri. Sayang tidak saya kliping.

Tentang Litsus, bagaimana?

Apa? Untuk keamanan ?, Keamanan siapa sebenarnya? Saya tidak tahu, saya merasa gak aman sampai sekarang. Kemana- mana saya merasa curiga. Apalagi katanya membahayakan negara. Tuduhan-tuduhan itu. Negara khan ada unsur-unsurnya, rakyat, wilayah, pemerintah. Yang mana? Itu ngawur saja orang-orang. Negara dibahayakan segala macam. Komunisme yang laten. Mungkin bagi orang-orang yang dibunuhi yang berkuasa ini yang berbahaya. Di Buru itu, berapa kali saya digebukin oleh militer. Dan militer itu umurnya seperti anak saya yang kesekian

"G 30 S SEBENARNYA ADALAH PERSOALAN INGGRIS DAN AS"

Buku Prahara Budaya yang baru-baru ini terbit, menghangatkan kembali perbincangan dua kutub Manifes Kebudayaan dan Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra). Buku ini dianggap monumental sebagai "pelurus sejarah". Sayangnya diskusi menyambut terbitnya buku inia tidak melibatkan Pram secara pribadi yang punya kepentingan langsung di dalamnya. IA memang tak pernah diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan lewat dialog- dialog dalam berbagai forum. Pram sedikit berkisah seputar "pertengkaran intelektualnya" dengan Manifes kebudayaan)

Waktu saya ditangkap, koran NU, Duta Masyarakat, menuduh saya mencuri buku-buku dari Museum Nasional. Sampai sekarang, komunis anggota PKI segala macam. Buktinya apa? Dan saya tidak bisa membela diri. Persoalannya itu waktu jaman Orla ada polemik dengan gol. Manikebu, yang disponsori militer. Tuduhannya saya melarang buku-buku mereka , diteror. Khan sama-sama punya senjata, pena. Teror apa? Khan sama-sama pena? Nggak jawab waktu itu. Sampai sekarang tuduhan itu, makin lama makin vulgar, gak patut dijawab. terakhir di Republika. Ditulis oleh berbagai macam org. (2 tahun lalu). Saya coba jawab tapi gak dimuat, padahal saya datang sendiri kesana. Maka itu waktu Balairung memuat wawancara dengan saya, kaget saya. Kok, berani?

Kalau peranan militer bagaimana?

Ini khan dibikin seperti di Amerika Latin, (seperti di Chile,Pak?). Yang mana saja sama. Jadi dengan kekuasaan militer nggak ada demokrasi, jadi rakyat dan sumber daya alam lebih mudah dieksploitasi Amerika Serikat. Ini terakhir ya, ada tulisan tentang:" Kenapa Kennedy tidak boleh datang ke Ind.?". Untuk menghalangi supaya ia tidak datang ke Ind., ia dibunuh. Jadi CIA, waktu itu dikepalai oleh Allan Dulles yang dipecat sama Kennedy. Allan Dulles punya hubungan dengan istri PM belanda, Yang adalah raja dan ratu minyak. Dan Dulles adalah sahabat Soekarno. Ia mau datang ke Indonesia, bicara dengan Soekarno tentang kemungkinan kerja sama eksplorasi minyak di Irian jaya. Minyak Irian, paling bagus sedunia. Jadi untuk menghalangi kerjasama dengan Soekarno ia (Kennedy) dibunuh. Jadi, ada permainan antara Alan Dulles dengan PM Belanda.

Kalau menurut anda kalau bukan kapitalisme yang ideal, apa alternatifnya?

Sekarang yang berharga kapitalnya atau manusianya? Pilih saja. Pokoknya asal manusia dihargai, manusia harus dapat tempatnya di dunia. Ya, orang ada yang mengatakan sosialisme, komunisme, sosial demokrat. Terserah orang mau bilang apa, yang penting manusianya harus dapat tempat.

Ada pesan buat teman-teman di Yogya?

Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini ? (lin)

HOLOKAUS, NUNCA MAS !

Di benua Eropa, istilah holokaus adalah istilah yang sangat populer, meskipun secara historis negara-negara di daratan Eropa jika mendengar kata itu, selalu menyimpan kesan mendalam dan menjijikkan. Karena, holokaus mengingatkan orang pada kebengisan dan kekejaman yang telah dilakukan oleh teror Nazi Jerman. Hanya saja bagi kepentingan akademis maupun upaya menarik pelajaran- pelajaran berharga –dari sejarah sepahit apapun-- kajian terhadap holokaus tetap dilakukan. Dari sudut kemanusiaan, yang paling penting dari semua itu adalah, penyimpulan oleh pemerintah Jerman Barat dan Jerman Timur sendiri (sebelum reunifikasi) tentang kesalahan masa lalu yang dilakukan oleh bangsa Jerman.
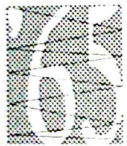
DI EROPA, menurut kamus istilah, holokaus memiliki makna pemusnahan, pengrusakan, penyembelihan secara besar-besaran, terutama atas jiwa manusia, dengan jalan membakar, menyiksa dan cara-cara lainnya seperti pembuangan, pengasingan ke kamp-kamp konsentrasi, kamar-kamar gas beracun, membiarkan mati lemas, atau dibiarkan hidup kelaparan meski tinggal tulang belulang, tanpa memandang usia. Ibu-ibu hamil tua, anak kecil, tua renta, bayi- bayi tidak berdosa adalah sasaran holokaus, tentu saja di luar penentang utama holokaus.

Holokaus di bawah teror-teror Nazi Jerman, adalah pukulan balik bagi pemujaan orang terhadap titik awal pencerahan umat manusia, atau yang sering dikenal dengan *aufklarung*. Oleh Nazi, aufklarung ditebas habis menjadi ladang-ladang *endlosung (penyembelihan)*. Holokaus lewat endlosung yang dilakukan Hitler dan Nazi bukannya tanpa motivasi. Karena ternyata holokaus berawal dari rekayasa kepentingan membuka *Lebensraum* (ruang hidup) kapital.

Kondisi ini mirip saat ekonomi Jerman morat marit karena harus menanggung kekalahannya pada Perang Dunia Pertama, yang merupakan perang internasional antar kekuatan-kekuatan modal raksasa (imperialis). Malaise (depresi ekonomi secara besar-besaran), pengangguran, jatuhnya mata uang Mark Jerman dan sebagainya telah menciptakan krisis ekonomi, politik dan moral yang mendalam terhadap bangsa Jerman. Dalam keadaan demikian, para pengusaha besar Jerman tetap memiliki ambisi ekonomi politiknya, dengan biaya sosial sebesar apapun. Kapitalisme Jerman ini menuntut Lebensraum berupa sumber daya ekonomi serta perluasan pasar. Sebab, kalau ruang hidup ini tidak segera didapatkan, maka kapitalisme akan ambruk di negeri sendiri. Dengan kekalahannya pada Perang Dunia Pertama, bukannya lebensraum, tapi beban ekonomilah yang harus dibayar Jerman sebagai biaya pampasan perang kepada sekutu.

Upaya para kapitalis industri Jerman inilah yang ditentang oleh kapitalisme Eropa yang menang perang seperti Perancis dan Inggris yang sedang kelelahan akibat energinya dicurahkan pada perang dunia pertama.

Apa yang terjadi dengan kepentingan serta berbagai pemusnahan di perang dunia pertama maupun kedua adalah sebuah holokaus. Hanya saja kondisi ini masih dapat diterima dalam logika kondisi perang yaitu kepentingan kapital. *Di samping bermotif kapital, holokaus memiliki logikanya sendiri yaitu irrasionalisme.* Hal ini diperlihatkan ke dalam bentuk pembelahan secara tajam mahluk manusia yang supra dan yang sub human baik dari sudut pandangan terhadap dunia, ideologi maupun terhadap ras. Pembelahan inilah yang kemudian menjadi komando mutlak dan pengabsahan bagi pemusnahan dan penyembelihan secara besar-besaran.

Dengan menggunakan sentimen nasionalisme chauvinis, para kapitalis besar Jerman mendukung gerakan Nazi untuk membangkitkan kembali kejayaan ras Aria Jerman, yang sebenarnya adalah selubung untuk merebut kejayaan kembali kaum

industrialis besar Jerman. Untuk bisa bangkit kembali, maka dibutuhkan adanya kambing hitam atas kebangkrutan. Negara-negara sekutu pemenang perang, kaum Yahudi Jerman, sistem demokrasi parlementer, kaum Komunis dan gerakan buruh di Jerman disalahkan sebagai pihak-pihak yang menghambat kejayaan bangsa (baca: modal industrialis besar) Jerman. Dan sejarah telah mencatat bahwa sejak berkuasanya partai Nazi di Jerman hingga berakhirnya Perang Dunia II dengan ditaklukannya Berlin oleh tentara Soviet, Eropa dibanjiri darah berjuta- juta rakyat tak berdosa. Mereka bukanlah korban perang di front depan pertempuran. Holokaus memangsa korban justru di daerah-daerah front belakang, ia memangsa rakyat sipil di daerah-daerah yang "stabil" dan "terkendali."

Nunca Mas ! (*Agar Tak Terjadi Lagi !*) adalah kalimat yang sangat terkenal di kalangan banyak rakyat di negeri-negeri Amerika Latin. Kata-kata tersebut merupakan bentuk peringatan bagi masyarakat di sana dan bagi seluruh umat manusia agar tidak mengulang tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat selama pemerintahan rejim-rejim militer --yang masyhur di kalangan rakyat sebagai rejim "gorila" militer. Di negeri-negeri Amerika Latin, seperti di Argentina, tragedi tersebut pernah terjadi. Tidak seperti di Eropa, holokaus di Argentina terjadi dalam konteks apa yang disebut sebagai *counter-insurgency operation* (operasi penumpasan pemberontakan). Rakyat Argentina menjulukinya sebagai periode "perang kotor". Dalam periode tersebut, rejim militer telah melakukan penculikan terhadap belasan ribu anggota serikat buruh, mahasiswa dan orang-orang yang dicap kiri (sering tanpa pembuktian). Mereka disekap dalam sekolah-sekolah militer yang telah dirubah menjadi penjara-penjara "kagetan." Para oposan rejim militer dijadikan "bahan uji coba" dan aktivitas "praktikum" para taruna akademi militer. Metode-metode pembunuhan selama periode perang kotor ini sangatlah beragam. Mulai dari penyiksaan, penembakan dan, yang paling sering dilakukan adalah, pembiusan para tawanan yang kemudian dilempar ke tengah-tengah Samudra Atlantik dari pesawat terbang militer. Hanya setelah terjadinya proses demokratisasi di sana, tragedi tersebut kemudian diungkapkan dalam bentuk dokumen yang diberi titel *Nunca Mas!* Dokumen ini membeberkan data-data tentang orang-orang yang mati maupun hilang selama periode perang kotor tadi. Berkat tuntutan rakyat maupun tekanan berbagai organisasi Hak Asasi Manusia, kemudian diadakan proses penyidangan terhadap para perwira tinggi Angkatan Bersenjata Argentina yang bertanggungjawab atas tragedi tersebut. Bahkan pada bulan April tahun 1995 ini, Panglima Angkatan Bersenjata Argentina telah menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh rakyat Argentina yang disiarkan melalui Televisi Nasional. Kasus-kasus serupa banyak terjadi juga di negeri-negeri berkembang yang berada di bawah kekuasan rejim militer.

Lain di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin, lain pula di Indonesia. Sejarah kita punya catatan sendiri dengan holokaus --tepatnya sejarah titik awal Orde Baru--. Pasca G 30 S, holokaus secara sistematis dan terorganisir telah menimbulkan banyak korban --dan tentu saja termasuk korban anak sah bangsa yang tak berdosa secara politik maupun moral--. (Skala dan jumlah korban, lihat " Angka Endlosung 1965").

Korban-korban yang darahnya menjadi tonggak berdirinya Orde Baru, tidak sekedar diperlakukan dengan pembuangan, pengiriman ke kamp konsentrasi ataupun dibiarkan hidup tinggal tulang belulang. Perlakuan dilakukan dengan sangat sadis, tidak manusiawi bahkan bertentangan dengan agama apa pun. Barang siapa yang sedikit saja memiliki hubungan dengan partai Komunis pada waktu itu selalu dikecam dan diintip dengan bahaya maut.

Pembunuhan, teror, pemerkosaan, penculikan, dilakukan dengan hebatnya. Banyak saksi sejarah menyaksikan letusan senjata ke kepala rakyat tak berdosa, sayatan-sayatan ataupun tusukan-tusukan benda tajam maupun tumpul ke tubuh anak Adam. Sungai- sungai penuh dengan darah, mayat-mayat tanpa kepala atau bagian tubuh lainnya. Bahkan di sepanjang jalan-jalan raya sekitar Pasuruan (Jawa Timur) banyak kepala manusia yang terbunuh ditancapkan pada tonggak-tonggak kayu sebagai bentuk teror mental. Sungai Bengawan Solo yang dalam lirik lagunya Gesang terkesan indah dan permai, ketika itu penuh dengan mayat-mayat, sehingga di beberapa tempat kadang-kadang airnya tidak terlihat tertutup oleh mayat yang bergelimpangan. Pernah satu ketika, masyarakat Surabaya melakukan protes karena hilir sungai Brantas yang membelah kota dan menjadi sumber air bersih bagi penduduk, tersumbat oleh tumpukan mayat yang mengapung dan memerahkan air sungai. Pantai Kuta di Bali yang kini menjadi ajang jemur diri wisatawan, ketika itu dijadikan ajang penyembelihan, keindahan pantai Kuta tertutup para mayat dan bau anyir darah.

Berbeda dengan di Eropa, Holokaus --ataupun endloosung-- di negeri ini dilakukan dengan kejam dalam *keadaan tak ada perang*. Meskipun demikian, tetap saja ia memiliki motif kepentingan ekonomi. Karena, berbarengan dengan aksi pembantaian yang terus berlangsung sampai awal tahun 1969, pada tahun 1967 Indonesia menjadi surganya para investor. Para investor yang dipimpin Amerika Serikat, meng-akumulasi modalnya di atas tetesan darah yang belum kering.

Betapa pun menjijikkan dan memalukan, namun ia adalah salah satu episode dari sejarah kita, sejarah republik ini. Sebagaimana sejarah-sejarah yang bercerita luhur, maka sejarah yang berisi kisah-kisah menjijikan, sadis dan memalukan bangsa tidak boleh dilupakan. Sejarah tidak akan hilang, ia harus direkam sebaik- baiknya. Minimal, dia harus diingat, sekalipun suatu saat kita akan hidup di alam (demokrasi?), hingga kita bisa berani mengakuinya sebagai tragedi kemanusiaan. *NUNCA MAS !*

Andi Arief

"ENDLOSUNG" di AWAL PEMBANGUNAN

Kontroversi di sekitar jumlah pembantaian terutama kepada anggota dan massa serta simpatisan PKI yang terkena hukuman kolektif oleh penguasa Orde Baru karena dituduh mendalangi kup G30S sampai kini masih belum tuntas. Data resmi pemerintah, data militer, kesaksian pelaku-pelakau sejarah, peneliti serta intelektual dalam maupun luar negeri menunjukkan perbedaan-perbedaan -- bahkan sangat tajam dan mencolok --. Berikut ini Sintesa menginventarisasi hasil investigasi lapangan maupun literatur- literatur dari berbagai sumber.

65 ANGKA resmi pertama kali yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah adalah di akhir tahun 1965 yang merupakan temuan *fact finding team* yang beranggotakan 9 orang. Menurut komisi yang dibentuk negara (militer) ini, korban nyawa manusia yang tewas adalah 78.000 orang. Angka ini adalah temuan selama 3 bulan pasca G30S. Apakah angka temuan tersebut menunjukkan fakta sesungguhnya?

Seorang peneliti yang bernama **John Hughes** di tahun 1968 mengungkapkan bahwa hasil wawancaranya dengan salah satu anggota *fact finding team* bertolak belakang dengan laporan resmi yang dikeluarkan timnya. Menurut anggota pencari fakta tersebut, korban yang bertumbangan bukanlah 78.000 orang melainkan 10 kalinya (sekitar 800.000 - 1.000.000 orang, red). Bahkan, menurut Pramoedya AT, kalau ditanyakan kepada rakyat maka jawabannya adalah 10 bahkan 20 kali lebih besar (Lihat kolom wawancara dengan Pram).

Apa yang dikemukakan Pram hampir mirip dengan temuan mahasiswa-mahasiswa Bandung dan Jakarta yang bersamaan dengan tim 9 mereka mengeluarkan sekitar 1.000.000 korban Jiwa. Data ini hampir senada dengan data yang dikemukakan Manai Sopian dalam bukunya *Kehormatan Bagi Yang Berhak*. Menurut Manai, yang bukunya sempat mengundang reaksi kalangan pejabat pemerintah Indonesia itu, jumlah korban berkisar antara setengah sampai satu juta orang.

Kantor berita resmi Indonesia, "Antara", mengeluarkan data korban yang lebih besar dari temuan *fact finding*. Menurut Antara, jumlah anggota PKI yang menjadi korban keganasan pendir- pendiri Orde Baru berkisar kurang lebih 500.000 jiwa. Angka keluaran kantor berita inilah yang kemudian menjadi acuan pemerintah lewat kepala staf Kopkamtibnya, Soedomo, di tahun 1977 ketika diwawancarai oleh wartawan *Newsweek* yaitu Bernad Krisher.

Sementara itu, suara-suara Internasional juga mengeluarkan data resmi tentang pembantaian tersebut. Kedutaan Amerika di Jakarta mengeluarkan angka yang lebih kecil dari standar yang dipakai kantor berita Antara dan penjelasan Sudomo, yaitu hanya 250.000 jiwa. Namun Amnesti Internasional menyatakan angka pembantaian yang dilakukan orde baru lebih dari satu juta orang jumlahnya. Angka keluaran Amnesti Internasional tersebut menurut Dewi Soekarno masih kecil, ketika diwawancarai oleh radio BBC Inggris, Dewi mengatakan bahwa ada sekitar 2 juta rakyat yang menjadi korban keganasan rezim orde baru.

Di luar angka-angka kongkret yang dikeluarkan di atas, beberapa peneliti, dan intelektual asing mengeluarkan komentar dan skala perbandingan pembantaian di sekitar pemberontakan 1965. Donald Hindley menyatakan sekitar setengah juta anggota PKI yang habis dibantai militer orde baru dan sekutunya. Menurut *Indonesia Magazine* terbitan tahun 1993 yang berjudul "keterlibatan Pater Belanda dalam Kudeta tahun 1965" menyebut jumlah korbannya berkisar antara seperempat hingga satu juta orang. Helen Louise Hunter , seorang penulis paper CIA

TABEL KORBAN PEMBANTAIAN ORDE BARU SEKITAR G 30 S
DARI BERBAGAI SUMBER

NO	SUMBER-SUMBER	JUMLAH JIWA
1	KOMISI *FACT-FINDING* BENTUKAN PEMERINTAH MILITER RI	78.000
2	WAWANCARA JOHN HUGHES DENGAN SALAH SATU ANGGOTA KOMISI *FACT-FINDING*	800.000-1.000.000
3	PRAMOEDYA ANANTA TOER	10-20 KALI LEBIH BESAR DARI HASIL TEMUAN KOMISI*FACT FINDING*
4	KELOMPOK MAHASISWA BANDUNG DAN JAKARTA	1.000.000
5	KANTOR BERITA "ANTARA"	500.000
6	KEDUTAAN BESAR AS DI JAKARTA	250.000
7	DEWI SOEKARNO	2.000.000
8	HELEN LOUISE HUNTER	5 KALI LEBIH BANYAK DARI KORBAN PERANG VIETNAM
9	SARWO EDHI WIBOWO	3.000.000
10	AMNESTI INTERNASIONAL	1.000.000

melukiskan bahwa pembantaian tahun 1965 adalah salah satu kisah sejarah yang terburuk dalam jajaran pembantaian massal di abad 20. Sementara filsuf Inggris, Betrand Russel, mengatakan bahwa dalam waktu empat bulan pembantaian saja (antara Oktober 1965-Januari 1966), jumlah orang yang dibantai jumlahnya lima kali lipat sebanyak korban perang Vietnam selama perang 12 tahun. Dalam keadaan tidak perang,seperti holokaus di Eropa, kurbannya seperti 8 tahun perang Irak - Iran. *Time*, edisi 15 Juli 1966, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pembunuhan terbesar di abad 20. Majalah ini, menggambarkan kejadian tersebut sebagai "Berita Barat tentang Asia yang terbaik tahun ini".

Dalam literatur-literatur yang menyangkut keterlibatan Militer di pentas politik Indonesia, data korban juga sangat variatif. Ulf Sundhaussen dalam bukunya *Politik Militer Indonesia* mengatakan bahwa jumlah korban yang dibantai paling rendah 78.000 orang sampai satu juta orang. Menurut Guy J. Pauker (intelektual yang berasal dari lembaga Rand Corporation yang dikenal 'dekat' dengan CIA) dalam *Toward A New Order in Indonesia* diungkapkan korban yang bertumbangan adalah 200.000 orang dari tiga juta anggota seluruhnya.

Intelektual Indonesia, Yahya Muhaimin, yang menulis tentang *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966* secara sembarang justru menilai jumlah korban kurang dari seratus ribu orang. Pengamat militer yang sering memakai pendekatan kultural ini, justru meragukan bahwa orang komunis yang terbunuh jumlahnya lebih dari seratus ribu, sebab menurutnya ada kecenderungan bahwa perkiraan orang-orang luar negeri sering membesar-besarkan. Keraguan Yahya Muhaimin ini mungkin sangat kontras dengan data yang dikeluarkan oleh pelaku sejarah --salah seorang militer pengambil komando pembantaian-- pada waktu itu yaitu Letnan Jendral (purn.) Sarwo Edhi yang dikutip Permadi dalam diskusi Tapol/Napol di YLBHI tahun 1995, yang menyatakan bahwa ada sekitar 3.000.000 orang terbunuh di penyembelihan 1965.

Data hasil investigasi ini, tentu saja belum termasuk para tapol/napol, eks tapol/napol, beserta anak cucunya yang sampai kini tidak karuan nasibnya, ataupun mereka yang terendlosung secara sosial. Darah dan kebebasan mereka yang menjadi korban, adalah bagian dari saksi hidup yang dibungkam tentang bagaimana rezim Orde Baru mendapatkan legitimasi politiknya selama 30 tahun terakhir ini.

(Team Sintesa)

MENABUR KONFLIK, MENUAI MODAL

DI BERBAGAI literatur, baik itu literatur resmi keluaran negara maupun keluaran intelektual kritis dalam maupun luar negeri, sangat sedikit sekali yang melihat peristiwa G 30 S sepabagai sebuah pertarungan perebutan modal di dalam faksi-faksi militer. Hampir semua pengamat, penulis ataupun intelektual melihat sudut-sudut kekuasaan politik ataupun politik kekerasan dikemudian hari (red. sekarang), berpangkal dari keterlibatan militer di tahun 1965.

Investigasi **Sintesa** menemukan **Max Lane**, intelektual yang menunjukkan perspektif kepentingan modal antar militer di balik peristiwa 1965. Menurut Max Lane, dalam melihat peristiwa 1965, militer harus dipandang sebagai kapitalis bersenjata sebagai faksi dominan di kalangan kapitalis. Militer atau kapitalis bersenjata ini lah yang merupakan kekuatan inti dari gerakan konflik 1965-1966.

Lebih lanjut, Max mengatakan faksi tersebut tidak sepenuhnya solid di dalam. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Masing-masing memiliki sikap dan penilaian sendiri soal Soekarno dan radikalisme PKI. Untuk menghadapi kondisi itu, militer kemudian membentuk aliansi-aliansi yang secara hakekatnya merupakan perpaduan antara: pertama, Faksi Dewan Jendral (A. Yani, S Parman, MT Haryono, Soetoyo dan Soemitro). Kedua, Faksi Soeharto yang membangun basis ekonomi sendiri dengan pengusaha seperti **Soedono Salim** dan sebagainya. Ketiga, Faksi Nasution dengan aliansi bersama-sama sekutu sipil mereka seperti PSI, Masyumi dan NU yang kemudian memobilisir basis massa para tuan tanah dan mahasiswa.

Antar ketiga faksi ini, kata Lane, kelompok Dewan Jendral (kecuali Soemitro) dan faksi Nasution telah dipukul pada 1 Oktober 1965 oleh G30S. Kedua faksi tersebut sukses dilumpuhkan para perwira yang terlibat G 30S. Sementara kekuataan militer faksi Soeharto dengan kekuatan Kostradnya berhasil mengambil alih kepemimpinan dalam operasi kontra revolusioner.

Momentum ini kemudian dapat dipertahankan oleh Soeharto, yakni dengan cara memainkan sekutu-sekutu sipilnya dalam pembantaian anggota PKI dan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa tahun 1966. Hal tersebut akhirnya dapat diakumulasikan hingga ia mendapatkan Supersemar dan kemudian menjadi Presiden melalui Sidang MPRS tahun 1967.

Apa yang dikemukakan Lane, itulah sebenarnya pilar konstruksi dalam memahami penguasaan ekonomi Indonesia. Ketika di awal konsolidasi kekuasaannya, Orde Baru yang dipimpin Soeharto berhasil memanfaatkan pinjaman-pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing. Di lain fihak, dengan terjadinya oil boom, rejim Orde Baru cukup berhasil melahirkan orang kaya baru (OKB). Sejak itulah, lisensi-lisensi yang diberikan oleh Orde Baru yang dipimpin Soeharto kepada sekutu-sekutu dan kerabatnya telah memungkinkan mereka memonopoli kegiatan ekspor-impor. Di antaranya, menurut **Kunio Yosihara** dalam *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* dan **Yahya Muhaimin** dalam *Bisnis dan Politik* adalah pemberian hak monopoli impor cengkeh kepada **Probosu tedjo**, pemberian HPH, dan penguasaan perkebunan-perkebunan oleh yayasan-yayasan Angkatan Darat.

Hal demikian, mau tak mau melahirkan kelompok-kelompok bisnis yang berdiri di sekeliling Angkatan Bersenjata (yakni para anggota dewan komisaris Perusahaan Swasta maupun BUMN) maupun di kalangan 'crony' cendana. Dua faksi inilah yang kemudian menentukan pembentukan faksi-faksi kelas borjuasi Indonesia.

Anjloknya harga minyak bumi pada pertengahan dekade 1980-an, telah mempengaruhi proses kristalisasi di kalangan borjuasi. Hal ini terutama berkaitan dengan keharusan rejim orde baru untuk mengalihkan primadona ekspornya dari migas ke non migas. Untuk memacu ekspor non migas, maka dibutuhkan liberalisasi perekonomian dan efisiensi dalam mengolah dan mengakumulasi kapital untuk ekspor.

Faksi borjuasi dari kalangan militer yang selama periode *oil boom* menikmati kemudahan dan privilese jabatannya, tidak lagi dapat bertahan di tengah arus liberalisasi perekonomian. Hanya faksi borjuasi kerabat yang selama ini mempersatukan kehandalan bisnis plus kolusi dengan keluarga istana, mampu mentransformasikan dirinya sebagai kapitalis yang dapat bertahan. Hubungan bisnis yang sudah lama terjalin di antara bisnis kerabat Istana dapat berkembang hingga ke tingkat konglomerasi bisnis. Transformasi orientasi ekspor Indonesia dari mata dagangan migas menjadi ekspor non migas, kemudian bersambut dengan proses investasi kapital secara besar-besaran oleh kelompok bisnis kerabat Istana dalam cabang industri manufaktur (AA).

OPERASI (CIA) JAKARTA

Sebelas September 1973, memiliki arti sendiri bagi rakyat Chile. Pada tanggal dan tahun itu,dr. Salvador Allende Gossens, Presiden Chile yang didukung oleh koalisi-koalisi partai-partai berhaluan kiri di bawah satu kelompok Persatuan Rakyat/ Unidad Populer (UP), terguling dan tewas secara tragis di tangan Junta Militer yang dengan paksa melakukan kudeta terhadap Allende di istana La Moneda. Gerakan penggulingan Allende oleh Junta Militer pimpinan Jenderal Boneka Augusto Pinochet Ugarte yang sempat diputar di layar kaca dalam film House of Spirit itu, di namakan Operasi Jakarta (Jakarta Operation).

'65 KEDENGARANNYA aneh, nama sebuah kota di Indonesia dijadikan nama sebuah operasi penggulingan di satu negara Amerika Latin. Kenyataan berbicara lain. Munculnya nama Jakarta, bukan sekedar asal-asalan atau bahkan kebetulan. Gerakan Militer di Chile ketika menggulingkan Allende diinspirasikan oleh peristiwa di Indonesia di bulan yang sama 8 tahun sebelumnya yaitu 30 September 1965 ketika Militer menumpas Partai Komunis di Indonesia. Menurut Arief Budiman, dalam bukunya *"Jalan Demokratis ke Sosialisme , Pengalaman Chile di bawah Allende"*, pola penumpasan di Indonesialah yang secara sadar ditiru militer Chile.

Chile, negara yang memiliki tradisi demokrasi dalam Sistem Politiknya, dimana dalam sejarah politiknya tidak memiliki noda yang memberangus kebebasan dan hak sipil seperti kebebasan berorganisasi, kebebasan mendirikan partai dan lain sebagainya, harus mengalami catatan buram, bahkan yang terburam di Amerika Latin, pada tahun 1973. Militer telah merusak sejarah Chile. Militer, sebagai pelaku kudeta (*golpista*, bahasa Spanyol) memberi garis hitam kepolitikan di Chile. Isu-isu sekitar kudeta sebenarnya telah merebak sebelumnya. Di tembok-tembok maupun dalam selebaran-selebaran muncul kata-kata *"Jakarta sedang Mendekat, Jakarta sedang Mendekat"*. Untuk memanaskan situasi guna memperoleh legitimasi politik bagi kudeta militer Chile, ia kemudian diikuti dengan munculnya bermacam selebaran. Salah satu di antaranya adalah selebaran yang menyatakan bahwa pemerintahan Allende sedang merencanakan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal Chile.

Serbuan ke Istana La Moneda, dalam waktu relatif singkat memporakporandakan kekuatan kiri yang dipimpin Allende --yang secara sah menang lewat Pemilu--. Semua yang memilih jalur politik kiri ditumpas , ditangkap, dibantai dan di bunuh. Bukan itu saja seluruh partai politik berhaluan kiri hingga ke tengah dilarang hidup.

Militer Chile tidak sendirian, mereka dibantu oleh Amerika dengan CIA nya, didukung oleh kekuatan borjuasi yang takluk lewat Pemilu, bahkan menurut **James Petras**, dalam tulisannya yang berjudul *Belajar dari Pengalaman Chili : Borjuis Kecil dan Kelas Pekerja*, Militer didukung oleh kekuatan Borjuis kecil yang basis ekonominya merasa terancam atas kebijakan Unidad Popular yang lebih mendukung kekuatan buruh industri dan buruh tani.

...AMERIKA TERLIBAT AKTIF DALAM KUDETA..

Khusus Amerika, mereka merasa terpotong kepentingan ekonominya di Chile akibat Nasionalisasi secara besar-besaran oleh Pemerintahan Allende. Keberhasilan Junta Militer dalam menggulingkan kekuatan kiri menjadi surga bagi Amerika --untuk mengembangkan ekonominya yang kapitalistik. Dominasi ekonomi Amerika, dalam bentuk investasi dan hutang yang diputus di era Allende, mengalir dengan deras. Sementara perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dikembalikan kembali kepada pemiliknya semula. Dan, sekali lagi Amerika yang dominan menguasai perusahaahan tersebut mendapat berkah ekonominya yang sempat hilang.

Betulkah pola di Chile ini diadopsi dari Jakarta? Apakah Amerika juga terlibat dalam kup 65 ? Apa kepentingan Amerika lewat CIA nya?.

Bagi **Manai Sopian**, Amerika terlibat aktif dalam kudeta tersebut. Dia mengutip temuan **Gabriel Kolko** dan **Geoffrey Robinson**. Gabriel Kolko mengungkapkan melalui laporannya dengan mengutip dari dokumen State Departemen (Departemen Luar Negeri) dan CIA mengenai debat tentang keterlibatan AS dalam kasus G30S di Indonesia. Kesimpulan yang diberikan adalah bahwa memang benar AS melalui CIA terlibat pada kasus tersebut. Dokumen yang dipergunakan oleh Kolko berasal dari mengutip arsip perpustakaan mantan presiden AS, **Lindon B. Johnson** yang sudah diterbitkan. Sehingga tuduhan **letkol Untung** tentang keterlibatan CIA di negeri ini dibenarkan oleh dokumen tersebut.

Keterlibatan CIA juga diamini oleh Geoffrey Robinson dalam makalahnya *Some Arguments Concerning US Influence and Complicity in the Indonesia Coup of October 1,1965*, yang mengatakan bahwa gerakan 30 september itu kelihatannya seperti sebuah kup yang direncanakan untuk gagal, kudeta itu didesain sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan sebuah dalih untuk mengadakan suatu pamer kekuatan dan meraih kekuasaan. Selanjutnya dikatakan bahwa laporan CIA yang menyatakan bahwa PKI lah penanggung jawab tunggal atas kup tersebut adalah hal yang sulit didukung. Tapi itu tidak menutup sama sekali akan adanya kemungkinan keterlibatan PKI juga meskipun alasan untuk itu sangat lemah.

Washington, hampir dapat dipastikan mengetahui pembantaian dan penggulingan tahun 1965. Hal itu terlihat dari peran Kemlu AS pada tanggal 29 Oktober 1965 yang dikirim via **Marshall Green Dubes AS** pada waktu itu. Isinya menyatakan kampanye menentang PKI harus terus dilakukan, dan hanya militer yang tepat untuk melakukan itu. Bukan itu saja, pesan lainnya dari kedubes Jakarta tanggal 30 Oktober dan 4 November 1965 menginstruksikan pengiriman perangkat komunikasi dan pesawat terbang kepada angkatan bersenjata Indonesia.

Dalam sebuah tulisan di *San Fransisco Chronicle* tanggal 7 Juni 1995, yang dikutip **Manai Sophiaan (Wawasan 24 Juni 1995)**, disebutkan secara jelas tentang intervensi rahasia CIA di Indonesia di akhir dekade lima puluhan. Uraian dalam surat kabar tersebut mengungkap CIA menyuplai ribuan senjata, pembentukan dan penggunaan secara rahasia Angkatan Udara CIA dan bantuan logistik dari Armada ke 7. Dari rangkaian inilah yang kemudian menimbulkan perang saudara tahun 1956, dan sekaligus memperkuat militer dalam pemerintah parlemen Indonesia.

Ngototnya militer dan CIA dalam penggulingan di tahun 1965, yang juga diikuti dengan pambantaian dan pelarangan atas partai beraliran kiri, tidak dapat dilepaskan dari konteks bergemuruhnya dua poros utama yang sedang bersaing di tahun 1960-an yaitu poros Amerika dan poros Sovyet. Hal itu tercermin dari pertarungan pengaruh pilihan ideologi pembangunan dengan menghasilkan dua kecenderungan. **Pertama**, yaitu mengikuti jejak kapitalisme liberal yang didukung oleh negara-negara imperialis. Kecenderungan **kedua** adalah mengembangkan ekonomi nasional yang mandiri, anti imperialis dan dominasi asing.

Pertarungan dua kecenderungan di atas sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama oleh militer untuk merebut kekuasaan. Sejak tahun 1951 militer Indonesia, terutama elite militer sangat terpengaruh oleh kebijakan pertahanan Amerika. Sekitar tahun 1951-1957, Amerika telah memberikan pendidikan bagi 300 elite Militer Indonesia. Menurut **Steve Weisman** dalam tulisannya yang berjudul *"Ford Country : Building an elite for Indonesia"* strategi Amerika ini dimaksudkan untuk memodernisir elite. Tanpa memodernisir elite tidak akan ada negara yang akan pro pada modernisasi, demikian menurut Steve mengutip Wakil Presiden dari bagian Internasional Ford yaitu **Frank Suton**. Mereka tidak sekedar dididik masalah teknologi persenjataan, tetapi juga menerima propaganda sosial politik termasuk masalah ekonomi yang cukup luas.

Noam Chomski dalam bukunya *Year 501 : The Conquest Continue (1993)*, juga mengungkap keterlibatan Amerika terhadap kudeta dan pembasmian kekuatan kiri di Indonesia. Menurut Chomski, sejak awal tahun 50-an, CIA secara sembunyi-sembunyi sudah terlibat dalam berbagai insureksi bersenjata menentang Soekarno. Semua itu kemudian berpuncak ketika AS melalui kedubesnya di tahun 1965, menggandakan kisah keterlibatan, penghianatan dan kebrutalan PKI, meskipun tidak satupun orang kedubes AS yakin atas apa yang terjadi sesungguhnya.

Hal ini dilakukan selain untuk keperluan memperluas pasarnya di negara dunia ketiga, Amerika berupaya membendung pengaruh besar Castro dan Ho Chi Minh, dan secara tidak langsung membabat habis tokoh-tokoh yang condong beraliran kiri seperti Sihanouk di Kamboja serta Soekarno di Indonesia. Di tahun 1967, **Richard Nixon** menggambarkan Indonesia sebagai hadiah terbesar di wilayah Asia Tenggara. Kalau Vietnam merupakan kekalahan terbesar setelah Perang Dunia Kedua dalam ekspansi kemaharajaan Amerika, maka perubahan hasil kup 1965 adalah kemenangan Amerika terbesar.

Kasus di Indonesia dan Chile, hanyalah potongan kisah dari cerita panjang intervensi Amerika di berbagai negara -- tentu saja dengan kepentingan ekspansi ekonominya. Ada banyak keterlibatannya seperti di Vietnam, Haiti, Iran, Kuwait, Kuba, Libya, Guatemala, El Salvador, Republik Dominika, Panama, Peru, Grenada, Sudan, Nikaragua, Brazil, Argentina, Filipina, Korea Selatan dan negara-negara lainnya di hampir setiap Benua. Hampir dipastikan, setiap ada konflik politik maupun ekonomi di suatu negara, Amerika terlibat, masuk, merusak --dengan tangan kekuatan lain, biasanya tentara-- dan menguasai di dalamnya

(amin/andi arief).

SANG "PATER" *yang* TERLIBAT

Argumen tentang pelaku dan skenario G30S salah satunya adalah argumen yang dilontarkan melalui buletin *"BERKALA"* yang dikeluarkan oleh kelompok **AKSI SETIAKAWAN** sebuah LSM yang berkedudukan di Belanda.

Argumen yang tertulis dalam buletin tersebut merupakan rangkuman pengalaman dan pengetahuan seorang Belanda yang bernama **Van den Heuvel**. Heuvel mengadakan perjalanan ke Indonesia mulai tahun 1965-1970-an yang kemudian diteruskan dengan mengadakan kunjungan rutin setiap 2 bulan sekali ke negeri ini. Ditulisnya bahwa peristiwa G30S merupakan kudeta yang misterius. Pada tanggal 30 September 1965 **Letkol Untung** yang bersimpati ke kiri melakukan perebutan kekuasaan dengan didukung oleh beberapa divisi tentara. Peristiwa itu sendiri menyebabkan terbunuhnya 6 orang jendral dan seorang perwira menengah. Tetapi kudeta itu tidak berumur panjang karena pada hari itu juga **divisi Siliwangi dibawah komando Jendral Soeharto** menduduki tempat-tempat strategis di Jakarta. Dan segera setelah itu Soeharto beserta antek-anteknya mengumumkan bahwa kudeta Untung merupakan usaha dibelakang layar dari Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk merebut kekuasaan.

Heuvel menyebutkan bahwa sekian banyak orang Indonesia tentu mengalami peristiwa tersebut tetapi tidak menutup kemungkinan ada pihak ketiga yng ikut membidani G30S. **Seorang Pater Jesuit** menjadi informan bagi Heuvel waktu itu dia tinggal di Gunung Sahari di Jakarta. Oleh Heuvel disebutkan bahwa dia bukan satu-satunya pihak ketiga dalam G30S. Dalam beberapa hal misalnya dia sangat mempengaruhi politik dan pemikiran beberapa aktor politik Indonesia. Sebagai contoh Heuvel menyebutkan bahwa banyak pidato Soeharto waktu itu yang merupakan tulisan Pater tersebut.

Waktu itu Pater tersebut merupakan seorang dosen pada sebuah universitas di Jakarta, dan lama sudah dia bermanuver dengan menghimpun banyak orang pandai dan mahasiswa kedalam satu jaringan. Terbukti setelah itu bahwa mahasiswa merupakan kekuatan yang besar untuk perubahan di Indonesia tersebut terutama sekali setelah terjadinya kudeta. Kebanyakan dari anak didiknya kemudian membangun satu faksi/kelompok intelektual, yakni CSIS. Ini merupakan ancaman yang besar sekali bagi Soekarno waktu itu. Pater ini begitu berpengaruhnya sampai seorang pembantu Soekarno yaitu Subandrio ingin menangkapnya. Hal ini memaksa Pater tersebut lari ke Australia selama kira-kira enam bulan.

Ditambahkan oleh Heuvel bahwa melalui pemikiran Pastor ini bersama **Ali Murtopo** akhirnya lahirlah apa yang sekarang disebut partai Golkar. Walaupun demikian Heuvel tetap setuju bahwa kemungkinan kebetulan juga memainkan peranan. Dan skenario yang dijalankan oleh Pastor ini jelas bukan tanpa skenario Soeharto, tentara dan CIA.

Akhirnya oleh Van den Heuvel disebutkan bahwa nama seorang Pastor Jesuit yang mempunyai banyak peran dalam peristiwa G30S tersebut adalah **Iosephus Beek**. Beliau lahir pada tahun 1917 dan meninggal pada tahun 1983 setelah keberadaan dan peranannya tidak diperhatikan lagi oleh rejim penguasa Orde Baru dibawah Soeharto yang telah dibantunya pada awal berdirinya Orde Baru itu (Amin)

Arief Budiman

"Arief Budiman adalah salah seorang konseptor dan penandatangan Manifestasi Kebudayaan tahun 1963 yang dikecam habis-habisan oleh LEKRA. Di samping itu ia juga aktif dalam serangkaian demonstrasi 65-66, Arief adalah saksi hidup dalam Drama besar G- 30- S 65. Berikut sebagian dari kesaksiannya"

GE-TIGA POELOEH-ES, BUNG KARNO *dan* KONTEKS SEJARAH
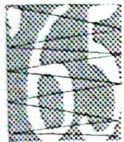
SAMPAI dengan hari ini, kisah G 30 S masih terasa kabur . Dalam situasi seperti itu, sukar bagi kita mengambil sikap G 30 S sebagai histori. Misteri diseputar kisah G 30 S menandai muatannya yang sarat tendensi politik. Agaknya, karena berbagai kepentingan, usaha untuk mencari data tampak membahayakan kelompok tertentu. Para sejarawan akan lebih mudah mencari sejarah pra-histori, karena tidak bermasalah. Mestinya Semua data bisa dipaparkan . Berbagai buku yang kini terbit masih belum memperjelas keadaan. Namun upaya- upaya kearah itu , perlu terus kita dukung.

Banyak pertanyaan yang sampai kini masih mengambang. Misalnya saja, informasi apakah jenderal-jenderal itu benar- benar dibunuh , kita tidak jelas. Para jenderal memang terbukti mati, namun kisah pembunuhan sadis hingga sampai dipotong kemaluannya, disiksa , dijejali macam-macam, tidak diiringi bukti visum medis. Karena itu, mensikapi hal ini , saya lebih baik memutuskan untuk tidak bersikap .

Adalah menarik jika para tokoh yang kini masih hidup seperti Jenderal Latief, Soebandrio, Oemar Dhani ditanya semuanya. Kita masih terus pada taraf pengumpulan data. kalau versi biologis, tentu saja bisa kita amati salah-benarnya, tetapi data-data itu sangat kurang dan data itu dihalangi. Kalau sekarang, jelas data-datanya lebih mendukung versi pemerintah.

Problem lain yang kontroversial adalah korban kerusuhan. Amnesti Internasional menaksir hingga 1 juta, sedang resmi pemerintah hanya 100 ribu. Sekarang ini ambil tengah-tengahnya saja, kira-kira 500 ribu. Belakangan ini, usaha-usaha untuk menerbitkan buku itu semuanya usaha sensor pemerintah. Seharusnya, seperti Manai, atau siapa saja, berhak mengembangkan , mendebat, atau mempersoalkannya . Buat sejarawan tentu saja hal itu penting sekali. Tetapi informasi yang dibuka baru satu keran, sedang keran-keran yang lain -- yang kira-kira melemahkan posisi pemerintah-- tidak dibuka . Manai misalnya, adalah salah satu yang berani membuka itu, meski akhirnya digebuk.

Sebenarnya masih banyak sumber-sumber informasi lain yang belum dikemukakan. Nanti ada orang-orang yang menulis, bahkan pada bekas orang-orang tua kiri dulu itu bisa ditulis memoarnya. Itu penting sekali. Mungkin tidak bisa diterbitkan sekarang, tetapi suatu saat kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kalau Pemerintah bikin versi buku putih, saya senang juga , bisa kita gunakan sebagai perbandingan.

BUNG KARNO

Peristiwa G30S awalnya adalah konflik antara Angkatan Darat dan PKI yang kian meruncing. Kedua kekuatan ini saling berkompetisi memperebutkan kekuasaan, dengan Bung Karno sebagai faktor pengimbang. Namun dengan mencuatnya informasi dari tim dokter RRC bahwa BK sakit, mendorong diambilnya tindakan. Versi resmi pemerintah adalah PKI yang mengambil inisiatif. Mereka menculik para Jenderal. Tetapi, ada selentingan bahwa ABRI-lah yang memanipulasi itu, sehingga konon, PKI terjebak. Dengan segera mereka jadi lumpuh.

Dalam masalah PKI, Bung karno tampak mendukung manuver mobilisasi massa PKI. Tetapi sebenarnya cara itu memang sesuai dengan manuver politik Bung Karno, yakni mobilisasi massa. Baik melalui PKI, PNI, atau untuk memenangkan move politik, lalu parlemen, DPR segala, dengan mobilisasi massa sulit untuk melawannya. Jadi politik BK adalah menggolkan tujuan politiknya dengan mobilisasi massa, bukan hanya PKI. Berbeda kalau Pak Harto, kalau dia dengan peraturan, dia paling takut dengan massa. Jadi kalau Pak Harto keputusannya selalu birokratis sekali, kalau BK bukan birokratis tetapi *mass forming*, pembentukkan kekuasaan dari massa.

Seting politik global ini penting untuk menilai kontroversi figur Soekarno. Beliau sebetulnya adalah seorang Nasionalis. Tetapi Nasionalisnya merugikan kepentingan Barat, oleh karena itu, Barat memotongnya. Karena dia dipotong Barat, maka ia berhubungan dengan Komunis lebih dekat dengan negara-negara komunis. Program-program Bung Karno condong sejalan dengan program ke negara-negara komunis. Jadi mereka melakukan suatu solidaritas terhadap pemerintah komunis. Tapi saya kira, Sukarno sendiri bukan Komunis. Bahkan mungkin komunis tidak suka Sukarno. Tapi mereka sama-sama bisa saling memperalat. Sukarno pada dasarnya adalah seorang feodal, feodal yang nasionalis. Soal Aristokrasi banyak sekali, ambil contoh tentang pengalaman dengan banyak perempuan. Wanita merupakan persoalan yang besar sekali bagi PKI . Soedjono dipecat PKI karena dia kawin lagi dengan Rose Pandanwangi. Dulu dia disuruh milih antara Ros Pandanwangi atau organisasi karena pada saat itu ia belum bercerai dengan istrinya. Dalam soal itu Bung Karno tidak memenuhi syarat jadi kader PKI tapi memang PKI berkepentingan.

Bung karno lebih dekat ke PKI, karena PKI punya massa, juga PNI kiri. Ia tidak dapat diperhitungkan pada

waktu itu.' dikalangan Jenderal, ada 2 kelompok. pertama adalah jenderal sekuler yang bicaranya Inggris, kebelanda-belandaan, dan jenderal kejawen yaitu jenderal-jenderal yang nggak pernah ke luar negeri dan kalau ngomong soal mistik seperti Soeharto, Ali Moertopo, Oemar Dhani. Kalau Yani, Nasution, termasuk jenderal-jenderal elit. Pengelompokannya kultural lebih banyak. Yang jelas militer pada waktu itu, jelas anti PKI. Pada waktu ada Manikebu, Nasution mengirim orang untuk membikin kongres. Nasution lebih ke kanan dan pro AS sekali. Juga anti PKI. Militer tampaknya menggunakan kelompok-kelompok seperti mahasiswa, sastrawan, apalagi pemuda. Saya sendiri, waktu itu termasuk kelompok sastrawan.

Namun bukan berarti Bung Karno tidak punya kesalahan. Kesalahan BK lebih pada masalah ekonomi yang tidak pernah diperhatikannya. Tapi dapat dikemukakan, ekonomi bermasalah karena AS memboikot bantuan-bantuan supaya tidak masuk, mengingat BK lebih dekat ke PKI. Jadi apa BK yang tidak mengerti ekonomi atau dia memang di boikot oleh AS ,karena persoalan politiknya.

Kembali pada masa peristiwa G 30 S. Pada waktu itu ada yang menganggap bahwa AD pecah, antara jenderal-jenderal yang akhirnya terbunuh itu dan dengan pihak-pihak yang satu klan dengan Soeharto. Apakah benar Kemunculan orde Baru dibawah kepemimpinanan Soeharto tidak terduga sama sekali. Suharto tidak punya klan pada waktu itu. Suharto adalah orang yang hampir pensiun dan hilang karyanya pada waktu itu tahun 1965, jadi dia *post stress* , sudah tua dan sudah hampir memasuki masa pensiun.Itu adalah kenyataan yang ada, tapi saya tidak tahu jika ada plot yang lain. Ia juga tidak dikenal dan saya dengar nama dia baru pada tanggal 1 Oktober itu Brigjend. Soeharto. Mungkin yang mengenalnya hanyalah orang-orang yang memperhatikan militer. Waktu itu 'kan Nasution, Suhendro nama bintang-bintang, Ahmad Yani juga terus S. Parman waktu itu belum begitu dikenal, setelah ia dibunuh baru dikenal. S. Parman waktu itu adalah asisten Yani.

Tapi jika dikatakan suksesi 1965 memang dikendalikan Suharto , sampai sekarang saya merasa tidak tahu. Tapi bukan Soeharto saya kira. Mungkin ada suatu kekuatan yang lebih besar. Yang menjadi masalah adalah, apakah Soeharto memang sudah direncanakan di tahun sekian akhirnya jadi pemimpin ataukah tidak. Atau tiba-tiba saja dia masuk, dan lalu didukung. Tetapi yang jelas, CIA ingin mencegah Soekarno dan PKI. Tujuannya mungkin begitu, tapi kalau soal pemimpin mungkin Nasution lebih pantas, karena ia anti komunis, Islamnya kuat dan sebenarnya bisa dipakai Amerika dan pro Amerika. Tapi yang berhasil justru Soeharto. Padahal, Soeharto bahasa Inggrisnya tidak bisa waktu itu.

"..SAYA KIRA CIA NGGAK BANTU JAKET TETAPI SENJATA"

KONTEKS SEJARAH

.Dugaan bahwa CIA berada dibelakang peristiwa G30 S kuat sekali, seperti muncul dalam buku Manai Sophiaan, tetapi bukti-bukti yang ada, baik yang menolak atau mendukung, masih belum banyak . Ada seorang sarjana Amerika, saya lupa namanya, yang berusaha mencari data CIA tapi sukar sekali karena masih tertutup datanya, masih belum dibuka. Saya tanyakan, dan dia bilang memang sampai sekarang belum tahu apakah Pak Harto itu ada kontak dengan CIA sebelumnya. itu nggak bisa terbuka, masih belum jelas. Namun secara logis saja, saya kira CIA pasti terlibat. Tetapi nggak punya bukti, karena memang kepentingan AS besar sekali. supaya Indonesia tidak jadi komunis...pakai logika... bukan pakai data.

Waktu itu bergolak Perang Vietnam, sehingga ada kepentingan Amerika untuk takut sekali daerah Asteng jadi kawasan komunis. Berasmaan dengan itu, RRC lagi ekspansif dan Rusia juga ekspansif. Rusia bersaing dengan RRC, kabarnya, Indonesia dikuasai RRC komunisnya, PKI lebih banyak ke RRC daripada ke Rusia. Nah ini tentunya politik Amerika berusaha bahwa negara yang belum komunis jangan sampai jadi negara komunis. Saya kira besar sekali kepentingan AS supaya Indonesia tetap jadi negara non komunis. Dan juga Rusia main, Cina juga main. Jadi logis kalau intel-intel atau intelejen-intelejen dunia itu main di sini. Juga nggak terkejut kalau mereka mainnya bukan sekedar ngomong-ngomomg saja, tapi ngedrop uang. Cuma untuk cari bukti nggak bisa.

Rusia ada membantu senjata meski nggak banyak. Cina tak bisa membantu karena dia pun juga perlu dibantu. Negara- negara sosialis pada dasarnya miskin Chili juga begitu, di stop bantuannya Rusia tidak bisa berbuat banyak sebetulnya bukan tidak mau membantu cuma tidak bisa bantu karena ada kesulitan teknis. Karena selama ini Chili dikuasai AS sehingga jika ada bantuan dari Rusia maka akan ada perubahan teknologi malah jadi lebih mahal. Kecuali jika Rusia mau membantu uang, tapi Rusia tidak punya mereka bantu dengan produksi.Yang jelas, CIA terlibat supaya Indonesia masuk ke dalam orbit mereka. Dan hasilnya ya begini ini, pemerintah yang pro barat dan tunduk pada kebijakan-kebijakan politik- ekonomi dari Barat. Kalau seandainya Suksesi datang dari orang-orang Kiri, pasti dicegah dan semua literatur-literatur Kiri yang anti Amerika mereka coba potong, berangus. Politik Internasional terpantul pada politik Dalam negeri, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Politik LN merupakan cerminan dari proses-proses politik dalam negeri.

Baru-baru ini, masalah yang diributkan justru pembelian jaket, seperti diangkat Manai Sophiaan. Tapi kalau Manai punya bukti ya silakan. hanya saja, dulu itu saya kira CIA nggak bantu kasih jaket, tetapi senjata. Jaket itu toh, seperti tidak berguna. Saya sendiri mengenakan jaket milik saya. Itu saya dapat dari bekas perploncoan dan jaket kuning. Dan kalau CIA membantu tentunya membantu dengan yang lebih besar. Tetapi kalau itu dijadikan bukti oleh Manai dan ada datanya, ya tidak apa-apa. Jaket tidak terlalu mahal pada waktu itu. Jadi bisa benar, bisa salah. Kalau Pak Manai punya bukti ya silakan. Kalau pemberian HT masih kecil juga. Mungkin RRC dan Rusia membantu yang besar juga.

Dalam operasi CIA di Indonesia sukses. Ini kan kasus cerita yang sukses. Di Chili mereka lebih sukses lagi. Bahkan mereka terpaksa membunuh Presiden Chili.

(Dari reportase Amien Sayogo dan Evi Mariani dengan Dr.Arief Budiman, ditulis kembali oleh Yussac F. Ananda.)

Judul Buku : Prahara Budaya Kilas balik Ofensif LEKRA/PKI DKK (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah)
Penyunting : D.S Moeljanto dan Taufiq Ismail
Penerbit : Mizan dan Harian Umum Republika
Tebal : 469 hal.

MEMPRAHARAKAN

KONFLIK BUDAYA MASA LAMPAU DI MASA KINI

Buku yang berjudul Prahara Budaya dapat dikatakan lebih memiliki muatan "politik" ketimbang sebuah upaya akademik yang memaparkan fakta-fakta politik yang kemudian dianalisis. Hal ini dapat dilihat *Ucapan Terima kasih* yang ditulis oleh TI (Taufiq Ismail) dan DSM (D.S. Mulyanto),: " *Semoga buku ini mencapai tujuannya, yaitu lebih menjelaskan kepada publik, terutama generasi muda, mengenai peranan destruktif Lekra/PKI dan sekutu- sekutunya di bidang semi budaya pada kurun waktu 1959-1965, yang nyaris menenggelamkan Republik Indonesia kita melalui perebutan kekuasaan berdarah Gestapu, 30 September 1965".*

Selain itu juga tulisan Pengantar Penerbit yang ditulis oleh Parni Hadi seorang Pemimpin Umum/Redaksi Republika semakin menambah muatan politis dari buku ini, terutama ketika dia menyatakan pernyataan pada akhir pengantarnya : " *Kini Peristiwa G-30-S/PKI telah hampir 30 tahun lewat. ...Tahun ini bangsa Indonesia merayakan pesta emas, HUT RI ke-50. Terdengar usul agar peristiwa bersejarah ini dijadikan momentum untuk rekonsiliasi, rujuk, antara mereka yang dulu bertikai, baik di bidang politik maupun kebudayaan. Ini adalah usul yang simpatik, ...Usul tentu boleh saja. Namun, sebagai bangsa kita perlu tatap waspada. Apalagi, kalau di antara orang-orang kiri itu masih ada yang mengkampanyekan ideologi mereka dalam bentuk yang lebih canggih dengan memanfaatkan era keterbukaan dan simpati Barat yang dulu mereka musuhi, terhadap mereka yang* die hard, *kita tidak boleh kompromi."*

Buku ini, bagaimanapun politisnya, penting untuk dimengerti sebagai kumpulan dokumen yang dikompilasikan oleh DSM tentang sikap politik Lekra terhadap Manikebu pada jaman tahun 1950-an sampai menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Akan tetapi sebagai dokumen dia tidak diletakkan secara sendirian begitu saja, namun diberi konteks oleh TI dan DSM sesuai dengan kepentingan politik tertentu --atau mungkin" ICMI jika kehadiran Republika dalam penerbitan buku ini mewakili ICMI -- yang bisa jadi tidak harus mewakili kelompok. Manikebu di masa sekarang. Oleh karena dokumen tersebut diberi konteks yang demikian rupa (meskipun syah-syah saja) maka dalam beberapa hal buku ini memiliki kadar "emosi" yang menyebabkan ketidakberimbangan "sikap" untuk meletakkan konflik Lekra (dengan Realisme Sosialismenya) dengan Manikebu (dengan Humanisme Universalnya) di dalam konstelasi "Pertempuran ideologi" pada jaman itu.

DOK.SINTESA

Sesungguhnya jika TI dan DSM mencermati konsep Realisme Sosialis yang dicetuskan Gorki dan di pidatokan oleh Nyoto, kita bisa melihat bagaimana Nyoto --yang penya kepentingan ideologis politis -- membelokkan pengertian Realisme Sosialismenya Gorki -- yang fleksibel sekali yang berbunyi : " *the abstraction of the fundamental idea underlying the sum of a given reality ... amplified through the addition of the desired and the possible* ", dan oleh pidatonya Nyoto pada tahun 1950 dituliskan : " *Realisme sosialis tidak hanya seujung jari sekarang ini, tetapi juga untuk masa depan.* Karya Gorki memang luar biasa, karena untuk semua kemanusiaanlah dia mencetuskannya, " Sekarang ini; *putarlah semua struktur* (Bagian definisi Gorki ini dikutip dari tulisan Keith Foulcehr (1986 : 23-24), *Social Commitment in Literature and the Arts, The Indonesian "Institute of People's Culture" 1950-1965*, masih tetap dalam bahasa Inggris, sementara ini kutipan pidato Nyoto diterjemahkan oleh penulis dari buku yang sama).

Pada bagian epilog (Foulcehr, 1986 : 202) sesungguhnya Foulcehr menginterpretasikan dengan sangat kritis terhadap Lekra bahwa, Realisme Sosialis yang dijadikan konsep kultural oleh Lekra -- yang berasal dari Gorki yang nota benenya dianggap sebagai bapak Realisme Sosialis, dan berasal dari Eropa -- merupakan upaya Lekra untuk menunjukkan kemoderenan ilmiah yang seolah-olah bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran internasional, dan punya garis keturunan "murni" dari Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Lekra itu sebuah gerakan rakyat yang diidei oleh gagasan-gagasan lokal, dimana seniman-seniman pada saat itu lebih diidei oleh pemikiran mereka sendiri-sendiri ketimbang sentuhan mereka dengan blok Komunis yang dalam hal ini Sovyet. Tampaknya saya harus yakin pula bahwa gagasan Humanisme Universal itu pun juga gagasan lokal yang dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatan menginternasional.

Jadi yang menjadi masalah pada saat itu, apa yang disebut prahara budaya bukanlah prahara yang sesungguhnya, dalam arti konflik ideologi yang sungguhan, namun lebih merupakan politik pemaknaan terhadap situasi kerevolusian, dimana orang berhasrat untuk menceburkan diri di dalam kancah itu. Penceburan diri itu pun bukan semata-mata ideologis, namun lebih merupakan upaya "gagahgagahan" untuk menjadi orang yang paling "kiri" walaupun bukan kiri betulan, namun hanya keoportunisan belaka, walaupun dalam realitasnya seolah-olah kelihatan nyata.

Akhir kata, saya hanya bisa bertanya apakah orang-orang yang Lekra yang menceburkan diri di dalam kancah kerevolusian yang seperti itu tidak akan dimaafkan? Apakah demokrasi itu bukan berarti saling mengerti dan memahami satu sama lain? Apakah terminologi antara Humanisme Universal dengan Realisme Sosialis perlu dibedakan secara tegas, kalau semuanya itu untuk urusan kesejahteraan manusia? Saya kira Allah Maha Demokratis

(Aris Arif Mundayat adalah Staf Pengajar Antropologi Sastra UGM, dan Litbang Persatuan Rakyat Demokratik (PRD))

Resensi buku ini pernah dibawakan dalam Bedah Buku yang diadakan CSCD di FISIPOL UGM.

only the good die young

Judul buku	:	Zaman Peralihan
Pengarang	:	Soe Hok Gie
Penerbit	:	Yayasan Bentang Budaya Yogyakarta Februari 1995
Tebal buku	:	266 hal

Tanpa bermaksud memicingkan sebelah mata dan mengecilkan arti orang-orang yang berkualitas bagi negeri ini dan kebetulan tidak mati muda, judul diatas sangat pantas ditujukan pada Soe Hok Gie. Semasa hidupnya, sebelum ia keburu mati direnggut gas beracun di Puncak Mahameru, lelaki bertubuh kecil ini telah membuktikan bahwa ia samasekali tidak punya keinginan pribadi yang terselip di balik makna perjuangannya.

Yang ada hanyalah kenyataan bahwa dia selalu gelisah melihat segala bentuk ketidakadilan yang terjadi disekelilingnya dan dia harus membeberkan borok-borok itu kehadapan rakyat Indonesia, negeri yang amat dicintainya itu, apapun resikonya. "...Kebenaran itu harus diungkapkan, betapapun itu menyakitkan," begitu selalu katanya. Dan ia pegang teguh kata-katanya itu walaupun dengan menanggung resiko dipinggirkan oleh orang-orang, sistem, yang samasekali tidak senang dengan ketajaman pikiran dan lidahnya. Bahkan ia harus tersisih dari percaturan politik, saat teman-teman seperjuangannya justru berebutan mencari posisi di kursi parlemen, bermanis muka dimata pemerintahan yang baru. Soe Hok Gie bukan jenis orang yang begitu saja mau diajak kompromi. Mungkin Hok Gie memang tidak berbakat menjadi seorang politikus. Dia adalah pejuang moral. Dengan keobyektifan pandangan yang hati-hati dijaganya, opini dan pikiran yang keluar dari kepalanya adalah refleksi kebenaran.

Yang menarik dari 36 esai karya Soe Hok Gie ini adalah bahasa tulisnya yang sederhana. Lugas. Apa adanya. Ia tidak perlu memakai bahasa yang 'nyastra', 'ndhakik-ndhakik', untuk mengekspresikan maksudnya, meskipun tulisannya itu tetap terkesan ilmiah. Begitulah Hok Gie, apa adanya. Ia menumpahkan pikirannya dalam gaya seperti orang bercerita. Seperti seorang yang menceritakan kisah-kisah ketidakadilan kepada seseorang yang lain. Atau juga kisah tentang sesuatu yang lain. Sikap yang dia pilih untuk diperankan ini adalah terjemahan sikap ideal kaum intelektual menurutnya, yaitu peran resi yang setiap saat bisa turun dari pertapaannya karena melihat ketidakadilan di suatu tempat, dan secepatnya kembali ke tempat semula jika keadaan sudah pulih. Tindakan yang dilandasi ketulusan dan ketiadaan tendensi.

Gaya Hok Gie menulis esai amat dipengaruhi oleh kebiasaannya menulis di buku harian. Artinya ketika dia menulis, berdemonstrasi, diskusi, itu adalah sesuatu yang terekat kuat dan menjadi bagian dirinya, kehidupannya sehari-hari. Pada Catatan Seorang Demonstran, catatan hariannya yang sudah dibukukan, kesan ini akan semakin kuat. Rasanya gairah hidup Hok Gie ikut ditentukan oleh intensitas keterlibatannya dalam persoalan-persoalan yang ikut ditanggung pikiran kritisnya.

Itu juga yang menjadikan masalah-masalah yang terpapar dalam buku ini bukan sesuatu yang asing bagi yang sudah membaca buku catatan hariannya. Meski itu bukan alasan untuk mengatakan prakarsa Stanley dan Aris Santoso untuk menerbitkan buku ini, sebagai tindakan yang terlampau romantis kalau bukan berlebihan. Meskipun yang segera tercium dari buku ini dari awal sampai akhir adalah bau gerakan mahasiswa angkatan '66 dan mitos *people's power* yang menghebohkan itu.

Buku ini terbagi dalam empat bagian, yaitu masalah kebangsaan, kemahasiswaan, kemanusiaan, dan yang terakhir catatan turis terpelajar. Bagian yang pertama, masalah kebangsaan, hampir semua esai yang diletakkan pada bagian ini ditulis dengan latar belakang suasana politik ketika mahasiswa menjadi tokoh sentral peralihan Indonesia dari masa orde lama ke orde baru.
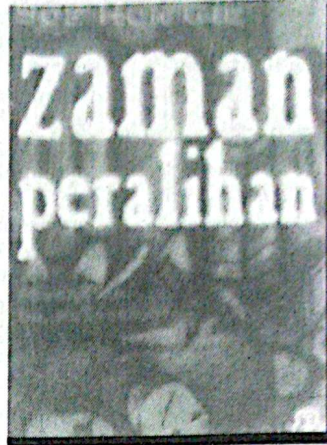
Mungkin ada yang menganggap esai-esai ini sudah basi, karena latar belakang dan kondisi politik yang kerap jadi latar tulisan Hok Gie ini sudah lama berlalu dan tidak relevan lagi jika dibenturkan dengan persoalan yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa sekarang. Tapi masalahnya sekarang bukan periodisasi waktu yang menjadi jarak mahasiswa generasi Hok Gie dan generasi yang sekarang, melainkan karena apa yang dilakukan Hok Gie dan kawan-kawannya waktu itu, roh yang menyemangati dan menafasinya, adalah sama dengan apa yang dipunyai gerakan mahasiswa sekarang. Itu yang terpenting.

Penghayatan Hok Gie pada gerakan yang diikutinya tampak jelas misalnya ketika dia menceritakan adegan-adegan demonstrasi. Dia menceritakan semua itu dalam kalimat-kalimat yang akrab. Pada tulisannya yang berjudul Di Sekitar Demonstrasi-Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta tertulis,"....Yel-yel itu berubah sesuai dengan situasi. Disamping itu demonstran-demonstran juga menyanyikan lagu-lagu nasional, seperti: Maju Tak Gentar, Padamu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, Resopim, atau membuat lagu-lagu baru atas dasar irama lagu- lagu lama. Dibawah ini kami berikan beberapa lagu "Top Hits":

Blok,goblok,goblok,goblok. Kita ganyang mentri goblok.

atau

Win,kawin,kawin,kawin. Mentri-mentri tukang kawin."

Hok Gie juga selalu menyitir orang-orang yang dibicarakannya, dipujinya, dimaki-makinya dengan sebut nama langsung. Suatu hal yang sangat jarang ditemukan pada media massa sekarang, karena iklim politisnya sudah jauh berbeda, dan tentu dibutuhkan keberanian besar menghadapi bahaya breidel yang dari dulu tidak pernah jelas alasannya

Bisa dipahami bila ia merasa sedih ketika masa mahasiswanya segera

berakhir dan diwisuda sebagai sarjana, karena status mahasiswa yang dimilikinya benar-benar digunakan untuk berbuat sebaik-baiknya dan ikut memberikan kontribusi berharga bagi dirinya. Dia berpikir, sebagai seorang mahasiswa yang belajar dengan uang yang berasal dari tetesan keringat rakyat, sudah seharusnya tahu dan peduli persoalan yang melilit bangsanya. "....Aku *the happy selected few* yang dapat kuliah dan karena itu mereka harus menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya....Dan kepada rakyat aku ingin tunjukkan bahwa mereka dapat mengharapkan perbaikan-perbaikan dari keadaan dengan menyatukan diri di bawah pimpinan patriot-patriot universitas."

Hok Gie tahu betul bahwa mahasiswa adalah juga manusia biasa yang juga kadang alpa dan silau oleh kemewahan dunia, tapi dia tetap menaruh harapan besar pada mahasiswa, kelompok masyarakat yang memang punya potensi sebagai pressure group bagi segala macam keputusan pemerintah yang dirasa bertentangan dengan kehendak rakyat. "....Mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah, agar mahasiswa Indonesia berkembang menjadi manusia-manusia yang biasa. Menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi bertingkah laku sebagai manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang manusia."

Waktu yang dipunyai Soe Hok Gie memang teramat pendek untuk bisa dipakai menguji kesetiaannya, kecintaannya, kebenaran konsep-konsep pikirannya. Mungkin kalau Hok Gie dikaruniai Tuhan umur yang panjang, kita bisa ikut melihat seberapa dalam ketahanan keteguhannya untuk tetap menjaga jarak dengan sistem yang ada, atau malah tergoda dengan apologi ingin memperbaiki sistem dari dalam. Tapi, sekali lagi, kita mungkin bisa sedikit berharap jika melihat bagaimana berangnya Hok Gie ketika menyaksikan teman-teman seperjuangannya yang duduk dikursi parlemen malah rebutan mengambil kreditan mobil holden. Dia menunjukkan rasa marahnya itu dengan mengirimkan alat-alat make up kepada teman-temannya itu. Supaya mereka tampil lebih manis dimata pemerintah, katanya.

Atau mungkin kita malah bersyukur Hok Gie mati muda, setidaknya dia tidak ikut menyaksikan betapa pemerintah sekarang ternyata sama buruknya dengan macam pemerintah yang dulu dia maki-maki. Kalau tidak, Hok Gie tidak jadi diberitakan mati terkena gas beracun, tapi mati karena sakit hati.

Nuning
Mahasiswa Komunikasi '94

LIBERALISME INTERNASIONAL

Oleh: Sunudyantoro

Melihat perjalanan peristiwa yang berjalan selama dekade yang lalu, pikiran kita tentunya memberikan penilaian terhadap serangkaian peristiwa itu. Sesuatu yang sangat fundamental telah terjadi dalam sejarah dunia. Barangkali banyak di antara kita yang mempunyai pandangan semacam itu. Kita melihat, akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an dunia kebanjiran artikel, analisis, komentar, dan perbincangan yang menyoroti berakhirnya Perang Dingin. Pandangan- pandangannya menyoroti juga perdamaian yang akan terwujud di berbagai kawasan dunia.

Pada abad ke 20 ini kita menyaksikan kemajuan dunia yang mengarah pada bentuk *paroksisme* (pukulan hebat) kekerasan akibat ideologi. Awal abad ini, liberalisme harus berhadapan dengan sisa-sisa absolutisme. Kemudian menghadapi bolshevisme, yang dilanjutkan dengan fasisme. Terakhir, liberalisme berhadapan denagn marxisme yang telah diperbaharui. Baik oleh Lenin, maupun Mao. Ancaman yang dari yang terakhir ini mengarah ke perang nuklir.

Abad ini pula menjadi saksi dari awal puncak kejayaan Demokrasi Liberal Barat. Suatu awal puncak kejayaan yang penuh dengan keyakinan dengan kepercayaan. Keadaan ini tampaknya akan semakin mendekatkan kembali garis lingkaran yang pernah dibuat, menuju ke titik awal ketika lingkaran itu dimulai, yaitu membentuk lingkaran penuh. Demikian kesimpulan yang di buat oleh Francis Fukuyama.

Jadi arah perjalanannya tidak menuju ke arah berakhir ideologi, tidak juga ke arah konvergensi antara kapitalisme dan sosialisme seperti yang dipredìksikan semula. Namun mengarah ke kemenangan liberalisme ekonomi dan politik. Kemenangan yang tanpa dengan menganggung rasa malu sedikitpun. Artinya kemenangan liberalisme itu benar-benar mutlak dan tidak terelakkan.

Dengan berbekal asumsi di atas, tulisan ini akan sedikit ikut urun rembug bagaimana liberalisme itu berdampak kepada dunia kita.

***

Liberalisme adalah sesuatu yang menjadi idealisme Dunia Barat kontemporer. Ini berarti liberalisme menjadi satu-satunya penantang utama realisme. Bagi pengkaji ilmu hubungan internasional, perdebatan antara aliran idealisme dengan realisme bukan hal yang asing. Perdebatan itu hingga kini masih terus berlangsung.

Pandangan idealis menyakini bahwa manusia dapat menentukan nasibnya sendiri. manusia dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan cara berpikir rasional. Dengan demikian masyarakat manusia dan masyarakat internasional dapat dibentuk seperti apa yang diinginkan. Aliran ini mencakup para pasifis, moralis, legalis, humanis, dan federalis internasional. Sebaliknya aliran realis melihat bahwa realitas dunia penuh dengan perjuangan untuk mengejar kekuasaan. Mereka melihat dunia seperti apa adanya.

Namun, banyak ahli yang juga meyakini bahwa ide-ide liberal tentang hubungan internasional tidak berarti kurang mendasarkan pada realitas jika dibandingkan dengan realisme. Liberalisme bukanlah sebuah khayalan mengenai keselarasan kepentingan-kepentingan. Tetapi sebuah gambaran tentang bagaimana dunia pada suatu masa bergerak dan juga gambaran tentang bagaimana seharusnya dunia ini bergerak. Varian terbaru dari teori ini sekarang terkenal dengan jargon akademis sebagai *neoliberal institusionalisme*.

Liberal dalam pengertian yang digunakan di sini tidak sinonim dengan kiri pusat (left of center). Bahasa sehari- hari yang mempunyai arti dalam politik Amerika Serikat. Lebih dari itu, liberal dalam pengertian di sini adalah tradisi filosofis yang berkembang luas yang mengabadikan nilai-nilai politik yang bersifat individu dan kebebasan ekonomi termasuk di dalamnya ide tantang pasar bebas dan bentuk-bentuk kegiatan usaha swasta.

Dalam pandangan Doyle liberal mirip dengan sebuah potret keluarga yang di sana ada prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga. Ciri-ciri tertentu yang mudah dikenal dari sebuah potret keluarga yang bernama liberalisme itu adalah misalnya kebebasan individu, partisipasi politik, kepemilikan pribadi, dan persamaan kesempatan. Hampir semua negara liberal menjalankan karakteristik itu, meskipun tidak satupun yang menerapkannya secara sempurna.

Nilai-nilai dasar liberalisme inilah yang mempersatukan apa yang berjalan di kiri maupun kanan dalam spektrum kehidupan politik Amerika Serikat. Mulai dari George McGovern hingga Ronald Reagan. Amerika Serikat telah menjadi sebuah negara yang secara fundamental sangat liberal dalam pengertian umum seperti di atas. Hampir semua orang di Amerika mengambil prinsip-prinsip dasar liberal sebagai hal yang mutlak mereka terima. Bahkan bangsa Amerika tidak menyadari bahwa liberalisme yang mereka anut adalah sebah ideologi yang berbeda

Ada tiga point penting yang membedakan pandangan liberal dengan pandangan realisme atau dalam tingkat tertentu denagn marxisme.

Pertama, gagasan materi. Nilai-nilai politik dan ekonomi suatu masyarakat paling tidak akan membuat masyarakat mendapatkan ketentraman dan pedamaian. Perdamaian tidak tergantung pada bagaimana struktur perimbangan kekuatan yang terjadi di tingkat internasional. Negara-negara baik, yaitu republik-republik liberal tampaknya hanya digunakan untuk memperkuat apa yang mereka yakini agar mempunyai kemampuan bertahan sendiri (*self defence*). Bukan untuk mengatur negara lain.

Masyarakat yang telah mengandalkan pada perdagangan bebas akan berusaha mencari keuntungan lewat perdagangan dan keuntungan komparatif dalam produksinya. Masyarakat yang demikian tidak akan mencari keuntungan melalui penjarahan dan penaklukan.

Kedua, sejarah bergerak maju. Suatu proses perkembangan di mana gagasan-gagasan yang benar akan selalu mengalahkan gagasan yang salah. Sejarah bukanlah merupakan siklus yang menakdirkan bangsa-bangsa untuk mengulangi kembali kekonyolan-kekonyolan pada masa lampau. Dunia berkembang dari primitif, parokial, dan perilaku destruktif menuju ke arah dunia yang modern, kosmopolitan, dan perdagangan yang efisien. namun masih terbuka peluang untuk terjadinya perkecualian dan pengulangan kembali sejarah.

Ketiga, fakta bahwa sistem internasional bersifat anarkhis ternyata tidak menghalangi keberadaban (civility) dalam hubungan antar bangsa. Dalam kondisi-kondisi tertentu, norma-norma kerjasama dapat membantu menjaga negara-negara dari kondisi saling menjegal. Sebab pemerintah negara-negara di dunia ini melihat adanya keuntungan timbal balik bila mereka menghindari konflik.

Bagi kaum realis, kekacauan dan kemungkinan pecahnya perang adalah sesuatu yang inheren (melekat) di dalam sistem internasional yang terdiri dari banyak negara yang masing-

masing berdaulat dan saling lepas. Tidak ada kekuasaan yang tertinggi yang melingkupi sistem internasional itu.

Sementara itu, bagi kaum liberal, anarkhi adalah suatu yang perlu. Namun bukan sesuatu yang cukup dijadikan alasan untuk terjadinya perang. Sebab-sebab terjadinya perang paling tidak, pada umumnya, diakibatkan oleh kondisi rakyat yang buruk, terbelakang atau diperdaya untuk memulai perang.

Sebab perang dapat disingkap sebagai pertentangan kepentingan-kepentingan yang bersifat material yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Perang bisa ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan yang berdimensi moral. Dalam pandangan liberalism, perang dapat dicegah dengan cara menyebarkan nilai-nilai dan institusi-institusi liberal ke seluruh pojok dunia.

Beberapa aspek dari paradigma liberal di atas berakar pada pernyataan klasik Immanuel Kant tentang Peradamaian Abadi. Kant mengklaim bahwa kecenderungan menuju ke arah kemajuan merupakan sesuatu yang melekat di alam ini. Dengan logika semacam itu, rakyat dan republik-republik berusaha memperbaiki dirinya. Keadaaan inilah yang akan menciptakan perdamaian abadi di dunia.

Logika Kant diatas menjadi unsur pembahasan utama Michael W Doyle dalam *Liberalism and World Politics*. Ia mengupas mengenai mengapa demokrasi beranak pinak dengan damai. Atas pertanyaan ini Doyle menyatakan, republik-republik dalam pandangan Kant mampu menciptakan perdamaian diantara mereka karena republik-republik itu menjalankan rambu- rambu demokrasi. Republik-republik dalam pandangan Kant mampu pula menghargai hak-hak internasional republik republik yang berada diluar mereka.

***

Menurut Fukuyama, hilangnya Marxisme-Leninisme dari Cina dan Uni Soviet berarti adalah kematian sebuah ideologi kehidupan yang membehas signifikasi sejarah dunia. Untuk sementara, Marxisme Leninisme akana diikuti oleh penganut-penganut setianya di tempat-tempat yang terisolasi seperti di Managua, Pyongyang atau Cambrigde dan Massachussetts. kematian Idiologi ini berarti adalah tumbuhnya Common Marketization. Suatu bentuk penciptaan pasar bersama.

Jadi apa yang kita saksikan di Uni Soviet, Eropa Timur, Cina dan negara-negara komunis lainnya adalah bukan sekedar berakhirnya perang dingin. Bukan pula berlangsungnya periode sejarah pos perang tertentu. Sejarah telah berakhir! Demikian tegas Fukuyama.

Berakhirnya sejarah dalam pandangan Fukuyama adalah berakhirnya titik evolusi idiologi umat manusia. Akhir sejarah ditandai dengan adanya universalisme Demokrasi Liberal Barat sebagai bentuk final pemerinahan manusai. Kemenangan Liberalisme telah terjadi terutama dalam dunia pemikiran dan kesadaran.

Pemikiran tentang berakhirnya sejarah ini mengacu pada pendapat Karl Marx. Marx percaya bahwa arah perkembangan sejarah ditentukan oleh pertentangan antara kekuatan kekuatan materi. Pertentangan itu hanya akan berakhir apabila komunis utopia tercapai. Konsep sejarah sebagai sebuah proses dialektika dari awal, pertengahan dan akhir dipinjam oleh Marx dari pendahulunya George Wilhelm Frederich Hegel.

Mengapa liberalisme mencapai puncak kejayaannya ? Barangkali pertanyaan itu muncul di benak kita. Terlebih lagi kalau kita membenarkan pendapat Fukuyama diatas. Untuk menjawab pertanyaan ini ada pandangan yang menarik dari Joseph Schumpeter ketika ia berbicara mengenai pengaruh internasional dari kapitalisme dan Demokrasi. Pandangannya akan memberikan jawaban tentatif atas pertanyaan diatas,yang tentunya masih bisa kita perdebatkan.

Argumen Schumpeter menjawab pertanyaan di atas dari sudut pandang internal liberalisme itu sendiri. Katanya, kapitalisme demokratis membawa kearah perdamaian. Sebagai bukti, Schumpeter mengklaim bahwa dimanapun ketika kapitalis dunia mendapatkan perlawanan maka disitu pecah perang, ekspansi dan diplomsi kabinet. Kapitalisme kontemporer selalu bergandengan tangan dengan group-group damai. Pekerja pekjerja industri kapitalisme dengan tegas sangat anti- imperialisme.

Selain itu, kapitalisme dunia telah berhasil mengembangkan sarana-sarana pencegah perang, seperti Mahkamah Internasional yang tidak bersifat feodal. Amerika Serikat sebagai masyarakat yang sudah sangat kapitalis tidak menunjukkan sedikitpun kecenderungan imperialis. Schumpeter menunjukkan sikap kecenderungan yang tidak imperialis Amerika Serikat ini pada kasus tidak dicaploknya separoh lebih dari wilayah Meksiko dalam Perang Amerika Serikat-Meksiko 1846- 1848.

Berbeda dengan Schumpeter, Fukuyama melihat keberhasilan liberalisme Barat dari sudut pandang ekstern. Ia melihat kemenangan ide-ide Barat sebagai bentuk dari keletihan gairah alternatif sistematis terhadap Liberalisme Barat. Artinya, pandangan-pandangan, ideologi-ideologi atau ajaran- ajaran di luar Liberalisme barat tidak mampu lagi mengadakan rivalitas dengannya. Dekade yang lalu ada perubahan yang mendasar di dalam iklim intelektual dua negara komunis terbesar dunia. Dekade itu juga menjadi awal gerakan-gerakan reformasi yang signifikan di negara-negara komunis.

***

Lalu apa dampak liberalisme itu pada dunia ? Dampak pertama liberalisme yang jelas nampak adalah budaya konsumtivisme Barat yang tidak terelakkan di negara-negara yang dulu merupakan negara komunis dan negara-negara berkembang. Budaya itu merambah berbagai lapisan yang bahkan sampai ke pasar-pasar kawasan pertanian di pedesaan Cina. Rakitan televisi berwarna menyebar dimana-mana. Coca-Cola. restoran-restoran mewah masuk ke HoChi Min City, Xinjiang dan Klaten. Musik Rock dapat dinikmatibersama-sama di Praha, Rangoon dan Teheran.

Kesimpulan utama yang bisa kita petik, fenomena liberalisme internasional baru menjangkau hal-hal di luar *high-politics*. Ini diperkuat dengan fakta masih bercokolnya sistem politik dan pemerintahan Komunisme. otoritarian maupun yang berada di bawah junta militer. Deng masih punya pengaruh besar di Beijing. Castro asyik mengelus jenggot di Cuba, militer Burma menguasai segala bidang. Meskipun dalam hal ekonomi di negara-negara tersebut sudah mengalami reformasi.

Liberalisme internasional juga tidak berarti berakhirnya konflik internasional. Apabila negara-negara yang menganut liberalisme terlalu memaksakan fahamnya, maka yang tercipta adalah perdamaian hubungan luar negeri antara negara-negara penganut liberalisme saja. Dengan logika ini maka Amerika Serikat tidak akan pernah akur dengan Cuba, Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Libya selama negara-negara itu tidak menjadi liberal. Tesis Samuel Huntington tentang konflik peradaban memperkuat pandangan ini.

Jadi, liberalisme mengakibatkan apa yang oleh Hume disebut kekurangajaran (imprudence) internasional. Perdamaian tercipta hanya dalam hubungan antar sesama negara liberal. Sejarah membuktikan, negara-negara liberal sudah terlalu sering melancarkan peperangan dengan negara-negara nonliberal.

Selain itu, liberalisme mengakibatkan imperialisme baru atau neo imperialisme. Yaitu bentuk penjajahan non fisik atau lebih bersifat ekonomis. Penjajahan ini berjalan melalui institusi-institusi kapitalisme Barat yang masuk pada negara-negara berkembang. Salah satu contohnya adalah perusahaan multinasional. Pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini bisa kita telaal pada pandangan-pandangan dan literatur-literatur kaum struktural neo-marxis maupun dependencia.***

dari STIGMA MALING *sampai* *Metamorfosa Pengantin*

Malam itu tidak ada demonstrasi. Tapi gedung Purna Budaya Yogya ramai sekali. Lantaran teater Garasi Fisipol UGM, mementaskan *repertoar* WAH, karya Putu Wijaya. "Lebih dari 600 orang," papar Kristiawan dari tim produksi pada SINTESA, "bahkan kami harus mencetak tiket darurat dari kertas kosong yang distempel panitia." Jumlah penonton yang mengesankan, ditengah kemarau produksi teater kampus yang hidup segan mati pun *sungkan*. Yang jelas pentas 2 April 1995 itu, wujud *go public* awal. Setelah bersama KPALH Setrajana, menggelar pentas musik eksperimen. Pertama April 1993 pada Peringatan Hari Bumi Sedunia, dan kedua Oktober 1994, Apresiasi Seni dan Politik.

AWAS ADA MALING!

Sutradara Yudi A. Tajudin, memilih memotret dunia maling. Sebuah dunia yang penuh *stigma* dan *strata*. Ada maling kelas kambing, kelas teri dan maling kelas kakap. Bahkan ada maling kebenaran. Maling pun ada di mana-mana. Di kampus, dalam birokrasi negara, mungkin juga di batin kita masing- masing. Fenomena ini menyegarkan ingatan penonton pada situasi masyarakat yang sakit. Pers dibredel, pembicara vokal dibungkam. Bahkan, preman, maling kelas teri itu, dilibas. Sementara maling-maling kelas kakap dibiarkan hidup.

Masyarakat resah, keresahan yang menggumpal-gumpal. Gumpalan yang mesti disalurkan. Butuh katarsis. Saatnya teater bicara.

Isu-isu sosial politik kontemporer sungguh menggoda. Teater Garasi tak bisa berpaling. Pusat kekuasaan tetap jadi bahan sodokan. Suksesi, konglomerasi, sampai penyakit aktivis dan masalah komersialisasi pendidikan mengemuka di panggung. Berlarik-larik isu bermunculan. Meski isu-isu itu dikemas dalam ledekan 'simbolik' khas Yogya. Kadang saru menyerempet tabu-tabu. Namun disampaikan secara cerdas biar masih malu-malu. Urat haru penonton pun terbetot. Sesekali ada tawa menggelegar. Gemuruh tepuk tangan penonton mengikuti adegan-adegan yang 'kena'.

Dramatis, teror mental, pelaku anonim. Aktor yang cepat berubah peran secepat lenggok penari Bali, menjadi ciri umum naskah-naskah Putu Wijaya. Untuk repertoar WAH, gaya opera merupakan pilihan Garasi. Sesekali terlihat dialog-dialog panjang, bergegas nyanyi bersama secepat itu pula menanggalkan kostum dengan peran baru. Seorang aparat keamanan umpamanya sekaligus menjadi maling (Guntur, Nasheer).

DOK GARASI

Maling mempunyai ideologi. Punya pengikut, punya guru. Maling juga punya lembaga pendidikan khusus. Bahkan maling menjadi gaya hidup. Seperti saran Mbak Tut (Naomi Srikandi), "Jadikanlah kemalingan sebagai gaya hidup."

Setra's music mengiringi repertoar berdurasi dua jam itu. Berlanggam pop dengan tiga penyanyi latar. Karena letaknya jauh dari panggung musik kerap lepas dari irama main para aktor. Meski lambat laun sampai penghujung pentas 'Ngeng' opera dapat ditangkap. Siluet gunungan wayang berhasil membius perhatian penonton di awal pementasan. Diikuti inisiasi peran lainnya. Up grading para maling hingga munculnya mbak Tut yang cukup menyihir penonton. Sayang irama main turun naik, mencair-memekat-mencair. Utamanya pada adegan kedua, saat penataran maling. Improve-improve cerdas pemain (Gepeng Bayu Aji) membikin genit pemain lain untuk mengobral improve. Irama melambat, pada saat ini tampak kedodoran.

Tiba-tiba panggung menjadi 'chaos'. "*Hey ngapain* kalian *rame-rame* di sini ?", bentak Tadjudin yang malam itu berblangkon membawa gunungan. "Sana pulang...... AWAS ADA MALING !!" Sebitan spanduk yang dijalin menjadi jala memerangkap para penonton yang akan beranjak dari kursi.

Yang jelas ini bukan pentas yang terakhir,"Setelah WAH kami akan memanggungkan naskah 'Metamorfosa Pengantin' di Yogya, Solo, Surabaya dan Malang pada Agustus sampai September mendatang," jelas Yudi saat acara tumpengan Pentas Empat Kota. ***(Djudjur T.Susila)***